PEMERINTAH
KABUPATEN TAPIN

BAPPELITBANG
KABUPATEN TAPIN

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Tapin Tahun 2023 dapat disusun. Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Bappelitbang melaporkan kinerja dan menyampaikan kepada Bapak Bupati Tapin sebagai bahan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) periode bulan Januari sampai dengan Desember 2023 ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKjIP pada tahun yang akan datang.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan (LKjIP) Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2023. Semoga (LKjIP) Tahun anggaran 2023 ini dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Tapin, khususnya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.

Rantau, Maret 2024

KEPALA BAPPELITBANG

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BAPPE LITBANG

Dr. H. Meidy Harris Prayoga, SE., ME.
Pembina

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin tahun 2023 ini disusun dalam rangka mendukung pencapaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapin yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan tahun 2023 yang telah disepakati antara Kepala Bappelitbang dengan Bupati Tapin.

Terdapat 4 (Empat) kinerja utama dan 4 (empat) indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Peneltian dan Pengembangan Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Peneltian dan Pengembangan Tahun 2018-2023 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Peneltian dan Pengembangan Nomor : 970/73/Bappelitbang/2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Peneltian dan Pengembangan tahun 2023.

Rata-rata pencapaian indikator kinerja tersebut secara keseluruhan mencapai 86,68 persen atau masuk dalam kategori Baik. Adapun, 3 (Tiga) indikator kinerja utama yang ditetapkan masuk ke dalam kriteria Baik (B) karena memiliki nilai kinerja >75%, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja utama yang ditetapkan masuk ke dalam kriteria Cukup (C) karena memiliki nilai kinerja <75%. Adapun rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Relisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	7,2	7,2	100%
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Government Award (IGA)	65	52,94	81,45%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79	76,60	96,96%
4.	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	70	47,80	68,29%
			RATA-RATA	**86,68**	

Pencapaian target indikator kinerja utama tersebut didukung dengan melaksanakan 4 program dengan 15 kegiatan dan 44 Sub-kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.692.805.823,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp13.154.194.467,00 atau 83,82%. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai realisasi anggaran 100%, antara lain karena adanya efisiensi penggunaan anggaran dan kegiatan telah dilaksanakan melalui kerjasama antar perangkat daerah, namun semua kendala tersebut tidak mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tapin pada umumnya dan Badan Perencanaan Pembangunan Peneltian dan Pengembangan pada khususnya.

Rantau, Maret 2024
KEPALA BAPPELITBANG

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN BAPPELITBANG

Dr. H. Meidy Harris Prayoga, SE., ME.
Pembina

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
EXECUTIVE SUMMARY i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR LAMPIRAN v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. GAMBARAN UMUM, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD 3
1.3. DUKUNGAN SUMBER DAYA 14
1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 22
1.5. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 22
1.6. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022 24
BAB II PERENCANAAN KINERJA 26
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS 26
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 27
2.3. PERJANJIAN KINERJA 32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 46
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 46
4.2. REALISASI ANGGARAN 106
BAB IV PENUTUP 107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Nominatif PNS 15
Tabel 1.2 Sarana-Prasarana Kantor Bappelitbang Kabupaten Tapin 20
Tabel 1.3 Progres Nilai SAKIP Bappelitbang Tahun 2019-2022 24
Tabel 1.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BappeLITBANG Tahun 2022 24
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Bappelitbang 2018-2023 26
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Tapin 29
Tabel 2.3 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Bappelitbang Tahun 2023 31
Tabel 3.1 Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbang 49
Tabel 3.2 Capaian atas Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja Utama 1 Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2023 49
Tabel 3.3 Skala Index 51
Tabel 3.5 Capaian atas Sasaran Strategis 2 Bappelitbang 52
Tabel 3.2 Capaian atas Sasaran Strategis 3 dan 4, Indikator Kinerja Utama 3 DAN 4 Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2023 54
Tabel 3.6 Analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2023 56
Tabel. 3.7 analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Tahun 2023 dengan Jangka Menengah 58
Tabel 3.8 Analisis Kinerja Atas Efisiensi Sumber Daya 87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Akuntabilitas Kinerja 1
Gambar 2. Hubungan Perencanaan dengan Kinerja 2
Gambar 3. Bagian Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 13
Gambar 4. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan 18
Gambar 5. Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang 18
Gambar 6. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas SAKIP Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2022 109

Lampiran 2. ANALISA PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA TAHUN 2023 111

Lampiran 3. Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2023 113

Lampiran 4. Surat Keputusan TIM SAKIP Bappelitbang Kabupaten Tapin 117

Lampiran 4. sTANDAR oPERASIONAL PROSEDUR (sop) eVALUASI akip internal bappelitbang 120

Lampiran 5. Review Draft Dokumen LkjIP dan pengisian lke internal Bappelitbang Kabupaten Tapin oleh Tim Sakip Bappelitbang 125

Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2023 133

Lampiran 7. Perubahan Perjanjian Kinerja I Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2023 150

Lampiran 8. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ii bAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 160

Lampiran 10. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Capaian Kinerja tw i - iii Tahun 2023 179

Lampiran 11. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Capaian Kinerja tw iv Tahun 2023 183

Lampiran 12. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan evaluasi Triwulan I, II, III dan IV kinerja Bappelitbang Tahun 2023 191

Lampiran 13. DATA DUKUNG PELAKSANAAN Monitoring rencana aksi dan Evaluasi dan Evaluasi kinerja Bappelitbang Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2023 198

Lampiran 14. DOKUMENTASI KEGIATAN ASISTENSI POHON KINERJA BAPPELITBANG TAHUN 2023 218

Lampiran 15. Cross Cutting bappelitbang 228

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah amanat reformasi birokrasi yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintahan. Oleh karena itu, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah diharuskannya setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah tersebut atas penggunaan anggaran yang telah digunakan selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 perihal Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

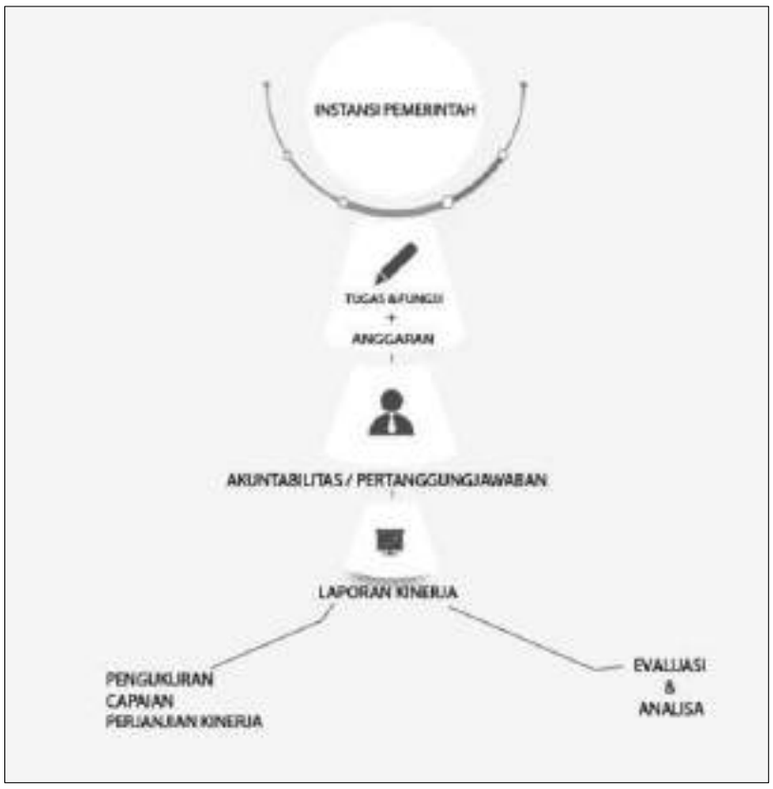

GAMBAR 1. AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang dibuat sebelumnya.

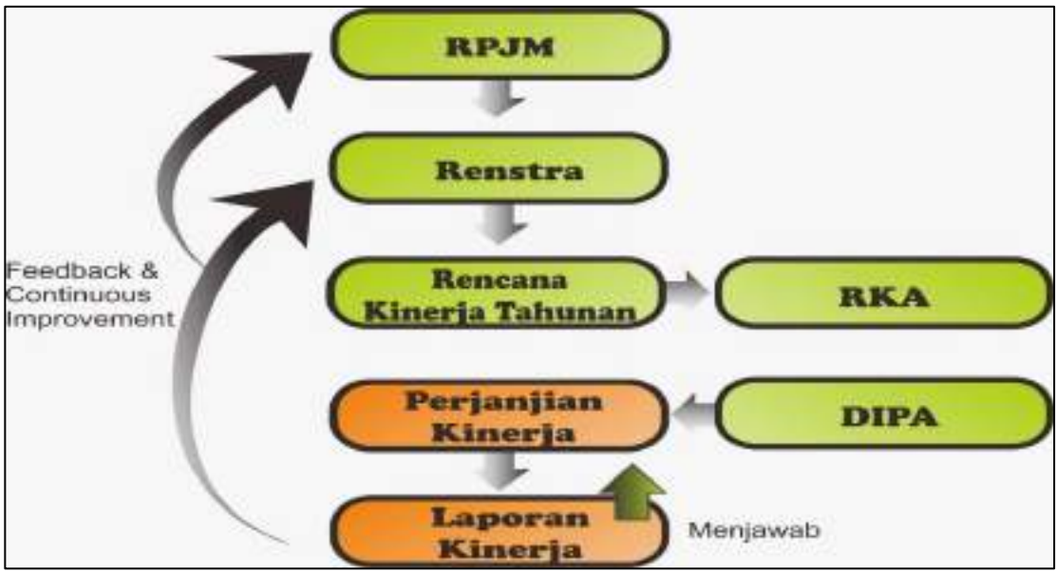

GAMBAR 2. HUBUNGAN PERENCANAAN DENGAN KINERJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pada Pasal 46 ayat (3) Badan Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pasal 46 ayat (4) berbunyi: Badan Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Pada pasal 46 ayat (5) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.2. GAMBARAN UMUM, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pegembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tapin adalah Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang tugas membantu Bupati dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Urusan-urusan yang dilaksanakan dimaksud juga mencakup tugas-tugas Pemerintah yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah melalui azas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tapin dibidang perencanaan daerah dituntut untuk mampu menyiapkan perencanaan daerah yang aspiratif, responsif, partisipatif, implementataif, efektif, realistis dan berorientasi pada masyarakat dan daerah, serta dapat dipertanggunng jawabkan. Dengan demikian dokumen perencanaan yang dihasilkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pegembangan Kabupaten Tapin menjadi acuan seluruh satuan kerja perangkat daerah/instansi dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi Pemerintah Kabupaten Tapin.

Dasar hukum pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin mempunyai tugas pokok “menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan” di Kabupaten Tapin.

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbang Kabupaten Tapin

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang ekonomi dan infrastruktur;
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang sosial dan sumber daya manusia;
f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
h. pengelolaan kesekretariatan; dan
i. pelaksanaan tugas lain sesuaibidangtugasdan kewenangannya.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang ekonomi dan infrastruktur;
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang sosial dan sumber daya manusia;
f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
h. pengelolaan kesekretariatan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin terdiri dari:

1.2.2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan merupakan koordinator utama dalam proses perencanaan pembanguan, penelitian dan pengembangan yang bertugas untuk memastikan bahwa semua aktivitas terkait perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan berjalan secara efektif dan efisien. Uraian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan adalah:

a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam bentuk RPJPD, RPJMD dan RKPD;
c. mengoordinasikan, membina, mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam bentuk Renstra dan Renja Organisasi Perangkat Daerah;
d. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dengan OPD dan BUMN/BUMD melalui Musrenbang dan Rapat Koordinasi dalam rangka sinkronisasi program;
e. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan konsep Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD;
f. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya;
g. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi;
h. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
i. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

j. mengoordinasikan dan membina secara teknis dan administratif serta mendelegasikan tugas kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing;
k. mengelola kegiatan kesekretariatan; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

1.2.3. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengkoordinir kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dalam menyusun rencana, program, dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, membina dan menata organisasi dan tata laksana, mengelola barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, mengoordinir pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
d. pelaksanaan urusan keuangan;
e. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan;
f. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bappelitbang;
g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Unsur-unsur Sekretariat terdiri dari:

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan kegiatan kedinasan;

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;

(3) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan.

1.2.4. Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan dalam rangka integrasi (keterpaduan perencanaan) dan sinkronisasi (penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku) perencanaan pembangunan, perencanaan pembiayaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evalusi dan informasi pembangunan daerah;
b. Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pebangunan daerah;
c. Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
d. Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
e. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
f. Penyusunan program, pengordinasian sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
g. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;

h. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
i. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
j. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah
k. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
l. Penyusunan dan pengelolaan hasil evauasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
m. Pemantauan dan evaluasi bidang perencanaan dan pengendalian.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian terdiri dari:

1. Sub Bidang Perencanaan : mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasiltasi dan supervisi perencanaan.
2. Sub Bidang Pengendalian : mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengendalian pembangunan daerah.

1.2.5. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Daerah dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi, pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;

c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
d. evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terdiri dari :

(1) Sub Bidang Ekonomi Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi, pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2) Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi, pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.

1.2.6. Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia

Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi, pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia;
b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
d. evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah; dan

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

(1) Sub Bidang Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi, pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD.

(2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi, pengendalian dan monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.

1.2.7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;

b. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;

c. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan;

d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

e. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
f. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
h. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

(1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian, Sekretariat Daerah, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD.
(2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.

1.2.8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin sesuai dengan keahlian dan kebutuha. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun keompok jabatan fungsional di Bappelitbang kabupaten Tapin terdiri dari 5 (lima) orang Jabatan Fungsional Perencana, 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Peneliti dan 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Pemanfaatan Ilmi Pengetahuan dan Teknologi.

GAMBAR 3. BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

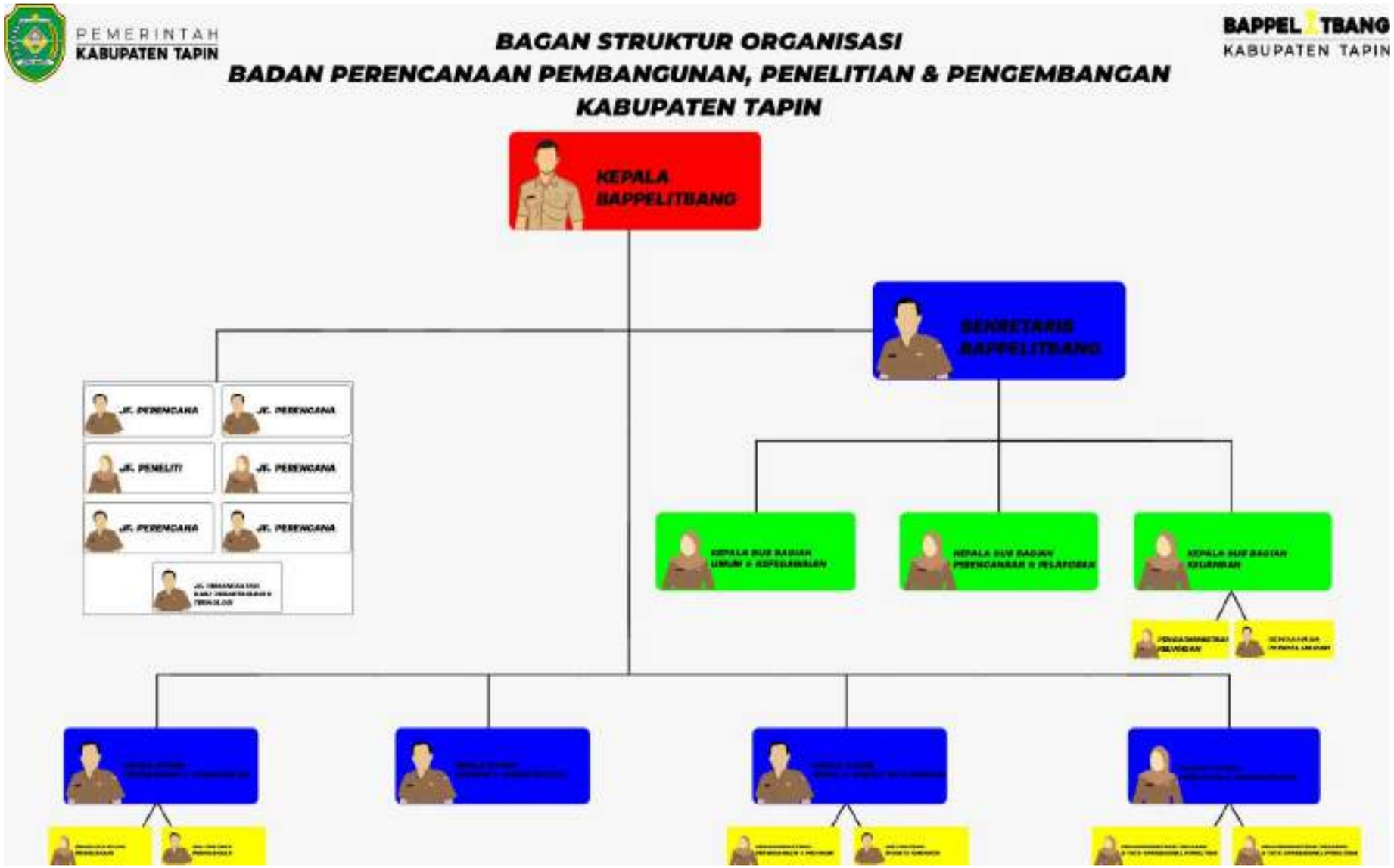

1.3. DUKUNGAN SUMBER DAYA

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, Sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Kinerja sumber daya manusia merupakan hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan dan persepsi tugas. Usaha merupakan hasil motivasi yang menunjukan jumlah energi (fisik atau mental) yang digunakan oleh individu untuk menjalankan suatu tugas. Dukungan sumber daya manusia yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin menurut jabatan bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 1.1 DATA NOMINATIF PNS

No	NIP	Nama	Gelar Depan	Gelar Belakang	Golongan Ruang			Jabatan		Pendidikan	
					Gol. Ruang Terakhir	Masa Kerja		Jenjang Jabatan	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan Terakhir	Program Studi/Jurusan
						Thn	Bln				
1	2	3	4	5	12	14	15	16	18	19	21
1.	198405222008031001	MEIDY HARRIS PRAYOGA	Dr. H.	S.E., M.E.	IV/a	15	04	Pimpinan Tinggi Pratama	Kepala Badan	S.3/Profesi/sederajat	Doktoral Ilmu Pertanian
2.	197605142005011009	RADEN CHANDRA NUGRAHA POETRA SOEPENA	-	S.T., M.S.	IV/b	18	01	Administrator (setara esselon III)	Sekretaris Badan	S.2/Profesi/sederajat	Magister Sains
3.	197905072005012015	MAHDIATI	-	S.P., M.Ling.	IV/a	18	06	Administrator (setara esselon III)	Kabid Penelitian dan Pengembangan	S.2/Profesi/sederajat	Magister Pengelolaan SDA dan Lingkungan
4.	197808042006041004	ZULFIAN RADMI	-	S.T., M.Eng.	IV/a	17	03	Administrator (setara esselon III)	Kabid Perencanaan & Pengendalian	S.2/Profesi/sederajat	Magister Perencanaan Kota dan Daerah
5.	197611111999031003	ANWAR YAMINI	-	S.Mn., M.M.	IV/a	24	08	Administrator (setara esselon III)	Kabid Ekonomi dan Infrastruktur	S.2/Profesi/sederajat	Magister Manajemen
6.	197504092008031001	MUHAMAD KHAIR RANI	-	S.E.	IV/a	14	04	Administrator (setara esselon III)	Kabid Sosial dan SDM	S.1/D-IV/sederajat	Ekonomi Pembangunan
7.	197612142009011002	ARIF RAHMAT D	-	S.Sos.	III/d	14	02	Pengawas (setara esselon IV)	JF Pemanfaatan Iptek	S.1/D-IV/sederajat	Administrasi Negara
8.	198405042010012024	RIRY MAGRIATY	-	S.E. ,M.Si.	III/d	13	06	Pengawas (setara esselon IV)	JF Peneliti	S.2/Profesi/sederajat	Magister Sains Ilmu Perencanaan WIlayah
9.	198501122009042004	SITI NUR AZIZAH	-	S.Kom.	III/d	14	03	Pengawas (setara esselon IV)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S.1/D-IV/sederajat	Sistem Informasi
10.	198408012010012024	AGUSTIN CAROLINA	-	S.E,. M.M.	III/d	13	06	Pengawas (setara esselon IV)	Kasubbag Keuangan	S.2/Profesi/sederajat	Magister Manajemen

No	NIP	Nama	Gelar Depan	Gelar Belakang	Golongan Ruang			Jabatan		Pendidikan	
					Gol. Ruang Terakhir	Masa Kerja		Jenjang Jabatan	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan Terakhir	Program Studi/Jurusan
						Thn	Bln				
11.	198510302019032001	FAJAR SURI KUSUMA W	-	S.E.	III/b	04	04	Pengawas (setara esselon IV)	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	S.1/D-IV/sederajat	Ekonomi Pembangunan
12.	197609302014062006	EVI SELVI ADRIANI DS	-	S.T.	III/c	9	11	Pengawas (setara esselon IV)	JF Perencana	S.1/D-IV/sederajat	Teknik Sipil
13.	198307172015031002	UCI SANUSI	-	S.E.	III/c	08	05	Pengawas (setara esselon IV)	JF Perencana	S.1/D-IV/sederajat	Ekonomi Manajemen
14.	198606132015031001	ARIEF FITRIANTO	-	S.E.	III/c	08	04	Pengawas (setara esselon IV)	JF Perencana	S.1/D-IV/sederajat	Ekonomi Manajemen
15.	199201292015031001	M.HILMI JAMALUDDIN	-	S.E.	III/c	08	04	Pengawas (setara esselon IV)	JF Perencana	S.1/D-IV/sederajat	Ekonomi Manajemen
16.	197304152006041013	NOR IFANSYAH	-	S.Kom.	III/c	17	06	Pengawas (setara esselon IV)	JF Perencana	S.1/D-IV/sederajat	Sistem Informasi
17.	199602242023211012	RAFIF MUSYAFFA	-	S.Kom.	Gol IX (III/a)	01	01	Pelaksana	Ahli Pertama Pranata Komputer	S.1/D-IV/sederajat	Sistem Informasi
18.	198403052023211015	ANDRI MUCHTAR	-	S.E.	Gol IX (III/a)	01	01	Pelaksana	Ahli Pertama Perencana	S.1/D-IV/sederajat	Ilmu Ekonomi
19.	197507152009012004	FARIDAH ARIANI	-	A.Md.	II/d	14	05	Pelaksana	Pengadministrasi Perencanaan & Program	D-III/Sarjana Muda/sederajat	Akuntansi
20.	197509012009011006	MUHAMMAD SYAHDANI	-	A.Md.	II/d	14	05	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	D-III/Sarjana Muda/sederajat	Akuntansi
21.	197804152009012005	SITI MARFUAH	-	A.Md.	II/d	14	05	Pelaksana	Pengadministrasi Keuangan	D-III/Sarjana Muda/sederajat	Akuntansi

No	NIP	Nama	Gelar Depan	Gelar Belakang	Golongan Ruang			Jabatan		Pendidikan	
					Gol. Ruang Terakhir	Masa Kerja		Jenjang Jabatan	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan Terakhir	Program Studi/Jurusan
						Thn	Bln				
22.	197202301993032003	LILI DAMAYANTI	Hj.	-	III/b	25	11	Pelaksana	Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Penelitian	SLTA/D-I/sederajat	IPS
23.	197412182009012002	SUMIATI	-	-	II/d	14	05	Pelaksana	Pengadministrasi Perencanaan & Program	D-III/Sarjana Muda/sederajat	Akuntansi
24.	197308102012122003	ISNANIAH	-	-	II/a	12	03	Pelaksana	Pengadministrasi Program & Tata Operasional Penelitian	SLTP/sederajat	-

Berdasarkan data tabel 1 diatas maka didapatkan sebaran pegawai berdasarkan jenjang jabatan yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

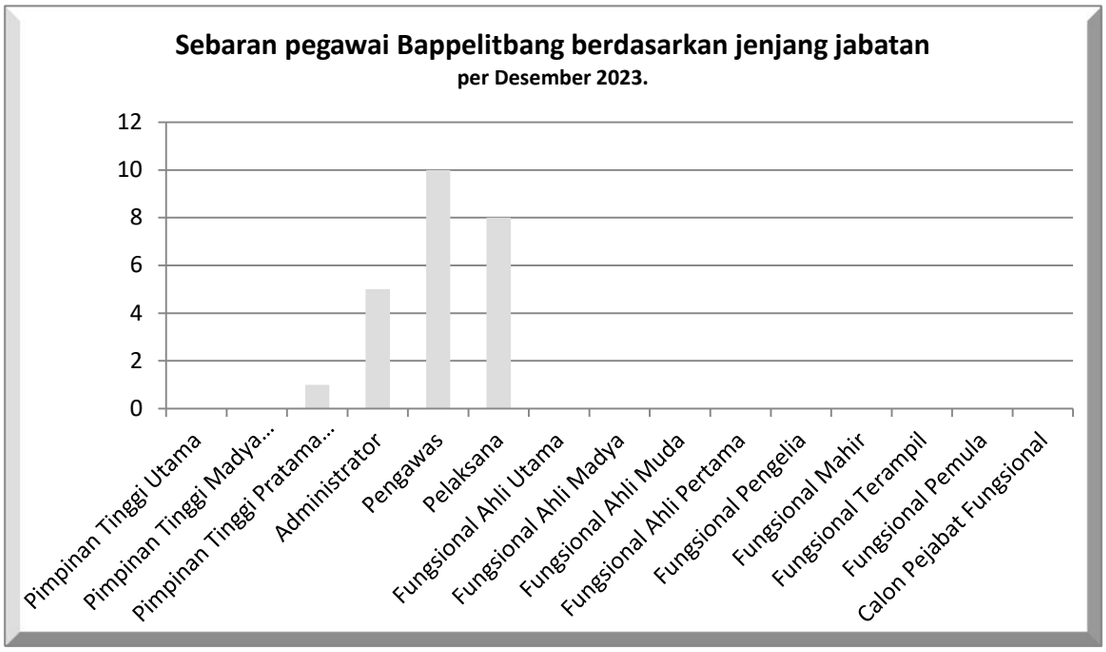

GAMBAR 4. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG JABATAN

Berdasarkan data Tabel 1 diatas maka didapatkan sebaran pegawai berdasarkan golongan ruang yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

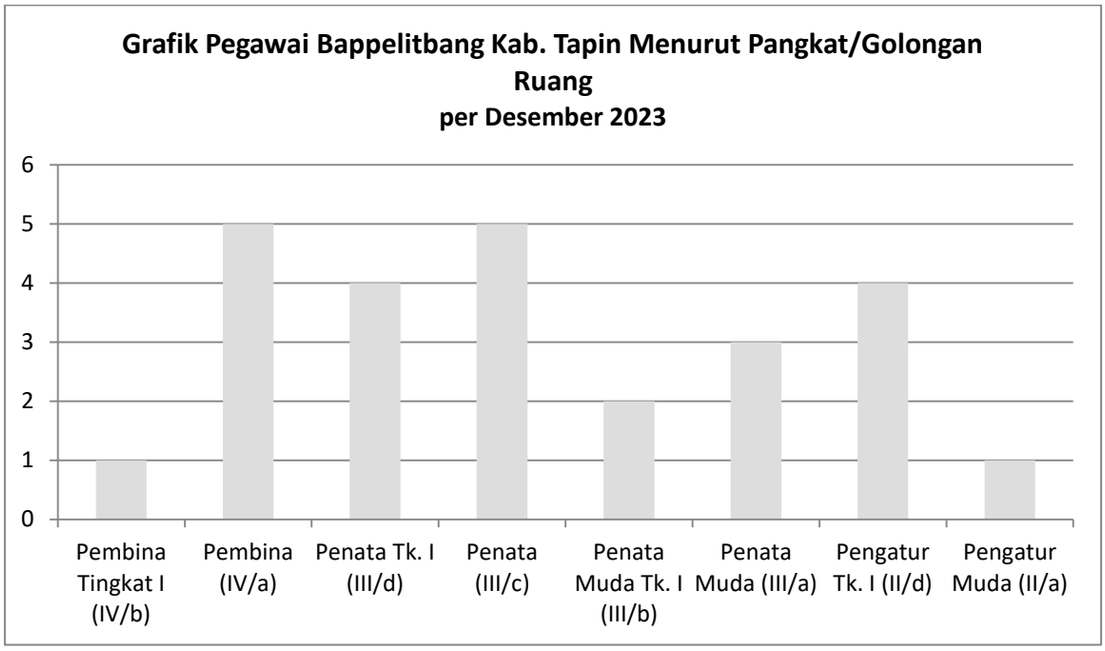

GAMBAR 5. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

Berdasarkan data juga maka didapatkan sebaran pegawai berdasarkan jenjang pendidikan yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

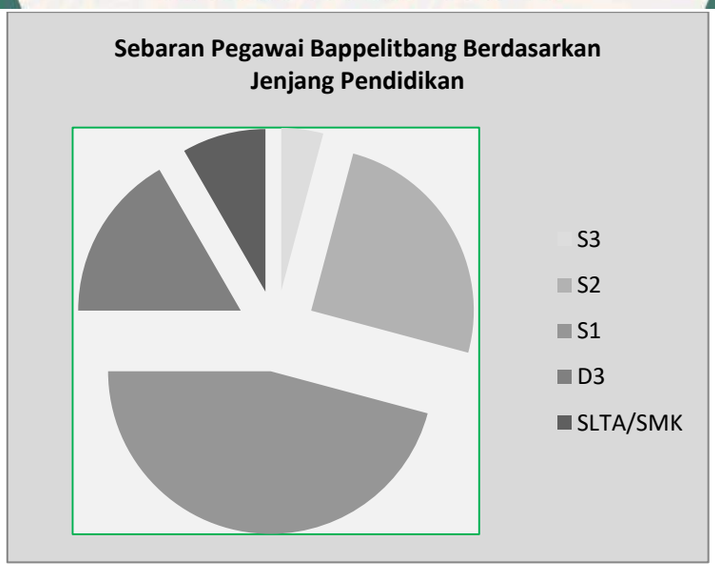

GAMBAR 6. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

1.3.1. Dukungan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana kantor adalah dua hal yang sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas kantor guna mencapai tujuan suatu organisasi. Dimana sarana merupakan fasilitas yang dapat dilihat serta di gunakan oleh karyawan dalam menyelesaikan tugas kantor. Contohnya; gedung, ruangan kantor, peralatan, mesin kantor. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas yang tidak berwujud, namun menjadi pedoman karyawan dalam bekerja. Untuk itu, guna mencapai tujuan organisasi, suatu kantor harus dapat menjamin dan menyediakan fasilitas yang menunjang keberhasilan karyawannya dalam bekerja. Karena jika suatu kantor hanya mengandalkan tenaga karyawannya saja tanpa di dukung dengan fasilitas yang memadai, tentu karyawan akan bekerja dengan kurang maksimal dan segala aktivitas kantor tidak dapat berjalan dengan lancar. Akibatnya, tujuan dari organisasi itu sendiri tidak tercapai. Dukungan sumber daya manusia sarana dan prasarana yang ada pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin bisa dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

TABEL 1.2 SARANA-PRASARANA KANTOR BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN

NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	STATUS BARANG
Sepeda Motor (Supra DA838K, Suzuki Thunder DA5305K, Suzuki Axelo DA2495KAH, Yamaha Vixion DA5301KT, DA5302KT, DA5303KT, DA5304KT, DA5299KT)	8	buah	Digunakan Sendiri
Mini Bus (Toyota Innova DA1792KI, Toyota Avanza DA1167KE)	2	buah	Digunakan Sendiri
Filling Cabinet	3	Buah	Digunakan Sendiri
Meja	59	Buah	Digunakan Sendiri
Amplifer	6	Buah	Digunakan Sendiri
Loudspeaker	3	Buah	Digunakan Sendiri
Sepeda Motor	8	Buah	Digunakan Sendiri
Lemari	18	Buah	Digunakan Sendiri
Papan Pengumuman	5	Buah	Digunakan Sendiri
AC	27	Unit	Digunakan Sendiri
PC Unit	27	Unit	Digunakan Sendiri
Jaringan Distribusi Tegangan	2	Unit	Digunakan Sendiri
Transportable Generating Set	1	Unit	Digunakan Sendiri
Rak	8	Buah	Digunakan Sendiri
kursi	237	Buah	Digunakan Sendiri
Mebeulair	2	Buah	Digunakan Sendiri
Personal Komputer Lainnya	5	Unit	Digunakan Sendiri
Jaringan Transmisi Lain-lain	1	Unit	Digunakan Sendiri
Global System	1	Unit	Digunakan Sendiri
Sofa	8	Buah	Digunakan Sendiri
Televisi	8	Unit	Digunakan Sendiri
Layar Film / Projector	7	Unit	Digunakan Sendiri
Mini Bus	2	Buah	Digunakan Sendiri
Mic	3	Buah	Digunakan Sendiri
Camera Video	1	Unit	Digunakan Sendiri
Printer	25	Buah	Digunakan Sendiri
Kitchen Set	1	Unit	Digunakan Sendiri
Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Unit	Digunakan Sendiri
Lensa kamera	2	Unit	Digunakan Sendiri
Alat Kedokteran Poliklinik	1	Unit	Digunakan Sendiri
Overhead Projector	2	Unit	Digunakan Sendiri
UPS	5	Buah	Digunakan Sendiri
Battery Charge	4	Buah	Digunakan Sendiri
Trestirial Camera	1	Unit	Digunakan Sendiri
Laptop	24	Unit	Digunakan Sendiri
Recorder Display	1	Unit	Digunakan Sendiri
Vacuum Cleaner	6	Buah	Digunakan Sendiri
Sound System	2	Buah	Digunakan Sendiri
Mimbar Podium	1	Buah	Digunakan Sendiri

NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	STATUS BARANG
Handy Cam	1	Unit	Digunakan Sendiri
Karpet	11	Buah	Digunakan Sendiri
Buffet Kaca	1	Buah	Digunakan Sendiri
Video Conference	1	Unit	Digunakan Sendiri
Video Monitor	1	Unit	Digunakan Sendiri
Bracket Folder	3	Unit	Digunakan Sendiri
Room humidifier	2	Buah	Digunakan Sendiri
Tablet	6	Unit	Digunakan Sendiri
Peralatan Mainframe	1	Unit	Digunakan Sendiri
External Portable Hardisk	5	Unit	Digunakan Sendiri
Router	2	Unit	Digunakan Sendiri
Dispenser	4	Buah	Digunakan Sendiri
Audio Consule	1	Unit	Digunakan Sendiri
Note Book	3	Unit	Digunakan Sendiri
Scanner	4	Unit	Digunakan Sendiri
Maket/Miniatur/Replika	2	Unit	Digunakan Sendiri
CCTV	1	Unit	Digunakan Sendiri
Acces Control System	3	Unit	Digunakan Sendiri
Lampu Gantung	1	Buah	Digunakan Sendiri
Switch	3	Unit	Digunakan Sendiri
Exhaust Fan	8	Unit	Digunakan Sendiri
Stabilizer	7	Buah	Digunakan Sendiri
Calculator	2	Buah	Digunakan Sendiri
Tripod	1	Buah	Digunakan Sendiri
Alat Pemadan Portable	5	Buah	Digunakan Sendiri
Vertikal Blind	3	Unit	Digunakan Sendiri
Brankas	1	Buah	Digunakan Sendiri

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin menemukan potensi dalam pelayanan. Adapun potensi pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas.
2. Struktur organisasi yang baik dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas.
3. Perkembangan teknologi informasi menunjang pelaksanaan proses perencanaan terutama untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perencanaan pembangunan daerah.
4. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi pedoman teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
5. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
6. Peningkatan hubungan timbal balik dengan pihak eksternal terkait penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
7. Komitmen Kepala Daerah terhadap konsistensi program pembangunan daerah.

1.5. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat:

1. Perlu ditambahnya SDM Perencana yang berkualitas

Tugas yang diemban aparat perencana mampu secara professional melaksanakan tugas pokoknya, dan mampu berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan, diperlukan upaya proses pembelajaran yang berkesinambungan. Peningkatan kualitas Sumberdaya Perencana di instansi pemerintah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan saja (kognisi, afeksi dan psikomotor), namun pengembangan juga didasarkan pada upaya peningkatan kapasitas institusi perencanaan sehingga kualitas output perencanaan yang dihasilkan dapat memenuhi harapan masyarakat luas. Untuk itu sebagai apparat perencana, ke depan lebih dituntut untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam keberhasilan pembangunan berdasarkan atas kegiatan perencanaan yang

dilakukannya. Dalam hal tersebut melihat kondisi yang ada sekarang di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin kurang cukup mempunyai aparat perencana sehingga cukup mengganggu kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin dalam memaksimalkan kinerjanya.

2. Kurangnya SDM peneliti.

Analis Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah. Kurangnya analis peneliti di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin menyebabkan kurang berkembangnya penelitian dan pengembangan terutama dalam hal inovasi daerah yang berguna dalam menunjang pembangunan daerah.

3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi

berkembangannya teknologi informasi di berbagai bidang tak terlepas dari perannya dalam membuat, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan informasi. Penggunaan perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan smartphone pun turut membuat teknologi informasi kian dibutuhkan masyarakat luas. Aplikasi yang sebelumnya telah ada yaitu “e-tamasa”, “e-office”, “e-starlitbang”, masih terus dikembangkan untuk menjawab, mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Bappelitbang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam meningkatkan pengembangan aplikasi “e-sakip” versi II. Yang mana pengembangan aplikasi ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin tahun 2021.

4. Optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja.

Belum optimalnya monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta penggunaan hasil monitoring dan evaluasi dalam proses pengambilan keputusan dan proses perencanaan pembangunan daerah selanjutnya yang dikarenakan belum adanya tindak lanjut dalam evaluasi.

1.6. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

Evaluasi SAKIP dilakukan guna mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasi SAKIP sekaligus untuk menjaga konsistensi implementasi SAKIP dan mendorong adanya peningkatan kinerja, untuk itu setiap tahun dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada instansi pemerintah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Tapin. Progres nilai hasil evaluasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan tahun 2019 – 2022 sebagai berikut:

NO	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2019	81,63	A
2	2020	85,43	A
3	2021	76,50	BB
4	2022	76,60	BB

TABEL 1.3 PROGRES NILAI SAKIP BAPPELITBANG TAHUN 2019-2022

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal, berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah Tahun 2022, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 2022 sebagai berikut:

TABEL 1.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP BAPPELITBANG TAHUN 2022

No.	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Pengukuran capaian kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi e-sakip V II
2.	Menyajikan analisisi dan evaluasi capaian dibanding dengan target nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja)	Analisis dan evaluasi capaian Bappelitbang untuk saat ini masih belum dapat dibandingkan dengan tingkat nasional maupun internasional. Adanya perbedaan dalam menentukan indikator dan target perencanaan dan penelitian dengan daerah lain.

3.	Menggunakan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja	Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi e-sakip V2, yang dapat diakses langsung melalui tautan *https://admin.esakip.tapinkab.go.id/login*
4.	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja. Hal ini terlihat dalam rangka penyusunan cascading kinerja menggunakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.
5.	Belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Kinerja Bappelitbang dalam kondisi yang lebih baik berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hal ini terlihat dalam pengambilan keputusan penyusunan pohon kinerja dan cascading kinerja dilaksanakan dengan Bidang bersangkutan dan Tim SAKIP Bappelitbang, dengan melihat hasil akuntabilitas sebelumnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan atau dengan kata lain visi adalah kondisi ideal tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan dimasa depan. Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Tapin tahun 2018-2024 sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 yaitu "Bersama Mewujudkan Tapin Maju Sejahtera dan Agamis", maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Tapin sebagai salah satu organisasi perangkat daerah unsur penunjang urusan Pemerintahan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan akan berperan mendukung dalam pencapaian misi ke- 5 (lima) pada RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2024 yaitu "Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government)".* Untuk mewujudkan misi tersebut dijabarkan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki.

Adapun tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dalam tabel berikut:

TABEL 2.1 TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN RENSTRA BAPPELITBANG 2018-2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahaan Daerah	Nilai SAKIP
		Nilai LPPD

Untuk mewujudkan tujuan meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator tujuan Nilai SAKIP dan Nilai LPPD maka Bappelitbang Kab. Tapin menetapkan 4 sasaran yang didukung oleh 4 Program.

2. Sasaran

Sasaran merupakan merupakan ukuran pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas perencanaan (IKP)
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Government Award (IGA)
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut, Bappelitbang kab. Tapin melaksanakan 4 Program, 12 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan.

3. Stategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah tersebut. Strategi dan arah kebijakan selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan kegiatan bagi setiap program yang ingin dicapai.

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mendorong peningkatan integrasi dan sinkronisasi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan implementasi mekanisme sesuai regulasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
2	Mendorong penerapan teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatkan sinkronisasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian target program/kegiatan
3	Meningkatkan penyediaan dan pemuatkhiran data hasil kelitbangan	Peningkatan kualitas data kelitbangan yang digunakan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kierja instansi pemerintah, maka dilakukan reviu terhadap Indikator

Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Pedoman atas Indikator Kinerja Utama dalam memperkuat akuntabilitas ke dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas perencanaan (IKP)
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Government Award (IGA)
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait makna indikator, cara perhitungan indikator, dan penjelasan makna indikator sebagaimana dijelaskan berikut ini:

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISA
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan $Nilai\ Skala = \frac{\text{Total score rata} - \text{rata dari (nilai proses perencanaan} + \text{nilai isian perencanaan} + \text{nilai jaminan tindak lanjut)}}{\text{total score ideal}} x10$	Perumusan target sebesar 7,2 merupakan hasil perhitungan 3 dimensi perencanaan yaitu dimensi proses musrenbang, isi dokumen (RKPD dan renja-OPD), jaminan tindak lanjut hasil perencanaan pada dokumen anggaran tahunan. Indeks diukur dalam skala 1 s/d 10 (kuantitatif) dan 5 jenjang kategori (kualitatif). Berdasarkan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar score 6,56 dari target score 7,1 maka penetapan target di tahun 2023 sebesar score 7,2.
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Government Award **SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA**	Indeks Government Award (IGA) atau indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan data Inovasi yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri kemudian merilis Indeks Government Award (IGA) setiap daerah. Target yang ditetapkan adalah 65, atau berada pada kategori Sangat Inovatif.
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah **NILAI LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)**	Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90.

			Perihal dengan salah satu syarat untuk mendapatkan Predikat A yang memerlukan pembandingan dengan level nasional / internasional yang masih belum dapat dipenuhi maka ditetapkan lah target skor 79,00 yang masuk ke dalam predikat BB.
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah **NILAI INDEKS PROFESIONALISME ASN (IP-ASN) DARI APLIKASI PaDaRingan**	Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Data IP-ASN Perangkat Daerah diambil dari aplikasi PaDaRingan yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Tapin 91-200 = Sangat Tinggi, 81-90= Tinggi, 71-80= Sedang, 61-70 = Rentang, < 60 = Sangat Rendang

TABEL 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Nomor : 970/073/BAPPELITBANG/2023
Tanggal : 18 September 2023

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORM PERHITUNGAN	Penanggung Jawab	Sumber Data	PENJELASAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (AKIP)	Kepala Bappelitbang	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	AA = 90-100 A = 80-90 BB = 70-80 B = 60-70 CC = 50 – 60 C = 30-50 D = 0 - 30
2.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN	Kepala Bappelitbang	Data IP-ASN BKPSDM KAB.TAPIN	91 – 100 = Sangat Tinggi 81 – 90 = Tinggi 71 – 80 = Sedang 61 – 70 = Rentang = 60 = Sangat Rendah
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas perencanaan (IKP)	Total score rata-rata dari (nilai proses perencanaan + nilai kian perencanaan + nilai jaminan tindak lanjut) / total score ideal x 10	Kepala Bappelitbang	Data Survey IKP	1.0 – 2.0 = Sangat Kurang 2.1 - 4.0 = Kurang 4.1 – 6.0 = Cukup 6.1 – 8.0 = Baik 9.1 – 10 = Sangat
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Government Award (IGA)	i=2(2Sx1+2Sx2+2,5Sx3+3,5Sx4) , Sx1= Dimensi Input, Sx2= Dimensi Proses, Sx3= Dimensi Output, Sx4= Dimensi Outcome	Kepala Bappelitbang		60,01 – 100,00 = Sangat Tinggi 38,00 – 60,00 = Inovatif 0,01 – 34,99 = Kurang Inovatif 0 = Tidak Dapat Dinilai

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 18 September 2023
KEPALA BAPPELITBANG

Dr. H. MEIDY HARRIS PRAYOGA, SE., ME
NIP. 19840522 200803 1 001

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Manifestasi komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis 2018-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perubahan Anggaran Tahun 2023 sebagai berikut:

TABEL 2.3 IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA BAPPELITBANG TAHUN 2023

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Esselon 2	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas perencanaan (IKP)	7,2
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Government Award (IGA)	65
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79
		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	70
2	Esselon 3 (Sekretariat)	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP: - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal	 24,60 25,00 11,55 17,85
		Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
		Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%
		Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	*Score* 4.0

3	Esselon 3 (Litbang)	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Policy Brief Penelitian yang dimanfaatkan	100%
		Meningkatnya Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan	Persentase Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan	100%
		Meningkatnya inovasi daerah yang berkelanjutan	Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan	70%
4	Eselon 3 (Bid Sos SDM)	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial dan SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
			Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)	100%
		Meningkatnya proses perencanaan pembangunan	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM yang Tepat waktu	100%
		Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM	80%
5	Eselon 3 (Bid Randal)	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
			Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator dan Target Kinerja)	100%

			Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang telah disepakati dalam berita acara forum satu data	80%
		Meningkatnya proses perencanaan pembangunan	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat waktu	100%
		Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	80%
6	Eselon 3 (Bid Eko dan Infrastruktur)	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
			Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)	100%
		Meningkatnya proses perencanaan pembangunan	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Tepat waktu	100%
		Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	80%
7	Esselon 4 Sekretariat (Subbag Perenlap)	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%
		Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100%

			Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklajuti	100%
8	Esselon 4 Sekretariat (Subbag Keuangan)	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungajawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%
			Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
9	Esselon 4 Sekretariat (Subbag Umpeg)	Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100%
		Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	31,45%
		Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik	100%
10	Jabatan Fungsional Litbang Peneliti	Meningkatnya Rekomendasi Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti	100%
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan yang sesuai isu strategis	Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu strategis	60%
		Meningkatnya Rekomendasi Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti	50%
		Terlaksananya Desiminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Desiminasi	100%
11	Jabatan Fungsional	Meningkatnya peran aktif Inovator dalam mendukung Inovasi Daerah	Persentase Inovator yang berperan aktif dalam mendukung Inovasi Daerah	24,54%

	Litbang Pemanfaatan IPTEK	Terlaksananya Bimbingan Teknis Inovasi Daerah	Persentase peserta Bimbingan Teknis yang menghasilkan inovasi	80%
		Melaksanakan fasilitasi inovasi daerah yang di replikasi	Persentase fasilitasi inovasi daerah yang di replikasi	100%
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi inovasi Daerah	Persentase monitoring dan evaluasi inovasi daerah yang ditindaklanjuti	73,62%
		Melaksanakan Pembinaan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi Daerah yang dibina	100%
11	Jabatan Fungsional Perencana Sub Bidang Sosial	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan	100%
		Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai jadwal dan ketentuan	100%
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%
		Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sosial Sesuai dengan ketentuan	100%
			Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%
			Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%

		Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan	100%
			Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sosial ditindaklanjuti	100%
12	Jabatan Fungsional Perencana Sub Bidang SDM	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan	100%
		Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai jadwal dan ketentuan	100%
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%
		Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia Sesuai dengan ketentuan	100%
			Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%

			Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%
		Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan	100%
			Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Manusia ditindaklanjuti	100%
13	Jabatan Fungsional Perencana Sub Bidang Ekonomi	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	100%
		Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai jadwal dan ketentuan	100%
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%
		Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi Sesuai dengan ketentuan	100%
			Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub	100%

			Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	
			Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%
		Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan	100%
			Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Ekonomi ditindaklanjuti	100%
14	Jabatan Fungsional Perencana Sub Bidang Infrastruktur	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan	100%
		Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai jadwal dan ketentuan	100%
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%
		Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur Sesuai dengan ketentuan	100%

			Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%
			Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%
		Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan	100%
			Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Infrastruktur ditindaklanjuti	100%
15	Jabatan Fungsional Perencana Sub Bidang Pengendalian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah sesuai dengan ketentuan	100%
			Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah yang ditindaklanjuti	100%
16	Jabatan Fungsional Perencana Sub Bidang Perencanaan	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan	100%
		Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai jadwal dan ketentuan	100%
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	100%

		Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan Daerah Sesuai dengan ketentuan	100%
			Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan Daerah yang ditindaklanjuti	100%
			Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	100%
		Terlaksananya rencana aksi Satu Data Indonesia yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Persentase Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang terlaksana tepat waktu	80%
17	Pengadministrasi Umum (Subbag Umpeg)	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
		Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
		Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
		Tersedianya Paket Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
		Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
		Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
18	Pengadministrasi	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan

	Kepegawaian (Subbag Umpeg)	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
19	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Subbag Umpeg)	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
		Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit
		Terpeliharanya dan terbayarkannya pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Unit
		Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	1 Unit
		Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
20	Bendahara Pengeluaran (Subbag Keuangan)	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang
21	Pengadministrasi Keuangan (Subbag Keuangan)	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
22	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Subbag Renlap)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 laporan
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program (Subbid Sosial)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
		Terlaksananya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah
		Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan
24	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen

	(Subbid SDM)	Terlaksananya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Perangkat Daerah
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Perangkat Daerah
25	Pengadministrasi Perencanaan dan Program (Subbid Infrastruktur)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
		Terlaksananya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	17 Perangkat Daerah
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	17 Perangkat Daerah
26	Pengadministrasi Perencanaan dan Program (Subbid Ekonomi)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
		Terlaksananya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	10 Perangkat Daerah
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	10 Perangkat Daerah

27	Pengelola Bahan Perencanaan (Subbid Perencanaan)	Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen
		Tersedianya Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara
		Tersedianya Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara
		Tersedianya Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen
		Tersedianya Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan
28	Pengadministrasi Perencanaan dan Program (Subbid Pengendalian)	Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 laporan
		Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 laporan
29	Pengadministrasi Program dan Tata Operasional	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 laporan

	Penelitian (Subbid Pengembangan)	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen
		Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan
30	Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Penelitian (Subbid Penelitian)	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen
		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbang Kabupaten Tapin tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Perencanaan yang sudah tetapkan kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pada berakhirnya masa tahun anggaran, perencanaan dan perjanjian kinerja ini harus diukur dan dilaporkan kepada publik.

Pengukuran kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara realisasi tahun berjalan versus realisasi n-1, realisasi tahun berjalan versus target pada RPJMD, persentase capaian versus standar yang berlaku, termasuk dengan standar nasional yang terkait. Hasil pengukuran kinerja disajikan menurut kelompok Kinerja Utama yang bersifat makro dan capaian sasaran organisasi secara keseluruhan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:

1. Indikator bermakna positif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\textbf{Persentase Pencapaian} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Target}} \textbf{ x } 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\textbf{Persentase Pencapaian} = \frac{\textbf{Target} - (\textbf{Realisasi} - \textbf{Target})}{\textbf{Target}} \textbf{ x } 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis capaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan tahun 2023 dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin berhasil atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tidak berhasil, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3	55% s.d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analis pencapaian kinerja yang dapat memberikan memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Laporan ini menunjukkan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023.

1. Indikator Kinerja

   Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*)

2. Indikator Sasaran

   Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang perlu ditetapkan oleh instansi pemerintah. Bappelitbang Kabupaten Tapin dalam upaya meningkatkan akuntabilitas melakukan reviu terhadap Indikator Klinerja Utama, reviu capaian kinerja, serta permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Penjabaran analisis capaian kinerja dai Bappelitbang tahun 2023 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

3.1.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dalam rangka untuk mengukur keberhasilan dari suatu sasaran strategis. Dalam meningkatkan kinerja serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Bappelitbang Kabupaten Tapin menetapkan Keputusan Kepala Bappelitbang Nomor 970/073/Bappelitbang/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2023 yang terdiri atas Sasaran Strategis sebanyak 4 (empat) kinerja utama dan 4 (empat) indikator kinerja. Hasil perhitungan dan analisis didapatkan rata-rata pencapaian indikator kinerja tersebut secara keseluruhan mencapai 86,68 persen atau masuk dalam kategori berhasil, dengan rincian 1 (satu) indikator kinerja utama yang ditetapkan masuk kedalam kriteria Baik (B) karena memiliki nilai kinerja 100 persen, dan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang masuk kategori Cukup (C). Adapun hasil capaian atas Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Tapin pada tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut.

TABEL 3.1CAPAIAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Relisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	7,2	7,2	100%
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Government Award (IGA)	65	52,94	81,45%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79	76,60	96,96%
4.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	70	47,80	68,29%
			RATA-RATA	**86,68%**	

Berdasarkan hasil rerata capaian pada tabel diatas, maka kerja keras dari seluruh elemen yang ada di Bappelitbang Kabupaten Tapin untuk mempertahankan prestasi kerja dan kinerja dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dalam dokumen perencanaan, diantaranya yaitu Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, indikator kinerja SMART, target kinerja ditetapkan dengan baik dan terukur dan hasil kelitbangan lebih berorientasi kepada kualitas inovasi. Selanjutnya pencapaian indikator kinerja utama dalam setiap sasaran strategis Bappelitbang Kabupaten Tapin akan dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas perencanaan

Pencapaian sasaran strategis 1 diukur melalui indikator kinerja utama 1 dengan target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut:

TABEL 3.2 CAPAIAN ATAS SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	7,2	7,2	100%

Kualitas perencanaan menjadi aspek penting dalam proses pembangunan. Kualitas perencanaan perlu dihadirkan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas dimulai dari tradisi Bappenas sejak tahun 2011 dalam memberikan

apresiasi terhadap daerah yang memiliki perencanaan yang berkualitas dengan Anugerah Pangripta Nusantara/APN (sekarang namanya Penghargaan Pembangunan Daerah/PPD), banyak daerah kemudian merasa tertantang menggunakan indicator Pangripta Nusantara ini untuk mengukur kualitas perencanaan. Dokumen yang dinilai dalam Anugerah Pangripta Nusantara ini adalah dokumen Rencana Kerja Perangkat Dearah (RKPD). Adapun aspek-aspek yang diukur di dalam Anugerah Pangripta Nusantara ini adalah keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, keterukuran, inovasi kebijakan, proses perencanaan dari bawah (*bottom up*), proses perencanaan dari atas (*top down*), proses perencanaanteknokratik, proses perencanaan politik dan inovasi proses dan program daerah.

Namun demikian, tidak semua daerah 'memiliki keberanian' menggunakan indikator ini untuk mengukur kualitas perencanaannya. Hal ini terkait dengan banyak hal yang harus tersedia/disiapkan agar aspek-aspek penilaian di atas menghasilkan nilai yang baik. Hal-hal yang harus tersedia tersebut antara lain adalah political will dari pimpinan daerah, kesiapan SDM dan ketersediaan infrastruktur perencanaan. Hasilnya banyak daerah lebih memilih menggunakan indikator konsistensi antar dokumen perencanaan untuk mengukur kualitas perencanaan daerah. Kajian IKP memuat data yang diperoleh secara persepsional melalui kuesioner untuk dimensi proses penyusunan perencanaan (Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten). Data dalam dimensi isi diperoleh secara dokumentatif dan persepsional, sedangkan dimensi jaminan tindak lanjut hasil perencanan data diperoleh melalui dokumentatif terutama RPJMD tahun 2018 - 2023, RKPD tahun 2023, serta laporan Monev Bappelitbang.

Penjelasan Proses indeks adalah penghimpunan data persepsional dan dokumentatif berpedoman pada masing-masing kuesioner sebagaimana terlampir dalam kajian ini. Transformasi penilaian kuesioner kedalam skala 1-10, perhitungan nilai masing-masing dimensi atas nilai transformasi skala dan jumlah skala masing masing dimensi merupakan Indek IKP.

TABEL 3.3 SKALA INDEX

No	Skala	Kategori
1	1.0 ~ 2.0	Sangat kurang
2	2.1 ~ 4.0	Kurang
3	4.1 ~ 6.0	Cukup
4	6.1 ~ 8.0	Baik
5	8.1 ~ 10	Sangat baik

Konsep penyusunan indeks kualitas perencanaan melihat 3 dimensi perencanaan yaitu dimensi proses musrenbang, isi dokumen (RKPD dan RENJA OPD), jaminan tindak lanjut hasil perencanaan pada dokumen anggaran tahunan. Indeks diukur dalam skala 1 s/d 10 (kuantitatif) dan 5 jenjang kategori (kualitatif). Pengukuran yang dilakukan IKP bernilai 7,2 masuk dalam kategori Baik. Nilai ini sama dengan target nilai yang sebelumnya ditetapkan yaitu 7.2 (Baik). Adapun hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang selanjutnya akan dianalisa dan dilakukan perbaikan untuk dapat menghasilkan perencanaan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijabarkan program penunjang pencapaian Sasaran satu (1) indikator Kinerja satu (1), sebagai berikut:

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp2.133.403.435,00 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.743.067.100,00 atau 81,70% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Peyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp	1.519.617.100,00
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	223.450.000,00
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	448.964.000,00

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp916.828.956,00 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp748.064.000,00 atau 81,59% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	**Kordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Rp	**378.722.000,00**
2	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Rp	**198.700.000,00**
3	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Rp	**170.642.000,00**

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS 2: MENINGKATNYA HASIL KELITBANGAN

TABEL 3.5 CAPAIAN ATAS SASARAN STRATEGIS 2 BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Government Award (IGA)	65	52,94	81,45%

Sasaran strategis 2 dengan indikator kinerja 2 ini didukung oleh Program penelitian dan Pengembangan, maka dapat dijabarkan pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran 2 (dua) indikator Kinerja 2 (dua) yaitu Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan total pagu sebesar **Rp1.127.261.560,00** dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2023 adalah sebesar **Rp900.319.508,00** atau 79,87% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan		Realisasi
1	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Rp	220.993.000,00

2	**Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Rp	126.272.000,00
3	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Rp	553.054.508,00

Kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian atau yang disebut dengan kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian dan pengembangan berperan penting dalam mendorong kebijakan pembagunan daerah, hasil kelitbangan yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai isu permasalahan yang ada, umumnya sebelum merumuskan, membuat, dan menetapkan suatu kebijakan pemerintah (*policy*) terlebih dulu melakukan kegiatan penelitian.

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah diukur melalui indikator kinerja utama 2 (dua) Indeks Government Award (IGA). Indeks Government Awards (IGA) merupakan penganugerahan yang berupa penilaian dan apresiasi dari oemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan cara-cara inovatif. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama 2 (dua) diperoleh dari nilai inovasi daerah yang didaftarkan ke dalam penilaian Indeks Government Awards yang diselenggarakan oleh Kemendagri tahun 2023, setelah dilakukan pengukuran secara mandiri dari aplikasi Indeks Government Awards (IGA) hasil indeks inovasi daerah kabupaten Tapin senilai 66.71 point, namun ketika dilakukan validasi oleh tim validasi pusat, nilai indeks inovasi daerah Tapin menurun menjadi 52,94 point.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbang
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN

TABEL 3.2 CAPAIAN ATAS SASARAN STRATEGIS 3 DAN 4, INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 DAN 4 BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79	76,60	96,96
2.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	70	47,80	68,29%

Sasaran strategis 3 dan Sasaran Strategis 4 dengan indikator kinerja 3 dan 4 ini didukung oleh Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dapat dijabarkan pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran 3 dan 4, indikator Kinerja 3 dan 4 yaitu Program ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan dengan total pagu sebesar **Rp10.976.959.080,00** dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2023 adalah sebesar **Rp9.313.779.859,00** atau **84,85%** dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan		Realisasi
1	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	39.349.800
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	4.143.089.991
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	3.768.941.373
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	694.153.307
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	694.153.307
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	294.174.738

Akuntabilitas merupakan kewajiban perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran daerah yang telah ditetapkan. Pengukuran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dalam rangka

mewujudkan pemerintah yang akuntabel pada kinerja perangkat daerah, apakah meningkat atau tidak setiap tahunnya. Dengan memantau hasilnya ini bisa melakukan evaluasi apakah Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah benar-benar akuntabel, selain itu bisa pula sebagai alat unutk melakukan evaluasi kinerja dari perangkat daerah berhasil atau tidaknya.

Berdasarkan hasil dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin terhadap akuntabilitas Bappelitbang, maka diperoleh nilai sebesar 76,60 dengan predikat BB. Penilaian hasil evaluasi menunjukkan peningkatan, meskipun hanya kecil nilainya. Meskipun tidak dapat memenuhi target kinerjanya, namun paling tidak Bappelitbang masih konsisten terhadap pencapaian nilai SAKIP dengan baik. Pencapaian nilai LHE SAKIP ini pada hakikatnya didukung oleh semua program yang telah dilaksanakan oleh Bappelitbang, namu secara cascading kinerja, sasaran strategis ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil dengan rincian sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2022
Perencanaan Kinerja	30	24,60
Pengukuran Kinerja	30	23,70
Pelaporan Kinerja	15	11,55
Evaluasi Internal	25	76,60
Nilai Hasil evaluasi	**100**	**76,60**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**

Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Terdapat 4 dimensi dalam pengukuran IP ASN, yakni; 1) Dimensi Kualifikasi, 2) Dimensi Kompetensi, 3) Dimensi Kinerja, 4) Dimensi Disiplin.

Nilai	Tingkat Profesionalitas
91 – 100	Sangat Tinggi

81 – 90	Tinggi
71 – 80	Sedang
61 – 70	Rendah
≤ 60	Sangat Rendah

Data yang diperloleh dari BKPSDM, bahwa IP ASN Bappelitbang adalah 47,80 dalam kategori sangat rendah, yang mana berada di bawah target yang ditetapkan yaitu 70. Sebenarnya ASN Bappelitbang sudah cukup kuat dari segi kompetensi. Kompetensi yang diperoleh dari beberapa pelatihan pengembangan diri belum semua terinput dalam sistem informasi kepegawaian.

Dari hasil capaian pengukuran kinerja secara mandiri (self assessment) terhadap 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2023, maka dapat dianalisis rata-rata pencapaian kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin pada Tahun 2023 dikategorikan kedalam kategori pencapaian 75%-100% atau "Baik".

3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, TAHUN 2021 DAN TAHUN 2020

Analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja Bappelitbang Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis perbandingan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target). Pada tahun 2023 dilakukan revisi terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang disesuaikan dengan kondisi aktual yang relevan terhadap perkembangan organisasi. Analisis capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dengan Tahun 2020, Tahun 2021 dan 2022 ditunjukkan pada tabel berikut:

TABEL 3.6 ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja							
		2020		2021		2022		2023	
		T	R	T	R	T	R	T	R
IKU PADA RENSTRA TAHUN 2018-2024									
Meningkatnya kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar								

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja							
		2020		2021		2022		2023	
		T	R	T	R	T	R	T	R
	Persentase program prioritas yang terakomodir dalam RPJMD								
	Persentase pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah								
Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan								
PERUBAHAN (1) IKU PADA RENSTRA TAHUN 2018-2023									
Terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	Persentase Terpenuhinya Aspek Kualitas Dalam Dokumen Perencanaan	90%	90%						
Terpenuhinya Persentase Capaian Kinerja SKPD	Persentase Capaian Kinerja SKPD	90%	90%						
Terpenuhinya persentase *Policy Brief* idang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan	Persentase *Policy Brief* bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan	80%	80%						
PERUBAHAN (2) IKU PADA RENSTRA TAHUN 2018-2023									
Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan			Score 6,2	Score 7,2	Score 8.2	Score 6.56		
	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah			80%	93,64 %	90%	124. 27%		
	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD			80%	116.6 8%	90%	93.5 9%		
Meningkatnya Hasil Kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan			80%	100%	90%	100%		
	Persentase hasil kelitbangan yang disitasi			80%	100%	90%	100%		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja							
		2020		2021		2022		2023	
		T	R	T	R	T	R	T	R
PERUBAHAN (3) IKU PADA RENSTRA TAHUN 2018-2023									
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan							7,2	7,2
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Government Award (IGA)							65	52,94
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah							79	76,60
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah							70	47,80

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA)

Analisis capaian kinerja Bappelitbang Tahun 2022 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator kinerja dengan metode analisis membandingkan antara analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Tahun 2022 dengan Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL. 3.7 ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023 DENGAN JANGKA MENENGAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		TARGET JANGKA MENENGAH	2023	
			TARGET	REALISASI
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	7,2	7,2	100%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Government Award (IGA)	65	52,94	81,45%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79	76,60	96,96%

Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	70	47,80	68,29%
RATA-RATA				**86,68**

3.1.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Hasil pengukuran capaian 4 (empat) indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja tahun 2023 menunjukan bahwa ada 1 indikator kinerja yang memenuhi target, 2 Indikator Kinerja yang masuk dalam ketegori Baik (capaian kinerja 75-100%), dan 1 (satu) indikator yang masuk dalam kategori Cukup (Capaian Kinerja 50-75%). Yang berarti dalam beberapa aspek indikator kinerja utama Bappelitbang telah berhasil dalam melaksanakan kegiatannya dengan baik. Namun juga tentu saja masih selalu ada ruang untuk perbaikan, sebagaimana salah satu indikator kinerja utama Bappelitbang yang masuk dalam kategori Cukup, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Bappelitbang Kabupaten Tapin. Untuk lebih menunjang keberhasilan kinerja Bappelitbang mengambil beberapa langkah, antara lain:

a. Program dan kegiatan dilaksanakan dengan optimal, efektif dan efisien.
b. Memberdayakan SDM yang sesuai dengan keahlian.
c. Meningkatkan kemampuan SDM
d. Melaksanakan bimbingan teknis, melakukan pembinaan dan pembimbingan ataupun pendampingan agar kemampuan dan wawasan pengetahuan yang dimiliki pengelola kegiatan (PPTK) terhadap anggaran berbasis kinerja.
e. Menumbuhkan kesadaran pada setiap birokrasi akan pentingk=nya penjaringan dan pengolahan data sebagai bahan informasi untuk menyusun rencana kerja agar maksimal pada setiap kegiatan.

Program-program yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembagunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2023 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam upaya mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian, konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan, sosial dan budaya, serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup infrastruktur wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan

1.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia lebih ditujukkan kepada konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup Pembangunan Manusia. Kegiatan ini didukung oleh 6 Sub-kegiatan yaitu: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

1.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Sub kegiatan ini difokuskan pada koordinasi antara bappelitbang dengan perangkat daerah lingkup bidang Pemerintahan dalam hal ini terdapat 9 perangkat daerah yang menjadi mitra bappelitbang Sub bidang Sosial. Adapun koordinasi yang biasanya dilaksanakan terkait dengan program dan kegiatan

yang mendukung baik langsung maupun tidak langsung kepada program pemerintah pusat, provinsi maupun pencapaian program prioritas kabupaten di lingkup Sub bidang Sosial. Beberapa koordinasi yang dilaksanakan ditahun ini diantaranya dalam hal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim daerah melalui Rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, koordinasi terkait Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, selanjutnya koordinasi terkait penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan koordinasi awal terkait Pemetaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaaan (RPKD) Kabupaten Tapin. Risiko yang umum dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tidak selarasnya program yang tercantum di renstra perangkat daerah dengan program yang ada pada Rencana Pembangunan Dareah (RPD/RPJMD). Alternatif Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi risiko adalah dengan melakukan koordinasi yang intens dengan perangkat daerah untuk dapat mengarahkan program dan kegiatan yang dijalankan baik jangka menengah dan tahunan selaras untuk mendukung pencapaian program-program baik daerah, provinsi maupun pusat. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp91.695.000,00 dan terealisasi sebesar Rp77.162.000,00 atau sebesar 84.15% dari total Anggaran.

1.1.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Sub kegiatan ini berfokus asistensi mitra bidang Sosial bappelitbang terhadap kualitas dan keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan memastikan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah telah sesuai dan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Risiko yang umum dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tidak selarasnya program kegiatan yang tercantum di renja perangkat daerah dengan program kegiatan yang ada pada RKPD, sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk memitigasi risiko tersebut adalah pelaksanaan asistensi yang tidak hanya bersifat

formal dalam bentuk rapat-rapat sosialisasi, koordinasi dan asistensi kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan, namun juga bersifat informal melalui media sosial yang tersedia, kunjungan langsung ke perangkat daerah yang bersangkutan serta problem solving secara tertutup dengan perangkat daerah. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp77.636.479,00 dan terealisasi sebesar Rp76.265.000,00 atau sebesar 96.23% dari total Anggaran.

1.1.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Sub kegiatan ini koordinasi serta asistensi kepada mitra bidang Sosial bappelitbang yang berfokus kepada penyusunan laporan monitoring dan evaluasi terhadap renja/dpa perangkat daerah lingkup sub bidang Sosial agar laporan hasil monitoring dan evaluasi renja perangkat daerah memiliki kualitas yang baik dan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah di tahun berikutnya. Risiko yang umum dihadapi dalam pelaksanaan sub-kegiatan ini adalah tidak selarasnya prioritas program kegiatan yang tercantum di renja perangkat berdasarkan capaian tahun sebelumnya, karena laporan hasil monev renja tidak dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan renja tahun berikutnya yang ditindaklanjuti dengan cara melakukan asistensi secara berkala kepada setiap perangkat daerah dalam penyusunan laporan monev renja perangkat daerah tahunan, serta *problem solving* baik secara terbuka maupun tetutup dengan perangkat daerah mengenai hambatan-hambatan dan kendala yang dihadapi perangkat daerah. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp58.347.500,00 dan terealisasi sebesar Rp43.745.000,00 atau sebesar 74.97% dari total Anggaran.

1.1.4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sub kegiatan ini difokuskan pada koordinasi antara bappelitbang dengan perangkat daerah lingkup bidang

perekonomian dalam hal ini terdapat 9 perangkat daerah yang menjadi mitra bappelitbang lingkup SDM. Adapun koordinasi yang biasanya dilaksanakan terkait dengan program dan kegiatan yang mendukung baik langsung maupun tidak langsung kepada program pemerintah pusat, provinsi maupun pencapaian program prioritas kabupaten di lingkup ekonomi. Beberapa koordinasi yang dilaksanakan ditahun 2023 diantaranya dalam hal ini terkait dengan Penanganan Stunting, koordinasi Kabupaten Layak Anak dan Koordinasi terkait Kabupaten Kota Sehat yg diketuai oleh bappelitbang dan Pengarustamaan Gender. Risiko yang umum dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tidak selarasnya program yang tercantum di renstra perangkat daerah dengan program yang ada pada Rencana Pembangunan Dareah (RPD/RPJMD). Dan alternatif solusi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi yang intens dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lain yang berhubungan untuk dapat mengarahkan program dan kegiatan yang dijalankan baik jangka menengah dan tahunan selaras untuk mendukung pencapaian program-program baik daerah, provinsi maupun pusat. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp108.533.400,00 dan terealisasi sebesar Rp70.800.000,00 atau sebesar 65.23% dari total Anggaran.

1.1.5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sub kegiatan ini berfokus asistensi mitra bidang SDM bappelitbang terhadap kualitas dan keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan memastikan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah telah sesuai dan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Risiko yang umum dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tidak selarasnya program kegiatan yang tercantum di renja perangkat daerah dengan program kegiatan yang ada pada RKPD. Alternatif Solusi yang dilaksanakan adalah pelaksanaan asistensi yang tidak hanya bersifat formal dalam bentuk rapat-rapat

sosialisasi, koordinasi dan asistensi kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan, namun juga bersifat informal melalui media sosial yang tersedia, kunjungan langsung ke perangkat daerah yang bersangkutan serta problem solving secara tetutup dengan perangkat daerah. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp77.394.950,00 dan terealisasi sebesar Rp63.150.000,00 atau sebesar 81.59% dari total Anggaran.

1.1.6. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sub kegiatan ini koordinasi serta asistensi kepada mitra bidang SDM bappelitbang yang berfokus kepada penyusunan laporan monitoring dan evaluasi terhadap renja/dpa perangkat daerah lingkup Pembangunan Manusia agar laporan hasil monitoring dan evaluasi renja perangkat daerah memiliki kualitas yang baik dan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah di tahun berikutnya. Identifikasi risiko dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tidak selarasnya prioritas program kegiatan yang tercantum di renja perangkat berdasarkan capaian tahun sebelumnya, karena laporan hasil monev renja tidak dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan renja tahun berikutnya. Alternatif Solusi yang dilaksanakan adalah melakukan asistensi secara berkala kepada setiap perangkat daerah dalam penyusunan laporan monev renja perangkat daerah tahunan, serta problem solving baik secara terbuka maupun tetutup dengan perangkat daerah mengenai hambatan-hambatan dan kendala yang dihadapi perangkat daerah. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp58.347.500,00 dan terealisasi sebesar Rp43.745.000,00 atau sebesar 74.97% dari total Anggaran.

1.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, dan Monitoring dan

Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Koordinasi Perencanaan Bidang Perkonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) lebih ditujukkan kepada konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian, sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

1.2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Sub kegiatan ini difokuskan pada koordinasi antara bappelitbang dengan perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dalam hal ini terdapat 10 perangkat daerah yang menjadi mitra bappelitbang lingkup perekonomian. Adapun koordinasi yang biasanya dilaksanakan terkait dengan program dan kegiatan yang mendukung baik langsung maupun tidak langsung kepada program pemerintah pusat, provinsi maupun pencapaian program prioritas kabupaten di lingkup ekonomi. beberapa koordinasi yang dilaksanakan ditahun ini diantaranya dalam hal penyusunan dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi, koordinasi terkait peningkatan hasil pertanian di kabupaten melalui forum komisi irigasi, koordinasi penyusunan RKP dana bagi hasil sawit dan koordinasi terkait perencanaan dan penetapan target pertumbuhan ekonomi kabupaten.

- Identifikasi risiko:

  Tidak selarasnya program yang tercantum di renstra perangkat daerah dengan program yang ada pada Rencana Pembangunan Dareah (RPD/RPJMD)

- Faktor Penghambat

  masih adanya ego sektoral di perangat daerah yang membuat perencanaan program kegiatan perangkat daerah belum selaras dengan perencanaan program kegiatan daerah; dan adanya pergantian pejabat lama ke pejabat baru pada perangkat daerah yang menangani perencanaan dan pelaporan sehingga perlu adaptasi. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp124.457.400,00 dan terealisasi sebesar Rp117.870.000,00 atau sebesar 94.71% dari total Anggaran

1.2.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Sub kegiatan ini berfokus asistensi mitra bidang ekonomi bappelitbang terhadap kualitas dan keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan memastikan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah telah sesuai dan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Identifikasi risiko dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tidak selarasnya program kegiatan yang tercantum di renja perangkat daerah dengan program kegiatan yang ada pada RKPD. Sedangkan Faktor Penghambat yang umum dihadapi adalah adanya pergantian pejabat lama ke pejabat baru yang menangani perencanaan dan pelaporan sehingga perlu adaptasi, karena mitra bappelitbang memang lebih banyak berhubungan dengan pejabat yang menangani program dan pelaporan di perangkat daerah. Alternatif Solusi yang dilaksanakan pelaksanaan asistensi yang tidak hanya bersifat formal dalam bentuk rapat-rapat sosialisasi, koordinasi dan asistensi kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan, namun juga bersifat informal melalui media sosial yang tersedia, kunjungan langsung ke perangkat daerah yang bersangkutan serta problem solving secara tetutup dengan perangkat daerah. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp59.700.600,00 dan terealisasi sebesar Rp51.830.000,00 atau sebesar 85.82% dari total Anggaran

1.2.3. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Sub kegiatan ini berperan untuk melakukan koordinasi serta asistensi kepada mitra bidang ekonomi bappelitbang yang berfokus kepada penyusunan laporan monitoring dan evaluasi terhadap renja/dpa perangkat daerah lingkup perekonomian agar laporan hasil monitoring dan evaluasi renja perangkat daerah memiliki kualitas yang baik dan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah di

tahun berikutnya. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan sub-kegiatan ini adalah adanya pergantian pejabat lama ke pejabat baru yang menangani perencanaan dan pelaporan sehingga perlu adaptasi, karena mitra bappelitbang memang lebih banyak berhubungan dengan pejabat yang menangani program dan pelaporan di perangkat daerah. Alternatif Solusi yang dilaksanakan adalah dengan melakukan asistensi secara berkala kepada setiap perangkat daerah dalam penyusunan laporan monev renja perangkat daerah tahunan, serta problem solving baik secara terbuka maupun tetutup dengan perangkat daerah mengenai hambatan-hambatan dan kendala yang dihadapi perangkat daerah. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp44.889.000,00 dan terealisasi sebesar Rp29.000.000,00 atau sebesar 64.80% dari total Anggaran.

1.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan lebih ditujukkan kepada konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup sub bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan. Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, dan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

1.3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan Pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif efesien. Untuk itu diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan maupun perencanaan Pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup sub bidang perencanaan infrastruktur wilayah di Bapadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin yang mencakup kegiatan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Permukiman dan Pertanahan, Perhubungan, serta Komunikasi dan Informatika. Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah belum optimalnya kinerja program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung program kegiatan pemerintah ditingkat daerah, provinsi dan tingkat pusat. Alternatif solusi yang dilaksanakan adalah melakukan koordinasi yang intens dengan perangkat daerah untuk dapat mengarahkan program dan kegiatan yang dijalankan baik jangka menengah dan tahunan selaras untuk mendukung pencapaian program-program baik daerah, provinsi maupun pusat. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp91.268.900,00 dan terealisasi sebesar Rp69.544.000,00 atau sebesar 76.20% dari total Anggaran.

1.3.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Sub kegiatan ini berfokus asistensi mitra bidang Infrastruktur bappelitbang terhadap kualitas dan keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan memastikan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah telah sesuai dan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Risiko yang umum ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tidak selarasnya program kegiatan yang tercantum di renja perangkat daerah dengan program kegiatan yang ada pada RKPD. Yang mana atas risiko tersebut dilaksanakan alternatif solusi berupa pelaksanaan asistensi yang tidak hanya bersifat formal dalam bentuk rapat-rapat sosialisasi, koordinasi dan asistensi kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan, namun juga bersifat informal melalui media sosial yang tersedia, kunjungan langsung ke perangkat daerah yang bersangkutan secara tetutup dengan perangkat daerah. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp72.308.050,00 dan terealisasi sebesar Rp62.108.000,00 atau sebesar 85.89% dari total Anggaran.

1.3.3. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Sub kegiatan ini berfokus asistensi mitra bidang Infrastruktur Bappelitbang terhadap Realisasi dari Renja SKPD mitra Sub Bidang Infrastruktur, menganalisa, memonitoring dan mengevaluasi hasil Renja SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. Permasalahan yang umum dialami dalam pelaksanaan sub-kegiatan ini adalah belum optimalnya kinerja monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah dalam mendukung program kegiatan pemerintah daerah di dalam RKPD. Dan alternatif solusi yang diambil adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap renja perangkat daerah yang tidak hanya bersifat formal dalam bentuk rapat-rapat koordinasi dan asistensi kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen monev triwulanan, namun juga bersifat informal melalui media sosial yang tersedia, kunjungan langsung ke perangkat daerah yang bersangkutan secara tetutup dengan perangkat daerah. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp51.562.200,00 dan terealisasi sebesar Rp38.990.000,00 atau sebesar 75.62% dari total Anggaran.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini terdiri dari kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, meningkatkan proses perencanaan pembangunan dan meningkatkan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan.

2.1. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu dalam hal penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dari Pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Daerah Sesuai dengan ketentuan.

2.1.1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan dan dilakukan secara sistematis, kontinu terhadap suatu kegiatan untuk memastikan berjalannya sebuah aktivitas sesuai dengan rencana. Hasil monitoring adalah serangkaian data yang akan digunakan untuk bahan evaluasi sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi atau langkah-langkah untuk penyempurnaan selanjutnya. Evaluasi adalah proses yang mengukur dan memberi nilai secara obyektif dan valid, seberapa besar manfaat pelayanan yang telah dicapai berdasarkan tujuan dari obyek yang seharusnya diberikan dan yang nyata apakah hasil-hasil dalam pelaksanaan telah efektif dan efisien. Kebutuhan akan data secara sistematis akan sangat menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Tujuan monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi. Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuain proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sedangkan Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan

atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnyaTujuan monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi. Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuain proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sedangkan Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Risiko yang umum ditemui dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan Triwulanan baik triwulan I, Triwulan II, triwulan III maupun triwulan IV) yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terlambat untuk dilaporkan dan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan Triwulanan baik triwulan I, Triwulan II, triwulan III maupun triwulan IV) yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah belum sesuai standar. Sedangkan alternatif solusi yang diambil adalah Menghindari Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah terlambat untuk dilaporkan bisa dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Organisasi Perangkat Daerah dengan memberikan batas waktu pelaporan dan memperbaiki laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah beberapa belum sesuai standar dilakukan dengan verifikasi laporan tersebut

2.2. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

2.2.1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Penyusunan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah dimaksudkan uniuk memberikan output berupa Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024, yang merupakan implementasi dan pelaksanaan amanat peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mana Pemerintah Pusat dan Pemeriniah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP) untuk daerah.

Tujuan dari Pelaksanaan Sub-Kegiatan ini adalah:

1. Tersediannya data dan informasi kondisi daerah (Capaian Pembangunan dan Permasalahan Daerah) untuk penyusunan Dokumen RKPD
2. Teridentifikasinya isu-isu strategis pembangunan sebagai dasar perumusan prioritas.

Risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Data yang diminta kepada Organisasi Perangkat Daerah terkadang sangat lambat dalam menyerahkan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen tersebut. Risiko ini diminimalisir dengan cara penyertaan batas waktu dalam menyurati Organisasi Perangkat Daerah.

2.2.2. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum PD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau Lintas Perangkat Daerah sebagai upaya mengisi Rencana Kerja PD

yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. Pelaksanaan Forum PD atau Lintas Perangkat Daerah memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD. Namun demikian, dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan Forum PD atau Lintas Perangkat Daerah dapat tetap dilakukan. Jumlah Forum PD dan Lintas Perangkat Daerah serta jadual acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan Bappelitbang, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat. Disarankan agar langkah persiapan sudah dilakukan sejak bulan Januari sehingga pada bulan Februari sudah jelas diketahui jumlah dan nama forum PD atau Lintas Perangkat Daerah yang dibentuk. Bappelitbang memprioritaskan pembentukan Forum PD dan Lintas Perangkat Daerah pada:

1. Fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti: pendidikan dasar, kesehatan, prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat; dan
2. SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas program-program pembangunan Kabupaten tersebut. Sebagai contoh: Forum PD Pendidikan, Forum PD Kesehatan.

Risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Usulan-usulan prioritas yang masuk dari Kecamatan atas usulan dari musrenbang desa terkadang salah usul baik nama kegiatannya maupun Organisasi Perangkat Daerah tujuan. Dan alterrnatif solusi yang diambil adalah bahwa Pada saat musrenbang kecamatan, kecamatan lebih baik berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang dituju apakah nama kegiatan dan perangkat daerahnya sudah tepat

2.2.3. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders kecamatan untuk mendapatkan

masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun berikutnya. Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan. Dengan terlaksanannya sub kegiatan ini maka diharapkan dapat Terverifikasinya daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD atau Lintas Perangkat Daerah, yang siap dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten, yang akan didanai melalui APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya, daftar tersebut disampaikan kepada masyarakat di masing-masing desa/kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti Musrenbang Kecamatan.

a. Terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten.
b. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan.

Risiko yang dihadapi adalah bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.Pasal 98 ayat 3 Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari, sehingga Alternatif Solusi yang dilaksanakan adalah Berkoordinasi dengan Protokol dan Pimpinan Daerah

untuk menetapkan jadwal Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten di Kecamatan jauh hari sebelum Musrenbang Kabupaten dikecamatan dillaksanaan

2.2.4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah melalui forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Maksud penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten adalah merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka penyempurnaan dokumen rancangan RKPD Kabupaten.

Dasar pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten Tapin tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
2. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
3. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

Adapun tujuan Musrenbang Kabupaten adalah:

1. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan pemerintah provinsi;

2. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat pada musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan;
3. Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten.

2.2.5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah

Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan Belakang sistem yang secara herarki harus dapat mewujudkan keselarasan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 18 ayat (1) yang bermaksud bahwa penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025. memasuki pelaksanaan RPJMD tahap ke empat Tahun 2023 merupakan menuju akhir periode RPJPD. Sehingga perlu disusun Rancangan Awal Dokumen RPJPD Kabupaten Tapin tahun 2025-2045.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang–Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang–Undang tersebut juga diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu daerah, pemerintah daerah perlu menyusun dokumen perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Menurut amanat Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya Tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota melalui pemeilihan serentak nasional pada Tahun 2024. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka jabatan Kepala Daerah Kabupaten Tapin pada Tahun 2023–2024 diisi oleh penjabat Bupati sebagai pengganti Bupati yang masa jabatannya sudah berakhir di Tahun 2023. Untuk menindaklanjuti amanat Undang–Undang tersebut mengenai penyusunan dokumen perencanaan daerah, maka berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024–2026 berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Penyusunan Indeks Kualitas Perencanaan ini merupakan tuntutan akan kemajuan pembangunan daerah dalam upaya merencanakan pembangunan yang akurat, berkualitas, bersinergi dan memiliki harmonisasi dengan perencanaan pembangunan baik dari tingkat nasional, provinsi hingga daerah. Proses penyusunan perencanaan melalui sebuah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten menjadi titik awal strategis untuk melakukan pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Musrenbang juga menjadi forum konsultasi para pemangku kepentingan pembangunan daerah dan mengalokasikan kegaitan tersebut menurut prioritasnya kepada pihak yang berwenang atau bertanggungjawab pada kegiatan tersebut. Musrenbang yang berkualitas dapat menghasilkan keluaran yang optimal serta menjamin keterlibatan masyarakat yang lebih intensif, mendapatkan komitmen/kesempatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan. Oleh sebab itu pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan pada dimensi proses berorientasi pada aspek-aspek tersebut.

Identifikasi resiko:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 belum di terbitkan sehingga penyusunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Singkatnya waktu penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 yang hanya sekitar 3 (tiga) bulan menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunannya sampai ditetapkan.
3. Pengumpulan data dan informasi diperoleh secara persepsional melalui kuesioner untuk dimensi proses penyusunan perencanaan (Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten) harus dilakukan kepada responden yang tepat dan harus dijelaskan isian kuisioner tersebut agar jawaban sesuai dengan pertanyaan kuisioner.

Permasalahan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 belum diterbitkan dimungkinkan ada perbedaan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk sistematika Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045.
2. Waktu proses penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 dan penetapannya yang sangat singkat.
3. Responden Kuesioner kurang tepat untuk pengumpulan data kuesioner

Alternatif Solusi yang dilaksanakan:

1. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan.
2. Waktu proses penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 dan penetapannya yang sangat singkat sudah di identifikasi pada tahun 2022 sehingga persiapan Tim penyusun, Orientasi, Penyusunan Agenda Kerja, dan Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah dilakukan di tahun 2022 sehingga penyusunan dokumen tersebut pada tahun 2023 dilakukan bisa berakselerasi dan konsentrasi penuh sehingga bisa memenuhi target untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 tepat waktu dan sesuai dengan standar.
3. Mencari responden yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan kuesioner

2.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tujuan dari Pelaksanaan kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah.

2.3.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota merupakan salah satu cara dalam melakukan evaluasi kegiatan perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan di kabupaten Tapin selama kurun waktu tahun 2023. Pengendalian kegiatan ini dalam rangka untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan daerah dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung prioritas kepala daerah. Apakah dikatakan berhasil atau tidak, apakah perlu dilakukan pembinaan lanjutan dan lebih dalam.

Dasar pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota adalah:

i. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
ii. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
iii. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

Tujuan dari Pelaksanaan Sub-Kegiatan:

Tujuan pelaksanaan koordinasi pengendalian kegiatan ini yaitu untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan prioritas daerah. Menjaga konsistensi keberlangsungnya kegiatan-kegiatan pendukung kinerja Kepala Daerah. Selama tahun anggaran berjalan, perangkat daerah yang melaksanakan ataupun mendukung kinerja perangkat daerah seharusnya bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan adanya pengendalian kinerja ini, maka dapat dilakukan pengawasan ataupun menjaga keberlangsungan dan tercapainya kienerja kepala daerah dari dukungan kegiatan-kegiatan yang ada pada seluruh perangkat daerah pendukungnya.

2.3.2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan dan dilakukan secara sistematis, kontinu terhadap suatu kegiatan untuk memastikan berjalannya sebuah aktivitas sesuai dengan rencana. Hasil monitoring adalah serangkaian data yang akan digunakan untuk bahan evaluasi sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi atau langkah-langkah untuk penyempurnaan selanjutnya. Evaluasi adalah proses yang mengukur dan memberi nilai secara obyektif dan valid, seberapa besar manfaat pelayanan yang telah dicapai berdasarkan tujuan dari obyek yang seharusnya diberikan dan yang nyata apakah hasil-hasil dalam pelaksanaan telah efektif dan efisien. Kebutuhan akan data secara sistematis akan sangat menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program.

Dasar pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah adalah:

1.Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;

2.Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;

3.Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,

rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

Tujuan dari Pelaksanaan Sub-Kegiatan:

Tujuan monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi. Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuain proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sedangkan Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan,dan pengoperasian atau yang disebut dengan kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian dan pengembangan berperan penting dalam mendorong kebijakan pembagunan daerah, hasil kelitbangan yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai isu permasalahan yang ada, umumnya sebelum merumuskan, membuat, dan menetapkan suatu kebijakan pemerintah (policy) terlebih dulu melakukan kegiatan penelitian. Kegiatan Kelitbangan merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan program anggaran yang dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan, perjanjian kinerja memuat sasaran dan indikator kinerja utama beserta targetnya yang sudah terlebih dahulu ditetapkan dalam

dokumen perencanaan, target indikator utama tersebut harus diupayakan tercapai pada akhir tahun pelaksanaan anggaran, berdasarkan perjanjian kinerja perangkat daerah tersebut, terkait dengan bidang penelitian dan pengembangan, Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin melakukan perjanjian kinerja dengan Kepala Daerah, ada 1 (satu) sasaran strategis (kinerja utama) yakni Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah dengan indikator kinerja utama Indeks Government Awards (IGA) capaian kinerja 65 point. Hasil pengukuran IKU kepala Badan diperoleh dari nilai inovasi daerah yang didaftarkan ke dalam penilaian Indeks Government Awards yang diselenggarakan oleh Kemendagri tahun 2023, setelah dilakukan pengukuran secara mandiri dari aplikasi Indeks Government Awards (IGA) hasil indeks inovasi daerah kabupaten Tapin senilai 66.71 point, namun ketika dilakukan validasi oleh tim validasi pusat, nilai indeks inovasi daerah Tapin menurun menjadi 52,94 point, kendala yang dihadapi adalah ketika melakukan pembinaan hal ini menandakan bahwa masih kurangnya budaya inovasi di kabupaten Tapin, selanjutnya Bappelitbang sesuai dengan tugas dan fungsinya akan lebih intens melakukan pembinaan terkait inovasi daerah.

3.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Penelitian menurut Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa Penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan Pelaksanaan Penelitian. Salah satu indikator dari kualitas penelitian adalah penelitian dapat menghasilkan naskah akademik. Naskah akademik ini mencakup beberapa jenis naskah atau dokumen. Dimulai dari *policy brief*, rekomendasi kebijakan, sampai pada model kebijakan strategis, naskah akademik atau dokumen tersebut dapat dipilih salah satu sebagai bentuk keluaran dari kegiatan penelitian yang dilakukan.

3.1.1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

Sub-kegiatan ini bertujuan untuk mendukung Indikator Utama Daerah terkait peningkatan angka harapan lama sekolah dengan menyediakan data terkait. Penelitian yang dilaksanakan berjudul penelitian Strategi Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin hasil kerjasama dengan Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada menghasilkan 57 rekomendasi dan dapat dimanfaatkan oleh 9 SKPD yang terdiri dari: Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp259.513.476,00 dan terealisasi sebesar Rp220.993.000,00 atau sebesar 85.16% dari total Anggaran.

3.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Perekonomian

3.2.1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

Sub-kegiatan ini melaksanakan kegiatan Strategi Pengembangan Potensi Kopi di Kabupaten Tapin hasil co research dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat menghasilkan 17 rekomendasi dan dapat dimanfaatkan oleh SKPD yang terdiri dari: Dinas Pertanian, Kecamatan Hatungun, Kecamatan Piani, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Piani, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Hatungun. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp158.055.050,00 dan terealisasi sebesar Rp126.272.000,00 atau sebesar 79.89% dari total Anggaran.

3.3. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun, Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

3.3.1. Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Sub-kegiatan ini melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul penelitian Penyediaan Sarana Peningkatan Kualitas Air Tapin

(SIMONKAT) hasil kerjasama dengan Politeknik Negeri Semarang menghasilkan alat pemantauan kualitas air yang dimanfaatkan langsung oleh PDAM Tapin melalui Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor 16/KPTS/PDAM-TP/V/2023 tentang Tim Pengelola Sistem Monitoring Kualitas Air SIMONKAT PDAM Kabupaten Tapin.

Hasil penelitian ini dapat didownload secara gratis pada website www.e-starlitbang.tapinkab.go.id pada menu repository.

a) Sarana penelitian yang kurang memadai karena tidak memiliki GPS untuk membuat analisis spasial lanjutan.
b) Kurangnya *local resources* untuk tema-tema penelitian yang sifatnya teknis, hal ini dikarenakan pejabat fungsional peneliti dan analis pemanfaatan IPTEK memiliki keterbatasan dari bidang ilmu yang dikuasi.
c) Wilayah penelitian cukup luas sehingga teknik pengambilan sampling masih belum maksimal
d) Lamanya proses review untuk naskah publikasi penelitian.

Ruang lingkup peneliti dan analis pemanfaatan IPTEK yang sangat dibatasi, sulit untuk mengembangkan diri karena kurangnya peningkatan kompetensi yang besifat teknis dari institusi. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp207.881.460,00 dan terealisasi sebesar Rp171.805.000,00 atau sebesar 82.65% dari total Anggaran.

TABEL 3.8 ANALISIS KINERJA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

SKPD: BAPPELITBANG
TAHUN 2023

KEPALA					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas perencanaan (IKP)	7,2	7,2	100%
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Government Award (IGA)	65	52,94	81,44
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79	76,60	96,96
4.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	70	47,80	68,28
SEKRETARIS					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP: - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja	24,60 25,00 11,55 17,85	24,60 23,70 11,55 16,75	96,96%

		- Evaluasi Internal			
2.	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	*Score* 4.0	Score 3,56	89%
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Policy Brief Penelitian yang dimanfaatkan	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan	Persentase Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya inovasi daerah yang berkelanjutan	Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan	70%	61,35%	87,64%
BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN SDM					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial dan SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%

		Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya proses perencanaan pembangunan	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM yang Tepat waktu	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM	80%	285,71%	357,14%
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya proses perencanaan pembangunan	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat waktu	100%	100%	100%
3.		Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator dan Target Kinerja)	100%	100%	100%
4.		Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang telah disepakati dalam berita acara forum satu data	80%	80%	100%
5.	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	80%	94,66%	118,32%

BIDANG EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%
		Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)	100%	100%	100%
2	Meningkatnya proses perencanaan pembangunan	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Tepat waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	80%	131,38%	164.23%
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	31,45%	83,28%	264,80%
3	Meningkatnya tata kelola	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan	100%	100%	100%

	administrasi kepegawaian	pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik			
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklajuti	100%	100%	100%
SUB BAGIAN KEUANGAN					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungajawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	100%	100%
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Meningkatnya peran aktif Inovator dalam mendukung Inovasi Daerah	Persentase Inovator yang berperan aktif dalam mendukung Inovasi Daerah	24,54%	24,54%	100%

2.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Inovasi Daerah	Persentase peserta Bimbingan Teknis yang menghasilkan inovasi	95%	81,50%	85,78%
3.	Melaksanakan fasilitasi inovasi daerah yang di replikasi	Persentase fasilitasi inovasi daerah yang di replikasi	100%	100%	100%
4.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi inovasi Daerah	Persentase monitoring dan evaluasi inovasi daerah yang ditindaklanjuti	73,61%	73,61%	100%
5.	Melaksanakan Pembinaan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi Daerah yang dibina	100%	100%	100%
SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Meningkatnya Rekomendasi Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
2.	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan yang sesuai isu strategis	Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu strategis	60%	100%	166%
3.	Meningkatnya Rekomendasi Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti	50%	100%	200%
4.	Terlaksananya Desiminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Desiminasi	100%	100%	100%

SUB BIDANG SOSIAL					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
2.	Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai jadwal dan ketentuan	100%	100%	100%
3.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.	Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sosial Sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

5.	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sosial ditindaklanjuti	100%	100%	100%
SUB BIDANG SDM					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
2.	Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai jadwal dan ketentuan	100%	100%	100%
3.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.	Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia Sesuai dengan	100%	100%	100%

	Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	ketentuan			
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5.	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Manusia ditindaklanjuti	100%	100%	100%
SUB BIDANG EKONOMI					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%

2.	Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai jadwal dan ketentuan	100%	100%	100%
3.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.	Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi Sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5.	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang	100%	100%	100%

		Ekonomi ditindaklanjuti			
SUB BIDANG INFRASTRUKTUR					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	100%	100%
1.	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
2.	Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai jadwal dan ketentuan	100%	100%	100%
3.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.	Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur Sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur yang	100%	100%	100%

		ditindaklanjuti			
5.	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Infrastruktur ditindaklanjuti	100%	100%	100%
SUB BIDANG PENGENDALIAN					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
2.		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
SUB BIDANG PERENCANAAN					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%

2.	Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai jadwal dan ketentuan	100%	100%	100%
3.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.	Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan Daerah Sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5.	Terlaksananya rencana aksi Satu Data Indonesia yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Persentase Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang terlaksana tepat waktu	80%	80%	100%

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 3.8 tentang Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di atas, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin telah melaksanakan kegiatan dengan capaian cukup memuaskan yang mana terlihat dari Rata-rata capaian Kinerja Utama yang mencapai 86,88% dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.

Dari sisi penggunaan anggaran diketahui ada 1 Indikator dengan capaian kinerja memuaskan yaitu Indikator Kinerja ke-1 yaitu Indeks Kualitas Perencanaan yang mendapatkan capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran dari 2 (dua) Program yang cukup efisien yaitu 82,04% dan 81,59%. Artinya dengan penyerapan anggaran yang telah diefisienkan, indikator kinerja tersebut tetap dapat mendapatkan capaian kinerja 100%. Sedangkan ada 3 (tiga) Indikator Kinerja lain yang tidak dapat memenuhi target namun masih dalam kategori baik yaitu Indikator Kinerja Ke-2 Indeks Government Award yang mendapaikan capaian kinerja 81,45% dengan serapan anggaran 79,86%. Capaian ini sedikit diluar ekspektasi Bappelitbang karena hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama 2 (dua) diperoleh dari nilai inovasi daerah yang didaftarkan ke dalam penilaian Indeks Government Awards yang diselenggarakan oleh Kemendagri tahun 2023, setelah dilakukan pengukuran secara mandiri dari aplikasi Indeks Government Awards (IGA) hasil indeks inovasi daerah kabupaten Tapin senilai 66.71 point, namun ketika dilakukan validasi oleh tim validasi pusat, nilai indeks inovasi daerah Tapin menurun menjadi 52,94 point. Indikator Kinerja Ke-3 Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian 96,96% dari target yang ditetapkan sebesar 79 dengan realisasi 76,60. Indikator Kinerja ke-4 Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan Capaian kinerja 68,29% dengan serapan anggaran sebesar 77,35%.

Capaian ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal yang mana faktor anggaran bukanlah faktor utama dalam hasil capaian ini mengingat serapan anggaran Bappelitbang untuk tahun anggaran 2023 adalah Rp 13.154.194.467,00 atau sebesar 83,82% dari total anggaran. Detail perihal realisasi anggaran Bappelitbang Tahun Anggaran 2023 daapt dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.9 REALISASI ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	%
I.	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.313.779.859,00**	**10.976.958.880**	**84,84**
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**39.349.800,00**	**49.868.364,00**	**78,81**
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.959.800,00	33.130.100,00	90,43
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.390.000,00	16.738.284,00	56,10
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.143.089.991,00**	**4.293.767.912,00**	**96,49**
	3. Penyedia Gaji Tunjangan ASN	4.093.650.491,00	4.242.180.272,00	96,50
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Akhir Tahun SKPD	25.090.000,00	25.393.600,00	98,80
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24.349.500,00	26.194.040,00	92,96
3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.768.941.373,00**	**4.670.332.074,00**	**80,70**
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.167.456,00	92.077.570,00	13,21
	7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.251.239.510,00	1.525.717.005,00	82,01
	8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.809.500,00	205.705.087,00	57,27
	9. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	41.693.750,00	51.292.377,00	81,29
	10. Penyedian Bahan/Material	94.803.200,00	289.221.035,00	32,78
	11. Fasilitas Kunjungan Tamu	22.770.000,00	25.209.250,00	90,32
	12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.228.457.957,00	2.228.457.957,00	80.70
4.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**374.070.650,00**	**575.537.682,00**	**64,99**

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	%
	13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	374.070.650,00	575.537.682,00	64,99
5.	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**694.153.307,00**	**973.546.248,00**	**71,30**
	14. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	420.193.407,00	566.003.928,00	74,24
	15. Penyedia Jasa Peraatan dan Perlengkapan Kantor	173.143.300,00	283.260.000,00	61,13
	16. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.816.600,00	124.282.320,00	81,12
6.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**294.174.738,00**	**413.906.600,00**	**71,07**
	17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.699.318,00	186.900.980,00	86,18
	18. Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	22.036.320,00	70.735.620,00	31,15
	19. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	148.439.100,00	156.270.000,00	94,99
II.	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**2.192.031.100,00**	**2.671.756.225,00**	**82,04**
7.	**Peyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**1.519.617.100,00**	**1.890.890.935,00**	**80,37**
	20. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	49.490.000,00	58.309.375,00	84,87
	21. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	210.500.500,00	282.187.542,00	74,60
	22. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	0,00	67.536.000,00	0,00
	23. Penyiapan Bahan Koordinasi musrenbang Kecamatan	306.171.500,00	318.755.831,00	95,05
	24. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	953.455.100,00	1.164.102.387,00	81,90

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	%
	Daerah Kabupaten/kota			
8.	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**223.450.000,00**	**242.512.500,00**	**92,14**
	25. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	223.450.000,00	242.512.500,00	92,14
9.	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**448.964.000,00**	**538.352.790,00**	**83,40**
	26. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	375.454.000,00	404.310.265,00	92,86
	27. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	73.510.000,00	134.042.525,00	54,84
III.	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**748.064.000,00**	**916.828.955,00**	**81,59**
10.	**Kordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**378.722.000,00**	**472.642.808,00**	**80,13**
	28. Koordnasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77.162.000,00	91.695.000,00	84,15
	29. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	76.265.000,00	77.636.47,00	96,23
	30. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	47.600.000,00	59.033.479,00	80,63
	31. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	70.800.000,00	108.533.400,00	65,23

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	%
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	32. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	77.394.950,00	63.150.000,00	81,59
	33. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	43.745.000,00	56.347.500,00	74,97
11.	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**198.700.000,00**	**229.047.000,00**	**86,75**
	34. Koordnasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	117.870.000,00	124.457.400,00	94,71
	35. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	51.830.000,00	59.700.600,00	86,82
	36. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	29.000.000,00	44.889.000,00	64,60
12.	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**170.642.000,00**	**215.139.150,00**	**79,32**
	37. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69.544.000,00	91.266.900,00	76,20
	38. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	62.108.000,00	72.308.050,00	85,96
	39. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	38.990.000,00	51.562.200,00	75,62

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	%
IV.	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**900.319.508,00**	**1.127.255.560,00**	**79,86**
13.	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**220.993.000,00**	**259.513.476,00**	**85,16**
	40. Penelitian dan Pegembangan Pendidikan dan Kebudayaan	220.993.000,00	259.513.476,00	85,16
14.	**Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**126.272.000,00**	**158.055.050,00**	**79,89**
	41. Peneitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	126.272.000,00	158.055.050,00	79,89
15.	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**553.054.508,00**	**709.687.034,00**	**77,92**
	41. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	171.805.000,00	207.881.460,00	82,65
	42. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	360.024.508,00	440.543.024,00	81,72
	43. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	21.225.000,00	61.262.550,00	34,64
	JUMLAH	**13.154.194.467,00**	**15.692.805.823,00**	**83,82**

4.2. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2023 Bappelitbang Kabupaten Tapin melaksanakan 4 program dengan 43 kegiatan dengan alokasi anggaran Bappelitbang Tahun 2023 sebesar Rp15.692.805.823,00 dan terserap sebesar Rp13.154.194.467,00 (83,82%), Berdasarkan komposisi belanjanya, penyerapan anggaran untuk belanja operasional dan belanja modal. Adapun untuk belanja operasional yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp4.107.760.491,00 dan belanja barang & jasa sebesar Rp7.591.551.842,00. Sedangkan untuk penyerapan anggaran untuk belanja modal yang digunakan untuk membiayai kebutuhan penyediaan barang milik daerah atau aset yang dikelola oleh Bappelitbang yaitu sebesar Rp1.454.882.134,00. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya keterbatasan Kas Daerah beserta agenda lain yang mengharuskan efisiensi anggaran. Namun, realisasi anggaran yang kurang dari 100% ini tidak mempengaruhi realisasi kinerja Bapelitbang.

Seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005- 2025. Dari hasil pengukuran kinerja, kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin dapat dikategorikan Baik, walaupun realisasi keuangan tidak mencapai 100%. Hal ini dibuktikan bahwa realisasi 3 (Tiga) dari total 4 (Empat) indikator kinerja masuk dalam kategori Baik (capaian kinerja 75-100%). Realisasi anggaran tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun 2023 Bappelitbang Kabupaten Tapin melaksanakan 4 program dengan 44 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp15.692.805.823,00** Realisasi keuangan untuk belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp13.154.194.467,00** atau **83,82**%.

Seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005- 2025. Dari hasil pengukuran kinerja, kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin dapat dikategorikan Baik, walaupun realisasi keuangan tidak mencapai 100%. Hal ini dibuktikan bahwa realisasi dari 4 Indikator Kinerja Utama mencapai 86,68% . Realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2022

Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Langsung	15.692.805.823,00	13.154.194.134,00	2.538.611.356,00	83,82
Jumlah Pagu Keseluruhan	15.692.805.823,00	13.154.194.134,00	2.538.611.356,00	83,82

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Laporan ini disajikan setelah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2022 dari Inspektorat Kabupaten Tapin yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 2023 Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai untuk melakukan upaya dalam peningkatan kinerja organisasi.

Pada tahun 2023, Bappelitbang Kabupaten Tapin menetapkan 4 (Empat) Sasaran Strategis dan 4 (Empat) indikator kinerja utama sesuai dengan Dokumen Perubahan IKU Rencana Strategis 2018-2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbang Tahun 2023.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Tapin telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3	55% s.d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator Kinerja Utama dengan persentase **capaian kinerja 75-100 %** atau dengan kategori capaian **Baik (B)** sebanyak **3 IKU.**
2. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja >55-75% atau dengan kategori capaian **Cukup (C)** sebanyak **1 IKU**
3. **Rata-rata Capaian Indikator Kinerja** Utama tahun 2023 Bappelitbang Kabupaten Tapin adalah sebesar **86,68%**.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Bappelitbang Kabupaten Tapin akan terus mengupayakan melalui motivasi, kerja keras, sinergitas, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tapin.

KEPALA BAPPELITBANG

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN BAPPELITBANG

Dr. H. Meidy Harris Prayoga, SE., ME.
Pembina

LAMPIRAN 1. LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) ATAS SAKIP BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601

RANTAU

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

Nomor : 700/940/Evaluasi SAKIP BAPPELITBANG/WIII/VIII/INSP/2023
Tanggal 11 Agustus 2023

OBRIK

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31762 Fax (0517) 31762

RANTAU

11 Agustus 2023

Nomor : 700/940/Evaluasi SAKIP Bappelitbang/WIII/VIII/INSP/2023

Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

Yth. **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan**
di
Rantau

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan memperoleh nilai 76,60 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

1
Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Komponen yang Dinilai	Bobot 2021	Nilai 2021	Bobot 2022	Nilai 2022
a. Perencanaan Kinerja	30	24,60	30	24,60
b. Pengukuran Kinerja	25	23,10	30	23,70
c. Pelaporan Kinerja	15	10,50	15	11,55
d. Evaluasi Internal	10	18,25	25	16,75
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**76,50**	**100**	**76,60**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**		**BB**

Dari hasil Evaluasi Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
2. Dokumen Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi);
4. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja;
5. Belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengoptimalkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami rekomendasikan kepada Saudara agar memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti hal hal sebagai berikut:

1. Pengukuran capaian kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
2. Menyajikan analisa dan evaluasi capaian dibanding dgn target nasional/internasional (Benchmark Kinerja) dalam laporan kinerja;
3. Menggunakan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja;
4. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja;
5. Belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Kami menghaapkan agar Saudara dapat mengawal dan memastikan setap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin, dengan beberapa simpulan tersebut di atas untuk ditindaklanjuti guna perbaikan dan peningkatan kinerja Instansi.

Kami sangat mengharpai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Instansi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

INSPEKTORAT
Linda Absari, SH MH
Pembina Tkt I
NIP. 19[illegible]22 200501 1 013

LAMPIRAN 2. ANALISA PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA TAHUN 2023

ANALISA PENETAPAN TARGET KINERJA TAHUN 2023

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target	ANALISA
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan $Nilai\ Skala = \frac{\text{Total score rata – rata dari (nilai proses perencanaan + nilai isian perencanaan + nilai jaminan tindak lanjut)}}{\text{total score ideal}} \times 10$	Score 7,2	Perumusan target sebesar 7,2 merupakan hasil perhitungan 3 dimensi perencanaan yaitu dimensi proses musrenbang, isi dokumen (RKPD dan renja-OPD), jaminan tindak lanjut hasil perencanaan pada dokumen anggaran tahunan. Indeks diukur dalam skala 1 s/d 10 (kuantitatif) dan 5 jenjang kategori (kualitatif). Berdasarkan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar score 6,56 dari target score 7,1 maka penetapan target di tahun 2023 sebesar score 7,2.
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Government Award **SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA**	Score 65	Indeks Government Award (IGA) atau indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan data Inovasi yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri kemudian merilis Indeks Government Award (IGA) setiap daerah
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah **NILAI LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)**	79	Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90.

4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah **NILAI INDEKS PROFESIONALISME ASN (IP-ASN) DARI APLIKASI PuDaRingan**	70	Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Data IP-ASN Perangkat Daerah diambil dari aplikasi PuDaRingan yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Tapin 91-200 = Sangat Tinggi, 81-90= Tinggi, 71-80= Sedang, 61-70 = Rantang, < 60 = Sangat Rendang

Rantau, 18 September 2023
Kepala Bappelitbang,

Dr. H. MINDY HARRIS PRAYOGA, SE.ME
NIPPK 19840522 200803 1 001

LAMPIRAN 3. SURAT KEPUTUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241
RANTAU Kode Pos 71114

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 970/073/BAPPELITBANG/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026 dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 18 September 2023
KEPALA BAPPELITBANG

Dr. H. MEDY HARRIS PRATOGA, SE., ME
NIP. 19840322 200803 1 001

Tembusan:
Inspektur Kab. Tapin

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Nomor : 970/073/BAPPELITBANG/2023
Tanggal : 18 September 2023

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORM PERHITUNGAN	Penanggung Jawab	Sumber Data	PENJELASAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (AKIP)	Kepala Bappelitbang	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	AA = 90- 100 A = 80-90 BB = 70-90 B = 60-70 CC = 50 – 60 C = 30-50 D = 0 - 30
2.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN	Kepala Bappelitbang	Data IP-ASN BKPSDM KAB.TAPIN	91 – 100 = Sangat Tinggi 81 – 90 = Tinggi 71 – 80 = Sedang 61 – 70 = Rentang < 60 = Sangat Rendah
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas perencanaan (IKP)	Total score rata-rata dari (nilai proses perencanaan + nilai isian perencanaan + nilai jaminan tindak lanjut) / total score ideal x 10	Kepala Bappelitbang	Data Survey IKP	1.0 – 2.0 = Sangat Kurang 2.1 - 4.0 = Kurang 4.1 – 6.0 = Cukup 6.1 – 8.0 = Baik 9.1 – 10 = Sangat Baik

4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Government Award (IGA)	i=2(2Sxi+2Sx2+2,5Sx3+3,5Sx4) , Sxi= Dimensi Input, Sx2= Dimensi Proses, Sx3= Dimensi Output, Sx4= Dimensi Outcome	Kepala Bappelitbang		60,01 – 100,00 = Sangat Tinggi 35,00 – 60,00 = Inovatif 0,01 – 34,99 = Kurang Inovatif 0 = Tidak Dapat Dinilai

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 18 September 2023
KEPALA BAPPELITBANG

Dr. H. MEIDY HARRIS PRAYOGA, SE., ME
NIP. 19840522 200803 1 001

LAMPIRAN 4. SURAT KEPUTUSAN TIM SAKIP BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Dato Nunya Kawasan Perkantoran Rantau Baru Telp. (0517) 31555 Fax. (0517) 32241
RANTAU Kode Pos: 71514

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NOMOR: 920/ 05 /BAPPELITBANG/2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin;

b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin;

c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Memerintahkan kepada tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Penilaian Evaluasi SAKIP secara berkala dengan sebaik-baiknya, melakukan penilaian kinerja internal Bappelitbang dan melaporkan hasilnya kepada kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin;

KETIGA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan penyelesaian kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
2. Melakukan sinkronisasi Rencana Strategis Badan dengan Rencana Strategis Daerah;
3. Melakukan sinkronisasi penyusunan Indikator Kinerja Badan dengan Indikator Kinerja Daerah;
4. Melakukan sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat;
5. Melakukan sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat;
6. Menyusun data capaian kinerja per triwulan;
7. Menyusun laporan kinerja;
8. Merumuskan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
9. Melakukan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis teknologi informasi.
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Bappelitbang Kabupaten Tapin;
11. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
12. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun sebanyak-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
14. Melakukan penilaian kinerja internal Bappelitbang secara berkala untuk kemudian ditindaklanjuti;
15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 02 Januari 2024

Kepala Bappelitbang
Kabupaten Tapin,

Dr. H. Muhir Harris Prayoga, SE.ME.
Pembina
19840522 200803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Pj. Bupati Tapin;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin;
3. Inspektur Kabupaten Tapin;
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Bappelitbang
Kabupaten Tapin
Nomor : 970/ /BAPPELITBANG/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SAKIP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TAPIN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	PENGARAH REFORMASI BIROKRASI BAPPELITBANG	Kepala Bappelitbang
2.	PENANGGUNG JAWAB SAKIP	Sekretaris Bappelitbang
3.	SEKRETARIS	Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pelaporan
4.	TIM TEKNIS	1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian
		2. Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
		3. Kepala Bidang Sosial dan SDM
		4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
		5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		6. Kepala Sub Bagian Keuangan
		7. JF Analis Perencana
		8. JF Pemandatan IPTEK
		9. JF Peneliti
5.	ANGGOTA	Analis perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Bappelitbang
Kabupaten Tapin,

Dr. H. Muhammad Harris Prasoga, SE.MS.
Pembina
19840522 200803 1 001

LAMPIRAN 4. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) EVALUASI AKIP INTERNAL BAPPELITBANG

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** **BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN** **SUB BIDANG PERENCANAAN**	Nomor SOP	:	050/ 72 -Sekrt/Bappelitbang
	Tanggal Pembuatan	:	4 November 2022
	Revisi	:	
	Diajukan oleh	:	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
	Disahkan oleh	:	KEPALA BAPPELITBANG KAB. TAPIN Dr. H. Zainal Aqli, ST., MT
	Nama SOP	:	SOP Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Bappelitbang
DASAR HUKUM			**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan			1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait; 2. Memahami RPJMD Pemerintah Daerah; 3. Memahami Renstra OPD; 4. Memahami SOTK Badan; 5. Memahami IKU Badan; 6. Memahami Mekanisme Prosedur Monev.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teiknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10).	

PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Dokumen RPJMD; 2. Dokumen RENSTRA; 3. RKA/DPA; 4. LKE Internal; 5. Laptop/Desktop.
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Dokumen hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal dicatat dan disimpan sebagai bahan penyusunan dan pelaporan SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

NO	AKTIVITAS	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output
		Kepala	Sekretaris	Kasubbag Perenlap	Sekretaris	Tim Penyusun			
1	Kepala Badan memberi disposisi kepada Sekretaris untuk melaksanakan Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal						Lembar Disposisi	10	Disposisi Kepala Badan
2	Sekretaris memerintahkan Kasubbag Perenlap untuk menyusun SK Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal						Disposisi Kepala Badan	10	Perintah Dinas
3	Kasubbag Perenlap menyusun konsep SK Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk disampaikan kepada Sekretaris						Peraturan terkait Evaluasi dan Monev	120	Dokumen Draft SK
4	Sekretaris memeriksa konsep SK Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yangmana apabila disetujui akan disampaikan kepada Kepala Badan						Draft Dokumen SK	30	Dokumen Draft SK
5	Kepala Badan memeriksa SK Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yangmana apabila disetujui akan ditandatangi untuk menjadi pedoman kerja dan jika tidak disetujui akan dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki.						Draft Dokumen SK	30	Dokumen SK

6	Setelah disetujui, Tim Penyusun melakukan Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal untuk kemudian diserahkan kepada Sekretaris						Dokumen Renja, RENSTRA, PK	360	Draf Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Internal
7	Sekretaris memeriksa hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Jika disetujui maka akan menyampaikan kepada Kepala Badan, Jika tidak setuju maka akan menyerahkan kembali kepada Tim Penyusun untuk diperbaiki.						Draft dokumen Laporan	45	Draf Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Internal
8	Kepala Badan memeriksa hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Jika disetujui maka menandatangani untuk menyerahkan kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti bersama Tim Penyusun						Draft Dokumen Laporan	30	Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Internal
9	Tim Penyusun menyusun rencana tindak lanjut hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.						Dokumen Hasil Evaluasi SAKIP Internal	60	Dokumen Rencana Tindak Lanjut

Rantau, 4 November 2022
Kepala Bappelitbang,

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN BAPPELITBANG

Dr. H. Jamal Aqli, ST., MT
NIP. 19690214 199403 1 011

LAMPIRAN 5. REVIEW DRAFT DOKUMEN LKJIP DAN PENGISIAN LKE INTERNAL BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN OLEH TIM SAKIP BAPPELITBANG

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Nomor : [illegible]
Lampiran : -
Perihal : Rapat Intern

Pandau, 28 Februari 2024

Kepada Yth Bapelitbang:
1. Sekretaris Bappelitbang
2. Kabid Bappelitbang
3. Kasubbag Bappelitbang
4. Fungsional Fungsional Bappelitbang
5. Staf Bappelitbang

di -
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Nomor [illegible] tanggal 27 Februari 2024 Perihal Pemantauan Penyusunan Dokumen SAKIP SKPD dan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2023 dan kewajiban pelaporan perihal akuntabilitas kinerja pemerintah daerah / Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat berhadir dalam kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Februari 2024
Waktu : 14.00 WITA s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Bappelitbang
Agenda : **Tindak Lanjut Pemantauan Penyusunan Dokumen SAKIP SKPD dan Review Draft Dokumen LKjIP Bappelitbang Tahun 2023**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Dola Nunuy RT. 01 Kel. Rangda Mulingkung, Kecamatan Rantau Buru Kode Pos 71114 RANTAU Telp.(0517)21508

Notulen Rapat

Hari, Tanggal	**: Rabu, 28 Februari 2024**
Pukul	**: 14:00 WITA s/d selesai**
Tempat	**: Ruang Rapat Kepala Bappelitbang**
Agenda	**: Tindak Lanjut Permintaan Pemenuhan Dokumen SAKIP SKPD dan Review Draft Dokumen LKjIP Bappelitbang Tahun 2023**

Menindaklanjuti Surat dari Sekretariat Daerah Nomor : 000.8.6.3/164/Bagor tanggal 27 Februari 2024 Perihal Permintaan Pemenuhan Dokumen SAKIP SKPD. Dengan ini Kepala Bappelitbang mengundang Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional Bappelitbang untuk dapat membantu memenuhi permintaan data SAKIP SKPD yaitu Renstra, PK 2024, IKU, LKjIP, Pohon Kinerja, Cascading, Rencana Aksi, Laporan Monev Rencana Tahun 2023 dan 2024.

Selain itu, sehubungan dengan kewajiban pelaporan dokumen LKjIP Bappelitbang Tahun 2023 , dengan ini sebagai tindak lanjut pemenuhan kewajiban tersebut Bappelitbang melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyiapkan draft dokumen LKjIP sebagai acuan untuk pembahasan yang dilakukan dalam kegiatan rapat review dokuman kali ini.

Dalam Kegiatan rapat kali ini, Sekretaris didampingi oleh Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan yang diwakilkan oleh Staf menjabarkan draft dokumen yang sebelumnya sudah dibuat sesuai dengan data yang sebelumnya dimiliki dan telah diberikan oleh Bidang-Bidang Bappelitbang. Dalam hal ini, data yang dimaksud adalah narasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta dengan laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja. Hal utama yang dibahas dalam rapat ini adalah capaian kinerja Bappelitbang yang cukup baik walaupun dirasa kurang maksimal, dimana realisasi anggaran Bappelitbang hanya 83,82% namun untungnya realisasi anggaran yang tidak sampai 100% ini tidak berpengaruh besar terhadap capaian kinerja Bappelitbang. Selain itu, dari total 4 (empat) indikator kinerja utama Bappelitbang hanya ada 1 (satu) yang dapat mencapai target sedangkan 2 (dua) lainnya masuk dalam kategori BAIK dan 1 masuk dalam kategori Cukup.

Selain capaian kinerja utama Bappelitbang, kegiatan rapat ini juga melaksanakan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP Bappelitbang Tahun 2023 oleh Tim SAKIP Bappelitbang. Dimana dalam kegiatan ini dilakukan review kelengkapan dokumen sesuai dengan kriteria yang telah tersedia dalam Lembar Kerja Evaluasi dan diketahui ada beberapa hal yang menjadi perhatian Tim Sakip Bappelitbang yaitu dengan Perjanjian Kinerja Eselon II yang saat ini masih dalam proses penandatanganan dengan Pj. Bupati Tapin, serta Pagu / Anggaran Tahun 2025 yang masih dalam proses penyusunan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sehingga ada sedikit kendala dalam pemenuhan ke dua kriteria tersebut. Selain itu, Perihal Pemanfaatan Teknologi dalam pengukuran kinerja juga masih mengalami kendala karena memang untuk saat ini aplikasi E-sakip Kabupaten Tapin baru dapat memfasilitasi entry data perencanaan, pelaporan perencanaan dan database upload dokumen perencanaan serta laporan namun belum dapat memberikan fitur yang membantu dalam pengukuran kinerja. Terkait dengan itu, Pihak Bappelitbang bersama dengan Dinas Kominfo telah berkoordinasi perihal pengembangan aplikasi E-Sakip yang saat ini masih dalam proses.

Notulis,

M. Rizkie L.H

a

ANALISIS RELEVANSI DAN KECUKUPAN DATA KINERJA

NO.	BIDANG	DAFTAR KEBUTUHAN DATA KINERJA	RELEVANSI DAN KECUKUPAN DATA
1.	Sekretariat	- Laporan pengawasan anggaran definitif per kegiatan - Laporan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Tahunan	Data sudah tercukupi dan relevan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja
2.	Bidang Perencanaan dan Pengendalian	- Dokumen Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten Tapin	Data sudah tercukupi dan relevan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja
3.	Bidang Sosial dan SDM	- Rekap data perhitungan capaian Indikator Kinerja Utama SKPD dari mitra bidang Sosial - Rekap data perhitungan capaian Indikator Kinerja Utama SKPD dari mitra bidang SDM - Laporan Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Sosial dan SDM	Data sudah tercukupi dan relevan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja
4.	Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	- Rekap data perhitungan capaian Indikator Kinerja Utama SKPD dari mitra bidang Ekonomi - Rekap data perhitungan capaian Indikator Kinerja Utama SKPD dari mitra bidang Infrastruktur - Laporan Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Infrastruktur	Data sudah tercukupi dan relevan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja
5.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	- Laporan Skor Indeks Government Award	Data sudah tercukupi dan relevan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. MEIDY HARRIS PRAYOGA, SE.ME.
NIP. 19840522 200803 1 001

Kasubag Perencanaan dan Pelaporan

FAJAR SURI KUSUMA WARDHANI, SE
NIP. 19851030 201903 2 001

LKE REVIEW AKIP BAPPELITBANG TAHUN 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Jawaban	Penjelasan
1	**PERENCANAAN KINERJA**		
1.a	**Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia**		
Kriteria:			
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja		
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang	Ada	Protokol Teknis Perencanaan Kab. Tapin
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah	Ada	RPJPD
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek	Ada	RPJMD Kab. Tapin 2020-2023
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja	Ada	Renstra Kerja
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja	Ada	Perjanjian Kerja (PK) 2023 terlampir dalam LKjIP
		Ada	RKA
1.b	**Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)**		
Kriteria:			
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan		
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu	Tidak	Renwal Renja 2024 dan PK masih dalam proses
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Rebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai	Ada	Perjanjian kerja Eselon II masih dalam proses, hanya tersedia PK Eselon III, Eselon IV, Jafung dan Jaut
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai	Tidak	Renwal Renja masih dalam proses
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART	Ada	Tujuan dan sasaran SKPD telah terlampir dalam Bab II LKjIP
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, terfokus secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis)	Ada	Sudah memenuhi kriteria
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis	Ada	IKU Bappelitbang menjelaskan fungsi dan fungsi dalam Perencanaan, dan Litbang
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan	Ada	Target telah ditetapkan berdasarkan analisa kinerja tahun N-1 dan berdasarkan realisasi keberhasilan target
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)	Ada	Telah tercantum dalam cascading dan Perjanjian Kinerja
10	Setiap unitkerja kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan	Ada	Cross Cutting dengan SKPD lain dalam hal penyusunan dokumen rencana kerja (renja) dan lainnya
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja	Ada	Telah tercantum dalam dokumen PK
1.c	**Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan**	Ada	PK sudah sampai level staf
Kriteria:			
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin	Ada	Tercantum dalam dokumen renaka
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai	Sesuai	Renaka disusun berdasarkan PK dan Program, kegiatan, sub kegiatan yang sudah tercantum dalam renja
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track	Sesuai	Capaian kinerja utama Bappelitbang ada pada kategori Bagus (score 86,66%)
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dicantau secara berkala	Ada	Monev renaka dan kinerja Tw I - Tw IV
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisa perbaikan kinerja sebelumnya	Ada	Notulen Rapat Monev Renaka dan Kinerja Tw I - Tw IV
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik	Ada	Notulen Rapat Monev Renaka dan Kinerja Tw I - Tw IV
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Ya	Menyertakan semua pegawai dalam rapat monev renaka dan kinerja
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Ya	Menyertakan semua pegawai dalam rapat monev renaka dan kinerja
2	**PENGUKURAN KINERJA**		
2.a	**Pengukuran Kinerja telah dilakukan**		
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data	Ada	Sk Tim Sakip, SOP Evaluasi AKIP
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara	Ada	Penjelasan Tujuan dan Sasaran
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja	Ada	Melalui Rapat Internal / Monev Renaka dan Kinerja
2.b	**Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan**		
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja	Ada	Kepala Badan dan Sekretaris menandatanganinya rapat
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian	Relevan	Data Monev Renaka dan Kinerja
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang	Mendukung	Data Monev Renaka dan Kinerja
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala	Ya	Kinerja diukur per triwulan melalui monev renaka dan kinerja
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Ya	Monev sampai level sub kegiatan / bi
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi	Ada	Aplikasi E-Sakip
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Belum	E-Sakip masih hanya sebagai entry data dan upload dokumen, masih dalam proses pengembangan untuk dapat melakukan pengukuran kinerja
2.c	**Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien**		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan	Ya	Pemotongan TPP untuk pegawai yang terlambat (Disiplin)
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional	Ya	Diklat

3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing)		
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja	Ya	Hasil rapat monev menjadi pertimbangan pelaksanaan kegiatan di triwulan selanjutnya
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja	Ya	Hasil rapat monev menjadi pertimbangan pelaksanaan kegiatan di triwulan selanjutnya
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja	Ya	Hasil rapat monev tentang Hambatan pelaksanaan kegiatan menjadi pertimbangan pelaksanaan kegiatan di triwulan selanjutnya
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja	Ya	Hasil rapat monev menjadi pertimbangan pelaksanaan kegiatan di triwulan selanjutnya dengan pertimbangan efisiensi anggaran
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	Ya	Menghematkan kegiatan yang menjadi fokus utama dibandingkan kegiatan minor lain
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran	Ya	Setiap pegawai diundang ke rapat monev renaksi dan kinerja
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Ya	Setiap pegawai diundang ke rapat monev renaksi dan kinerja
3	**PTK AKUNTABILITAS KINERJA**		
3.a	**Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja**		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun	Ya	LKIP, LPPG, LKIV
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala	Ya	Laporan monev renaksi dan kinerja per triwulan
3	Dokumen Laporan Kinerja telah dibermakan	Ya	Dokumen LKIP, LPPG dan LKIV telah dikandangan Kepada Bupati
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.	Ya	Telah dilakukan review draft dokumen LKIP sebelum penilaian internal maupun pengisian LKE
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan	Ya	LKIP akan diunggah ke situs Dokku dan Website Bappelitbang
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.	Tidak	Dokumen LKIP masih dalam proses review
3.b	**Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya**		
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan	Ada	Telah mengacu kepada Permendagri
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang	Ada	Capaian Kinerja telah dimuatkan dalam Bab II Dokumen LKIP
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi	Ada	Perbandingan target dan Realisasi Kinerja beberapa tahun sebelumnya
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	Ya	Tercantum dalam dokumen LKIP
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Ya	Ada analisis perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional	Tidak	Tidak dapat dibandingkan dengan level nasional karena tidak sejenis
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	Ada	Ada penjelasan analisis keberhasilan dan kegagalan dalam dokumen LKIP
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Ada	Ada penjelasan dalam dokumen LKIP
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	Ada	Telah memadukanjuk LHE AKIP 2022 dan inspektorat
3.c	**Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya**		
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)	Ada	Materi Rakor dan Monevnya mengemukakan dokumen LKIP dan memberikan perhatian
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh	Ada	Setiap pegawai diundang dalam rapat evaluasi
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	Ada	target kinerja ditetapkan berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan target tahun selanjutnya
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	Ada	Anggaran pelaksanaan Sub kegiatan
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi	Ada	Hasil monev renaksi dan kinerja
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	ada	Pohon Kinerja dan Cascading telah mengatasi penyesuaian
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Ada	Pegawai membawa data pada setiap rapat monev renaksi dan kinerja
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**		
4.a	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan**		
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Ada	ada SOP Reviu AKIP dan mengacu LKI yang diterbitkan inspektorat
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh	Ada	Dokumen LKE
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara	Ada	Monev renaksi dan kinerja Tw I - Tw IV
4.b	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai**		
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai	Ada	Bappelitbang memiliki Tim SAKIP SOP, Evaluasi AKIP Internal
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM	Ada	Setiap pegawai mempengaruhi pada mengukur kinerjanya
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan	Ada	Rapat monev renaksi dan kinerja
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	Tidak	Aplikasi E-SAKIP masih dalam tahap perbaikan
4.c	**Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja**		
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Ada	LKE internal
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja	Ada	Tindak Lanjut LHE AKIP Bappelitbang
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Ada	Perbandingan capaian kinerja per triwulan
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Ada	hasil rapat monev renaksi dan kinerja menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan pengalokasian anggaran
6	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Ada	

Tapin, 28 Februari 2024
Kepala Bappelitbang,

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN BAPPELITBANG

Dr. H. Moldy Harris Prayoga, SE. ME

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Datu Nuraya RT. 01 Kel. Rangda Malingkung, Kawasan Rantau Baru Kode Pos 71114 RANTAU Telp.(0517)31508

Rantau, 28 Februari 2024

Nomor : 900.1.12/ 43 -Sekrt/Bappelitbang/2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Internal Bappelitbang Tahun 2023

Kepada Yth,
Kepala Bappelitbang Kab. Tapin
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah dilaksanakannya evaluasi internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2023, maka dengan ini kami sampaikan laporan hasil tindak lanjut evaluasi internal TIM SAKIP Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2023, sebagai berikut:

NO.	KOMPONEN / SUB KOMPONEN	JAWABAN	NILAI
I	**PERENCANAAN KINERJA**		
1.a	Dokumen Perencanan Kinerja Telah Tersedia	A	5,4
1.b	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi Standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja SMART, menggunakan penyelaraan (cascading) disetiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	BB	7,2
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	BB	12
2	**PENGUKURAN KINERJA**		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	A	3,4
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan		
2.c	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, Serta Penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	BB	12
3	**PELAPORAN KINERJA**		
3.a	Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	BB	2,4
3.b	Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaan	B	3,15
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	BB	6
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**		
4.a	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan	BB	4

4.b	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai	BB	6
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (Dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.	CC	7,5
	TOTAL	**78,3 (BB)**	

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bappelitbang Kabupaten Tapin yaitu:

1. Melakukan pengukuran kinerja yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan untuk dasar pemberian reward dan punishment dalam lingkup internal Bappelitbang Kabupaten Tapin.
2. Dokumen laporan kinerja belum dapat menyajikan perbandingan dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP internal Tahun 2023 di lingkungan Bappelitbang Kabupaten Tapin sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Bappelitbang Kabupaten Tapin dalam menerapkan manajemen kinerja di Lingkungan kerjanya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terimakasih.

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan

Fajar Sugi Kusuma W, SE.
NIP 19851030 201903 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Rabu, 28 Februari 2024
Pukul : 14:00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Bappelitbang
Agenda : Tindak Lanjut Permintaan Penyesuaian Dokumen SAKIP SKPD dan Review Draft Dokumen LKPIP Bappelitbang Tahun 2023

NO	NAMA	P/L	JABATAN	TANDATANGAN
1	Dr. H. Wedy K. P	L	Kepala	
2	Anwar Yamani	L	Kabid Ekon	
3	Radan Chandra PS	L	Sekretaris	
4	Mahdiyah	P	Yaka Litbang	
5	Dulpan R	L	Kabid Pend	
6	Ria Maryanty	P	Fungsional	
7	ARIF R.D	L	JF Analis Pembangunan Ahli	
8	Andri R	L	Perencana	
9	[illegible]	P	JF Perencana	
10	M. Ranggi Wardhana	L		
11	Bahang Pt	P	Sos. Ekon	
12	Nur Ifanyah	L	JF Perencana	
13	M. Ikhsan Anshari	L	Staf	
14	M. Gani Ishar	L	Staf	
15	Bahang Afriana	P	Fungsional Ahli Muda	
16	Fiqih [illegible]	L	Staf	
17	Jahratunisa	P	Staf	
18	Rahman [illegible]	L	"	
19	Nana Syahdah Anggi	P	"	

NO	NAMA	P/L	JABATAN	TANDATANGAN
20	Anwar	L	Staf	
21	Lyan I	L	"	
22	Ajeng Ryan	L	Ekon Pendat	
23	R. Rajer	P	Ekon Pendat	
24	Sri Wahyuni	P	Staf Ahli	
25	Sumiati	P	Ekon Pendat	
26	Siti Rahmah	P	— " —	
27	M. Adhya Apriza	P	Ekon Litbang	
28	Itsu Wahyuni	L	"	
29	Masnah	P	"	
30	Eni Rosita	P	"	
31	[illegible]	P	"	
32	Rusdianto Jaman	P	Staf	
33	Rusdi	P	Sosbud Litbang	
34	Ungi Sung	L	Perencana Muda	
35	M. Rizqa Lambang H	L	Staf	
36	Rafi	L	"	
37	Maliyati	L	JFT	
38	Akmal Saiqa	L	Ekon Litbang	
39	Fajar Hidayat Arbay	L	—	
40	Jismawati	P	—	
41	M. Ambar Khair	L	—	
42	Zubai Ilhar	L	Operator	
43	Fajar Rizqiya	L	—	
44	Nikma Sunar	L	—	
45				

LAMPIRAN 6. PERJANJIAN KINERJA BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TAPIN

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dr. H. ZAINAL AQLI, ST, MT, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin menyatakan sebagai berikut:

1. Tunduk dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil, dengan mengapa kemampuan, hakikat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin serta menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi teladan bagi masyarakat;
2. Memberikan segenap daya dan upaya serta kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tapin sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dan setiap langkah, upaya, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dapat melaksanakan tugas;
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau selama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin serta turut menjaga kerahasiaan sekar atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Rantau, 06 Februari 2023

Menyetujui
BUPATI TAPIN

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Pembuat Pernyataan
KEPALA BAPPELITBANG
KAB. TATAP TAPIN

Dr. H. ZAINAL AQLI, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196602214 199403 1 011

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ZAINAL AQLI, ST, MT
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. M. ARFIN ARPAN, MM
Jabatan : Bupati Tapin

Bertindak atasnya langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebenarnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. M. ARFIN ARPAN, MM

Pihak Pertama,

Dr. H. Zainal Aqli, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196602214 199403 1 011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Score 8,1 (sangat baik)
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	100%
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	100%
3	Meningkatnya hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan dimanfaatkan	100%
		Persentase hasil kelitbangan yang diuji	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.654.021.494,00	Sumber Dana APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp2.582.439.817,00	Sumber Dana APBD
3.	Program Koordinasi dan Kemitraan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp1.038.009.906,00	Sumber Dana APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp1.038.057.596,00	Sumber Dana APBD

Rantau, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. M. ARFAN ARPAN, MM

Pihak Pertama,

Dr. H. Zainal Arifi, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19660214 199403 1 011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan perencanaan, pelaporan dan keuangan yang efektif dan efisien	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	80%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	90%
2.	SDM yang berkualitas	Persentase ASN dengan capaian kinerja ≥90%	90%

	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.654.021.494,00

Rantau, 6 Februari 2023

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Arifi, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19660214 199403 1 011

Sekretaris,

Dr. H. Meiny Hanna Pinyoga, SE, ME
Pembina
NIP 19840522 200803 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	100%

Program	Anggaran
1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp1.038.557.606,00

Rantau, 6 Februari 2023

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Adi, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680214 199403 1 011

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah,

Mendari, SP.M.Ling
Penata
NIP. 19790807 200501 2 013

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SKPD mitra Bidang Sosial dan SDM	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD mitra Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah mitra bidang Sosial dan SDM	Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang sosial dan SDM	80%

Program	Anggaran
1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp545.358.300,00

Rantau, 6 Februari 2023

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Adi, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680214 199403 1 011

Kepala Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia,

Muhamad Khair Rani, SE
Penata Tk. I
NIP. 19760409 200605 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SKPD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD mitra Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	80%

Program	Anggaran
1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp451.841.500,00

Rantau, 6 Februari 2023

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Arifi, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur,

H. Pajar Sahri, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19710823 199303 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan Dan Pengendalian
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
2.	Meningkatnya kualitas capaian kinerja program prioritas daerah	Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	80%

Program	Anggaran
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp2.592.439.617,00

Rantau, 6 Februari 2023

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Arifi, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Zulfan Rabbi, ST, M.Eng
Pembina
NIP. 19780604 200604 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100%
		Persentase kinerja perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappeltbang	100%
		Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang sesuai target dan tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp52.208.304,00

Rantau, 6 Februari 2023

Sekretaris,

Dr. H. Medu Hanie Prawira, SE, ME
Pembina
NIP. 19640522 208803 1 001

Plt. Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan,

Fajar Sufi Kusuma Wardhani, SE
Penata Muda
NIP. 19851108 201903 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Administrasi Keuangan
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar pembukuan keuangan	100%
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%
		persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp5.232.000.441,00

Rantau, 6 Februari 2023

Sekretaris,

Dr. H. Medu Hanie Prawira, SE, ME
Pembina
NIP. 19640522 208803 1 001

Kepala Sub Bagian Keuangan,

Apsetri Candina, SE, MM
Penata Tk.I
NIP. 19840801 201001 2 023

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks kepuasan pelayanan ASN Bappelitbang	skore 6,3
2.	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%
3.	Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Bappelitbang yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp3.432.766.673,00
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp486.514.642,00
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp961.738.248,30
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp378.718.226,30

Rantau, 6 Februari 2023

Sekretaris,

Dr. H. Medy Hakim Priyasa, SE, ME
Pembina
NIP. 19640522 200503 1 001

Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian

Siti Nur Aliyah, S.Kom
Penata Tk I
NIP. 198001 12 200604 2 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Unit Kerja : Sub Bidang Perencanaan
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase hasil berita acara Musrenbang di semua level tingkatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	80%
2.	Terwujudnya kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp1.797.174.527,00
2. Analisis Data dan Informasi Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp242.512.500,00

Rantau, 6 Februari 2023

Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengendalian,

Zulkifli Rahim, ST, M.Eng
Pembina
NIP. 19780304 200604 1 006

JF. Perencana,

M. Hiro [illegible], SE
Penata
NIP. 19920129 201903 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Unit Kerja : Sub Bidang Pengendalian
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas kinerja Program Prioritas Daerah	Peningkatan capaian kinerja Program Prioritas Daerah yang terukur	100%
2.	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi indikator Kinerja perencanaan pemerintah daerah yang berkualitas	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp552.752.780,00

Rantau, 6 Februari 2023

Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengendalian,

Dudun Rachmi, ST, M.Eng
Pembina
NIP. 19780804 200604 1 004

JF. Perencana,

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Unit Kerja : Sub Bidang Ekonomi
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub Bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub Bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	80%
2.	Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp. 224.700.000,00

Rantau, 6 Februari 2023

Kepala Bidang Ekonomi
dan Infrastruktur,

H. Pipar Sofian, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19710923 199303 1 004

JF. Perencana,

Arief Fitriansyah, SE
Penata
NIP. 19880613 201503 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : **Bidang Ekonomi dan Infrastruktur**
Unit Kerja : **Sub Bidang Infrastruktur**
Tahun Anggaran : **2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	95%
2.	Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Infrastruktur	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp. 287.152.900,00

Rantau, 6 Februari 2023

Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

H. Paar Sahan, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19710823 199303 1 004

JF. Perencana

Nor Pensyah, S.Kom
Penata
NIP. 19730416 200604 1 013

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : **Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia**
Unit Kerja : **Sub Bidang Sumber Daya Manusia**
Tahun Anggaran : **2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub Bidang SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub Bidang SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	95%
2.	Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang SDM	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang SDM yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia	Rp. 278.532.800,00

Rantau, 6 Februari 2023

Kepala Bidang Sosial Dan Sumber Daya Manusia

Muhamad Ribat Rasi, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19750408 200603 1 001

JF. Perencana

Ida Sahrul, SE
Penata
NIP. 19690717 201000 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
Unit Kerja : Sub Bidang Sosial
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan nitna Sub Bidang Sosial yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah nitna Sub Bidang Sosial yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	80%
2.	Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi SKPD nitna Sub Bidang Sosial	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD nitna Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia	Rp. 389.685.580,00

Rantau, 6 Februari 2023

Kepala Bidang Sosial
Dan Sumber Daya Manusia

Muhammad Khair Rani, SE
Penata Tk. I
NIP. 19750408 200803 1 001

JF. Perencana

Eni Sakyi Ardani DS, ST
Penata
NIP. 19780200 201406 2 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit organisasi : Penelitian & Pengembangan Daerah
Unit Kerja : Sub Bidang Penelitian & Pengembangan Sosial Budaya
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemanfaatan database inovasi dan teknologi dalam pelayanan publik	Persentase pemanfaatan database inovasi dan teknologi dalam pelayanan publik	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp708.715.100,00

Rantau, 6 Februari 2023

Kepala Bidang Penelitian
dan Pengembangan Daerah

Mahdari, SP., M.Ling
Pembina
NIP. 19790507 200501 2 015

JF. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi

Ari Rahmat Dianyah, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19781214 200801 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit organisasi : Penelitian & Pengembangan Daerah
Unit Kerja : Sub Bidang Penelitian & Pengembangan Ekonomi
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan sosial budaya	Persentase hasil kajian kelitbangan sosial budaya yang berkualitas	100%
2.	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan ekonomi	Persentase hasil kajian kelitbangan ekonomi yang berkualitas	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp191.981.076,00
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan pembangunan	Rp170.481.000,00

Rantau, 8 Februari 2023

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah,

Mendasi, SP., M.Ling
Pembina
NIP. 19700607 200501 2 015

JP. Peneliti,

Rini Maqnaria, SE, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19840504 201001 2 024

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subag Umum dan Kepegawaian
Atas Nama : IRYANI
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2.	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
3.	Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
4.	Tersedianya Paket Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
5.	Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan
6.	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
7.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan
8.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan	1 laporan
9.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp80.095.070,00
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp199.383.447,00
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp[illegible]
4. Penyediaan Bahan/Material	Rp284.910.905,00
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp19.927.800,00

6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp1.982.037.900,00
7.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Rp073.293.928,00
8.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp235.260.800,00
9.	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp153.252.320,00

Rantau, 6 Februari 2023

Kasubag Umum dan Kepegawaian,

Siti Nur Aisyah, S.kom
Penata Tk. I
NIP 19850112 200604 2 004

Pengadministrasi Umum,

IRYANI
Penata Muda
NIP 19850518 200701 2 013

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subag Umum dan Kepegawaian
Atas Nama :
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersediaanya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2.	Tersediaanya Unit Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit
3.	Terpeliharanya dan terbayarkannya pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit
4.	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.1.214.077.701,00
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp496.293.928,00
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perlengkapan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp313.880.808,00
4. Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Rp62.038.826,00

Rantau, 8 Februari 2023

Kasubag Umum dan Kepegawaian,

Siti Nur Aisyah, S.kom
Penata Tk. I
NIP 19850112 200604 2 004

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah,

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subag Keuangan
Atas Nama : Muhammad Syahdani, A.Md
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang

Sub Kegiatan	Anggaran
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.281.012.604,00

Rantau, 8 Februari 2023

Kepala Sub Bagian Keuangan,

Agustin Carolina, SE, MM
Penata Tk. I
NIP. 19840801 201001 2 023

Bendahara Pengeluaran,

Muhammad Syahdani, A.Md
Pengatur Tk. I
NIP. 19750901 200901 1 008

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subag Keuangan
Atas Nama : Siti Marfuah, A.Md
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
2.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1 Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 23.363.000,00
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 26.184.040,00

Rantau, 6 Februari 2023

Kepala Sub Bagian Keuangan,

Agustin Carolina, SE, MM
Penata Tk. I
NIP. 19840801 201001 2 023

Pengadministrasi Keuangan,

Siti Marfuah, A.Md
Pengatur Tk. I
NIP. 19760415 200801 2 008

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subbag Perencanaan dan Pelaporan
Atas Nama : Fajar Suri Kusuma Wardhani, SE
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 30.579.568,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 29.439.764,00

Rantau, 6 Februari 2023

Sekretaris,

Dr. H. Mellu Hanafiyyah, SE, ME
Pembina
NIP 19840622 200803 1 001

Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,

Fajar Suri Kusuma Wardhani, SE
Penata Muda
NIP 19851030 202303 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
Unit Kerja : Sub Bidang Sosial
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
2.	Terlaksanaanya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah
3.	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp123.983.500,00
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp88.888.560,00
3. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp89.033.500,00

Rantau, 6 Februari 2023

Kepala Bidang Sosial
Dan Sumber Daya Manusia,

Muhamad Khair Rizal, SE
Penata Tk. I
NIP. 19780408 200803 1 001

Pengadministrasi Perencanaan
dan Program

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
Unit Kerja : Subbidd Sumber Daya Manusia
Atas Nama : Paridah Ariani, A. Md
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
2.	Terlaksanaya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 Perangkat Daerah
3.	Terlaksanaya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp126.116.600,00
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp60.028.700,00
3. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp68.388.500,00

Rantau, 6 Februari 2023

Kepala Bidang Sosial
Dan Sumber Daya Manusia,

Muhammad Nihar Rani, SE
Penata Tk. I
NIP. 19750409 200003 1 001

Pengadministrasi Perencanaan
Dan Program,

Paridah Ariani, A. Md
Pengatur Tk. I
NIP. 19750715 200001 2 004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Unit Kerja : Subbidd Infrastruktur
Atas Nama : -
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
2.	Terlaksanaya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	17 Perangkat Daerah
3.	Terlaksanaya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	17 Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp118.275.000,00
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp76.843.000,00
Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp68.040.000,00

Rantau, 6 Februari 2023

Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur,

H. Pajar Sofari, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19710523 199003 1 006

Pengadministrasi Perencanaan dan Program,

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Unit Kerja : Subbid Ekonomi
Atas Nama : -
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	10 Perangkat Daerah
3.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	10 Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp110.283.000,00
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp86.521.000,00
Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp47.065.000,00

Rantau, 8 Februari 2022

Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur,

H. Pagar Sabar, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19710803 199003 1 004

Pengadministrasi Perencanaan dan Program,

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Unit Kerja : Subbid Perencanaan
Atas Nama : Sunilati, A. Md
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratis)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratis)	1 Dokumen
2.	Tersedianya Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara
3.	Tersedianya Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara
4.	Tersedianya Usulan yang Tervalidasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Tervalidasi oleh Kecamatan	1 Usulan
5.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen
6.	Tersedianya Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rp79.036.000,00
2.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Rp67.429.375,00
3.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp492.335.845,00
4.	Penyiapan Bahan Koordinasi musrenbang Kecamatan	Rp318.755.631,00
5.	Koordinasi Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota	Rp828.117.875,00
6.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Rp242.512.500,00

Rantau, 6 Februari 2023

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Sofian Radin, ST, M.Ling
Pembina
NIP. 19750804 200604 1 004

Pengelola Bahan Perencanaan,

Sunilati, A.Md
Pengatur Tk. I
NIP. 19741219 200601 2 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Unit Kerja : Subbidd Pengendalian
Atas Nama : Suintati, A. Md
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 laporan
2.	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan bidang pelaksanaan pembangunan daerah	Rp149.442.525,00
2.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp434.310.263,00

Rantau, 8 Februari 2023

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian,

Zulfan Rachmi, ST, M.Eng
Pembina
NIP. 19750604 200604 1 004

Pengadministrasi Perencanaan dan Program,

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Penelitian dan Pengembangan
Unit Kerja : Subbidd Litbang Sosial Budaya
Atas Nama : Hj. Lili Damayanti
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 laporan
2.	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen
3.	Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan inversi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Rp296.312.600,00
2. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp231.007.300,00
3. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rp178.395.000,00

Rantau, 8 Februari 2023

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah,

Meinilat, SP, M.Ling
Pembina
NIP. 19790807 200801 2 015

Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Penelitian,

Hj. Lili Damayanti
Penata Muda Tk. I
NIP. 19720230 199303 2 003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Penelitian dan Pengembangan
Unit Kerja : Subbidd Litbang Ekonomi
Atas Nama : ISNANAH
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen
2.	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Rp161.861.578,00
2. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rp170.481.000,00

Rantau, 8 Februari 2023

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah,

Mahdian, SP., M.Ling
Pembina
NIP. 19790507 200801 2 013

Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Penelitian,

ISNANAH
Pengatur Muda
NIP. 19760810 201212 2 00

LAMPIRAN 7. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA I BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ZAINAL AQLI, ST, MT
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM
Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebenarnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 April 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Pihak Pertama,

Dr. H. ZAINAL AQLI, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19680214 199403 1 011

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Tahun Anggaran : 2023

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah**		**Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan**	**Score 7,2**
		Meningkatnya kualitas perencanaan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	100%
			Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	100%
2.	**Meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan**		**Indeks Inovasi Daerah**	**62**
		Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase Inovasi Daerah yang memenuhi syarat GA	100%
		Meningkatnya hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	100%
3.	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**77,25**
		Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Komponen penilaian - Perencanaan kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal	 - 24,75 - 23,25 - 16,75 - 16,50

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp18.654.621.494,00	Sumber Dana APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp0.992.439.817,00	Sumber Dana APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp1.026.339.820,00	Sumber Dana APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp1.026.087.696,00	Sumber Dana APBD

Rantau, 17 April 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. M. ARPAN ARPAN, MM

Pihak Pertama,

Dr. H. Zainal Agil, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19680214 199403 1 011

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	90%
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran	90%
2.	SDM yang berkualitas	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	80%

	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp18.654.621.494,00

Rantau, 17 April 2023

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Agil, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19680214 199403 1 011

Sekretaris,

Dr. H. Mesly Hafis Fransiska, SE, ME
Pembina
NIP.19840522 200603 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : **Bidang Perencanaan Dan Pengendalian**
Tahun Anggaran : **2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
2.	Meningkatnya kualitas capaian kinerja program prioritas daerah	Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	80%

Program	Anggaran
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp2.983.439.817,00

Rantau, 17 April 2023

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Arifi, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian,

Zainah Rahmi, ST, M.Eng
Pembina
NIP. 19750604 200604 1 004

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : **Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia**
Tahun Anggaran : **2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SKPD mitra sub bidang Sosial dan SDM	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya capaian kinerja program SKPD mitra Sosial dan SDM	Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang Sosial dan SDM	95%

Program	Anggaran
1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp540.368.300,00

Rantau, 17 April 2023

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Arifi, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

Kepala Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia,

Muhamad Khair Rani, SE
Penata Tk. I
NIP. 19750409 200503 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SKPD nitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD nitra Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah nitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Peningkatan capaian kinerja program SKPD nitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	80%

Program	Anggaran
1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp481.941.500,00

Rantau, 17 April 2023

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Arifin, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur,

H. Pajar Saleh, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19710823 199003 1 004

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	Persentase inovasi Daerah yang memenuhi syarat IGA	100%
2.	Meningkatnya hasil kaliliangan	Persentase hasil kaliliangan yang dimanfaatkan	100%

Program	Anggaran
1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp1.038.067.696,00

Rantau, 17 April 2023

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Zainal Arifin, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah,

Mahfiat, SP, MMPa
Pembina
NIP. 19780607 200501 2 015

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks kepuasan pelayanan ASN Bappeltibang	score 4,3
2.	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%
3.	Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Bappeltibang yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp3.994.943.472,00
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp510.584.042,00
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp1.015.496.240,00
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp376.716.226,00

Rantau, 17 April 2023

Sekretaris,

Dr. H. Maliki Hanta Prayoga, SE, ME
Pembina
NIP. 19690820 200603 1 001

Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian

Siti Nur Aisyah, S.Kom
Penata Tk.I
NIP. 19850112 200604 2 004

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Administrasi Keuangan
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar pembakuan keuangan	100%
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%
		persentase hasil tindaklanjut pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp5.332.613.280,00

Rantau, 17 April 2023

Sekretaris,

Dr. H. Maliki Hanta Prayoga, SE, ME
Pembina
NIP. 19690820 200603 1 001

Kepala Sub Bagian Keuangan,

Aryatin Carolina, SE, MM
Penata Tk.I
NIP. 19840801 201001 2 023

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Persentase wujud program, kegiatan, sub kegiatan tahun (n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100%
		Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	100%
		Persentase layanan monitoring dan evaluasi kinerja yang sesuai target dan tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp92.268.354,00

Rantau, 17 April 2023

Sekretaris,

Dr. H. Mahfi Hanis Pasaribu, SP, MP
Pembina
NIP. 19640522 200803 1 001

Pit. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan,

Fajar Sri Kusuma Wardhani, SE
Penata Muda
NIP. 19851106 201903 2 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Unit Kerja : Sub Bidang Perencanaan
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase kesesuaian berita acara Musrenbang di semua level tingkatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	80%
2.	Terwujudnya kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Program RPJMD yang dituangkan dalam RKPD tiap tahunnya	100%
3.	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi indikator kinerja perencanaan pemerintah daerah yang berkualitas	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp1.707.174.527,00
2. Analisis Data dan Informasi Pelayanan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp243.912.905,50

Rantau, 17 April 2023

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian,

Zulfaidah, Dr. M. Ers
Pembina
NIP. 19780804 200804 1 004

JF. Perencana,

M. Hilmi Jemaluddin, SE
Penata
NIP. 19820129 201803 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Unit Kerja : Sub Bidang Pengendalian
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas kinerja Program Prioritas Daerah	Peningkatan capaian kinerja Program Prioritas Daerah yang tercapai	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp552.752.760,00

Rantau, 17 April 2023

Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengendalian,

Zulfan [illegible], ST, M.Eng
Pembina
NIP. 19780504 200604 1 004

JF. Perencana,

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
Unit Kerja : Sub Bidang Sosial
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub Bidang Sosial yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub Bidang Sosial yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	80%
2.	Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Sosial	Persentase rekomendasi hasil sertifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia	Rp218.832.905,80

Rantau, 17 April 2023

Kepala Bidang Sosial
Dan Sumber Daya Manusia,

Muhammad Khairi Rani, SE
Penata Tk. I
NIP. 19750409 200803 1 001

JF. Perencana,

Eal Sahyi Ahmad, DR, ST
Penata
NIP. 19760930 201408 2 006

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
Unit Kerja : Sub Bidang Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan intra Sub Bidang SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah intra Sub Bidang SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	80%
2.	Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi SKPD intra Sub Bidang SDM	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD intra Sub Bidang SDM yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia	Rp218.140.300,00

Rantau, 17 April 2023

Kepala Bidang Sosial
Dan Sumber Daya Manusia,

Muhammad Khairi Rizki, SE
Penata Tk. I
NIP. 19750409 200803 1 001

JF. Perencana,

Uci Samuel, SE
Penata
NIP. 19830717 201503 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Unit Kerja : Sub Bidang Infrastruktur
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan intra Sub bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah intra Sub bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	80%
2.	Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi SKPD intra Sub Bidang Infrastruktur	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD intra Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp196.112.600,00

Rantau, 17 April 2023

Kepala Bidang Ekonomi
dan Infrastruktur,

H. Polar Sabet, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19712003 [illegible] 1 004

JF. Perencana,

Nur Nasyiah, S.Kom
Penata
NIP. 19730415 200604 1 013

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Unit Kerja : Sub Bidang Ekonomi
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub Bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub Bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	90%
2.	Meningkatnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp178.704.000,00

Rantau, 17 April 2023

Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur,

H. Pasar Sabar, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19710823 199303 1 004

JF. Perencana,

Arief Fahmik, SE
Penata
NIP. 19860813 201503 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit organisasi : Penelitian & Pengembangan Daerah
Unit Kerja : Sub Bidang Penelitian & Pengembangan Sosial Budaya
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemanfaatan database inovasi dan teknologi dalam pelayanan publik	Persentase pemanfaatan database inovasi dan teknologi dalam pelayanan publik	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp803.886.355,00

Rantau, 17 April 2023

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah,

Rabdani, SP, M.Ling
Pembina
NIP. 19780607 200501 2 015

JF. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,

Alif Rahmat Diamyah, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19791214 200801 1 002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit organisasi : Penelitian & Pengembangan Daerah
Unit Kerja : Sub Bidang Penelitian & Pengembangan Ekonomi
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kegiatan penelitian di bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi	Pemanfaatan penelitian di bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi yang terpublikasi	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp[illegible]
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan pembangunan	Rp174.513.400,00

Rantau, 17 April 2023

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah,

[illegible], SP, M.Ling
Pembina
NIP. 19[illegible] 2 015

JF Peneliti,

Roy Hermeto, SE, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19840604 201601 2 024

LAMPIRAN 8. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA II BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. MEDY HARRIS PRAYOGA, SE, ME
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM
Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Pihak Pertama,

Dr. H. MEDY HARRIS PRAYOGA, SE, ME
Pembina
NIP. 19840522 20003 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)	7,2
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Government Awards (IGA)	69
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79
4.	Meningkatnya Pelaksanaanan ASN Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaanan ASN (P-ASN) Perangkat Daerah	79

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.932.289.080,00	Sumber Dana APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp3.871.758.225,00	Sumber Dana APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp916.028.955,00	Sumber Dana APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp1.137.261.080,00	Sumber Dana APBD

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Pihak Pertama,

Dr. H. MEDY HARRIS PRAYOGA, SE, ME
Pembina
NIP. 19840522 20003 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP: - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal	 24,50 23,00 11,55 17,55
2.	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%
4.	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Score 4,0

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.932.288.080,00

Rantau, 18 September 2023

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Maidy Harris Pramana, SE., ME.
Pembina
NIP. 19640522 20003 1 001

Sekretaris,

Raden Chandra Nugraha PS, ST., MS.
Pembina Tk. I (IVb)
NIP. 19760514 200601 1009

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Policy Brief Penelitian yang dimanfaatkan	100%
2.	Meningkatnya Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan	Persentase Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan	100%
3.	Meningkatnya inovasi daerah yang berkelanjutan	Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan	73,62

Program	Anggaran
1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp1.127.261.560,00

Rantau, 18 September 2023

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Maidy Harris Pramana, S.E., M.E.
Pembina
NIP. 19640522 20003 1 001

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah,

Mahdiati, SP, M.Sing
Pembina
NIP. 19790607 200601 2 015

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
		Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)	100%
2.	Meningkatnya proses perencanaan pembangunan	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang sosial dan SDM Perangkat Daerah yang Tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang sosial dan SDM	80%

Program	Anggaran
1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp473.642.888,00

Rantau, 18 September 2023

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Mesdy Hadi Purnama, S.P., M.E.
Pembina
NIP. 19840522 20003 1 001

Kepala Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia,

Muhamad Khair Rani, SE
Penata Tk. I
NIP. 19750409 200603 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Kerja : Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
		Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)	100%
2.	Meningkatnya proses perencanaan pembangunan	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang ekonomi dan bidang infrastruktur Perangkat Daerah Tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang ekonomi dan bidang infrastruktur	80%

Program	Anggaran
1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp438.087.650,00

Rantau, 18 September 2023

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Mesdy Hadi Purnama, S.P., M.E.
Pembina
NIP. 19840522 20003 1 001

Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur,

Anwar Yamin, S.Ak., M.M.
Pembina
NIP. 19701111 199803 1 003

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan Dan Pengendalian
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
		Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program dan Indikator)	100%
		Persentasi Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang telah diespakati dalam satu data	80%
2	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat waktu	100%
		Presentase partisipasi usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	91,72
3	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	80%

Program	Anggaran
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp2.071.756.225,00

Rantau, 18 September 2023

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. Meky [illegible] Sinaga, S.E., M.E.
Pembina
NIP. 19640522 20003 1 001

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian,

Zulkan Rahmi, ST. M. Eng
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 004

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100%
2.	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	31,46%
3.	Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp4.670.332.074,00
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp575.537.882,00
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp973.548.248,00
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp413.906.600,00

Rantau, 18 September 2023

Sekretaris,

Raden Chandra Nugraha PS, ST., MS.
Pembina Tk. I
NIP. 19760514 200501 1009

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Siti Nur Aziah, S.Kom
Penata Tk. I
NIP. 19880112 200604 2 004

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Administrasi Keuangan
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.249.097.812,00

Rantau, 18 September 2023

Sekretaris,

Raden Chandra Nugraha PS, ST, MS.
Pembina Tk. I
NIP. 19760514 200501 1009

Kepala Sub Bagian Keuangan,

Aquatin Carolina, SE, MM
Penata Tk.I
NIP. 19840801 201001 2 023

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%
2.	Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100%
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp49.998.394,00

Rantau, 18 September 2023

Sekretaris,

Raden Chandra Nugraha PS, ST, MS.
Pembina Tk. I
NIP.19760514 200501 1009

Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan,

Fajar Suri Kusuma Wardhani, SE
Penata Muda Tk. I
NIP. 19851030 201903 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Kerja : Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Sub Bidang Perencanaan
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan	100%
2.	Terlaksanaya Proses Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai jadwal dan ketentuan	100%
3.	Terlaksanaanya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100%
4.	Terlaksanaya Asistensi dan Koordinasi dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase asistensi dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase rekomendasi hasil asistensi dokumen perencanaan daerah yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100%
5.	Terlaksanaanya rencana aksi Satu Data Indonesia yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Persentase Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang terlaksana tepat waktu	80%

Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp3.938.035.830,
2. Analisis Data dan Informasi Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp470.960.000

Rantau, 12 Januari 2024

Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengendalian,

Zulfan Hadi, S.T., M.Eng.
Pembina
NIP. 19780804 200604 1 004

JF. Perencana,

M. Hilmi Jaya Putra, S.P.
Penata
NIP. 19920129 201503 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Unit Kerja : Sub Bidang Pengendalian
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksanaya Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp638.362.700,00

Rantau, 18 September 2023

Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengendalian,

Zulfan Hadi, ST. M. Eng
Pembina
NIP. 19780804 200604 1 004

JF. Perencana,

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : **Bidang Ekonomi dan Infrastruktur**
Unit Kerja : **Sub Bidang Ekonomi**
Tahun Anggaran : **2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	100%
2.	Terlaksanaya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai jadwal dan ketentuan	100%
3.	Terlaksanaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%
4.	Terlaksanaya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi Sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%
5.	Terlaksanaya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Ekonomi ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp223.948.500,00

Rantau, 18 September 2023

Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur,

Anwar Yamani, S.Ms., M.M.
Pembina
NIP. 19781111 199603 1 003

JF. Perencana,

Arief Firmansyah, SE
Penata
NIP. 19860613 201003 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Unit Kerja : Sub Bidang Infrastruktur
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan	100%
2.	Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai jadwal dan ketentuan	100%
3.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%
4.	Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur Sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%
5.	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Infrastruktur ditindaklanjuti	100%

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
Unit Kerja : Sub Bidang Sosial
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan	100%
2.	Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai jadwal dan ketentuan	100%
3.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%
4.	Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sosial Sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%
5.	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sosial ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp228.366.958,00

Rantau, 18 September 2023

Kepala Bidang Sosial
Dan Sumber Daya Manusia,

Muhammad Khair Rani, SE
Penata Tk. I
NIP. 19750409 200603 1 001

JF. Perencana,

Eri Selvi Adriani DS, ST
Penata
NIP. 19760936 201406 2 006

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
Unit Kerja : Sub Bidang Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan	100%
2.	Terlaksanaya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai jadwal dan ketentuan	100%
3.	Terlaksanaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%
4.	Terlaksanaya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia Sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%
5.	Terlaksanaya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Manusia ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia	Rp244.275.850,00

Rantau, 16 September 2023

Kepala Bidang Sosial Dan Sumber Daya Manusia,

Muhammad Khair Rani, SE
Penata Tk. I
NIP. 19750409 200603 1 001

JF. Perencana,

Uci Sahrul, SE
Penata
NIP. 19830717 201503 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit organisasi : Penelitian & Pengembangan Daerah
Unit Kerja : Sub Bidang Penelitian & Pengembangan Sosial Budaya
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Peran Aktif Inovator dalam mendukung Inovasi daerah	Persentase Inovator yang berperan aktif dalam mendukung Inovasi Daerah	30,67%
2.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Inovasi Daerah	Persentase peserta Bimbingan Teknis yang menghasilkan inovasi	80%
3.	Melaksanakan fasilitasi inovasi daerah yang di replikasi	Persentase fasilitasi inovasi daerah yang di replikasi	100%
4.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Inovasi Daerah	Persentase monitoring dan evaluasi inovasi daerah yang ditindaklanjuti	73,62%
5.	Melaksanakan Pembinaan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi Daerah yang dibina	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp706.993.054,00

Rantau, 16 September 2023

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah,

Mahdari, SP., M. Ling
Pembina
NIP. 19780507 200501 2 015

JF. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,

Arif Rahmat Dianyah, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19761214 200601 1 002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit organisasi : Penelitian & Pengembangan Daerah
Unit Kerja : Sub Bidang Penelitian & Pengembangan Ekonomi
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Rekomendasi Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti	100%
2.	Terlaksanaya Penelitian dan Pengembangan yang sesuai isu strategis	Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu strategis	60%
3.	Meningkatnya Rekomendasi Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti	50%
4.	Terlaksanaya Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Diseminasi	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp258.013.478,00
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan pembangunan	Rp158.055.050,00
3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp61.366.550,00

Rantau, 18 September 2023

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah,

Mahdiar, SP., M.Ling
Pembina
NIP. 19780507 200501 2 015

JF. Peneliti,

Rini Meiraty, SE, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19840504 201001 2 024

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subag Perencanaan dan Pelaporan
Atas Nama : -
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersediaanya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2.	Tersediaanya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp33.138.100,00
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp16.738.264,00

Rantau, 18 September 2023

Kasubag Perencanaan dan Pelaporan

Fajar Sari Kusuma Wardhani, SE
Penata Muda Tk. I
NIP.19851030 201903 2 001

Analis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subag Umum dan Kepegawaian
Atas Nama : -
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
2.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
3.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Rp399.003.928,00
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp283.260.000,00
3. Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp124.262.320,00

Rantau, 18 September 2023

Kasubag Umum dan Kepegawaian,

Pengadministrasi Kepegawaian,

Siti Nur Azizah, S.Kom
Penata Tk. I
NIP. 19850112 200604 2 004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subag Umum dan Kepegawaian
Atas Nama : -
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2.	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
3.	Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
4.	Tersedianya Paket Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
5.	Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
6.	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp92.077.570,00
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp205.705.087,00
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp51.292.377,00
4. Penyediaan Bahan/Material	Rp289.221.035,00
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp25.209.350,00
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp2.491.109.750,00

Rantau, 18 September 2023

Kasubag Umum dan Kepegawaian,

Pengadministrasi Umum,

Siti Nur Azizah, S.Kom
Penata Tk. I
NIP. 19850112 200604 2 004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subag Umum dan Kepegawaian
Atas Nama : -
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2.	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit
3.	Terpeliharanya dan terbayarkannya pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Unit
4.	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	1 Unit
5.	Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp1.525.717.905,00
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp675.537.952,00
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp186.900.960,00
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp70.735.620,00
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp156.270.000,00

Rantau, 18 September 2023

Kasubag Umum dan Kepegawaian,

Siti Nur Aisyah, S.Kom
Penata Tk. I
NIP.19850112 200904 2 004

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah,

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subag Keuangan
Atas Nama : Siti Marfuah, A.Md
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
2.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp25.393.800,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp26.194.040,00

Rantau, 18 September 2023

Kepala Sub Bagian Keuangan,

Apalah Carolina, SE, MM
Penata Tk. I
NIP.19840801 201001 2 023

Pengadministrasi Keuangan,

Siti Marfuah, A.Md
Pengatur Tk. I
NIP.19780415 200901 2 005

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subag Keuangan
Atas Nama : Muhammad Syahdani, A.Md
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang

Sub Kegiatan	Anggaran
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.197.510.257,00

Rantau, 18 September 2023

Kepala Sub Bagian Keuangan,

Adelin Carolina, SE, MM
Penata Tk. I
NIP. 19940801 201001 2 023

Bendahara Pengeluaran,

Muhammad Syahdani, A.Md
Pengatur Tk. I
NIP. 19750801 200901 1 006

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Unit Kerja : Subbid Ekonomi
Atas Nama : -
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
2.	Terfasilitasinya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	10 Perangkat Daerah
3.	Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	10 Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp124.457.400,00
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp68.700.600,00
3. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp44.869.000,00

Rantau, 18 September 2023

Kepala Bidang Ekonomi Dan Infrastruktur,

Anwar Yanuri, S.Ng, M.M
Pembina
NIP. 19761111 199903 1 003

Pengadministrasi Perencanaan dan Program,

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Unit Kerja : Subbid Infrastruktur
Atas Nama : -
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersediaanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
2.	Terfasilitasinya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	17 Perangkat Daerah
3.	Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	17 Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp41.288.800,00
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp72.308.050,00
3. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp51.562.200,00

Rantau, 18 September 2023

Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur,

Anwar Yamini, S.Ap., M.M.
Pembina
NIP. 19761111 199503 1 003

Pengadministrasi Perencanaan dan Program,

-

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Pemrograman dan Pengendalian
Unit Kerja : Subbid Pengendalian
Atas Nama : -
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersediaanya Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 laporan
2.	Tersediaanya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan bidang pelaksanaan pembangunan daerah	Rp404.319.265,00
2.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp134.042.525,00

Rantau, 18 September 2023

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian,

Zulkan Badrni, ST, M. Eng
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 004

Pengadministrasi Perencanaan dan Program,

-

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : **Bidang Perencanaan dan Pengendalian**
Unit Kerja : **Subbid Perencanaan**
Atas Nama : **Sumiati, A. Md**
Tahun Anggaran : **2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen
2.	Tersedianya Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara
3.	Tersedianya Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara
4.	Tersedianya Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan
5.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen
6.	Tersedianya Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rp67.536.000,00
2.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Rp68.309.375,00
3.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp282.187.542,00
4.	Penyiapan Bahan Koordinasi musrenbang Kecamatan	Rp319.755.631,00
5.	Koordinasi Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	Rp1.164.102.387,00
6.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Rp242.512.580,00

Rantau, 18 September 2023

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian,

Zulfan Bakri, ST. M. Eng
Pembina
NIP. 19750604 200604 1 004

Pengelola Bahan Perencanaan,

Sumiati, A.Md
Pengatur Tk. I
NIP. 19741218 200901 2 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : **Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia**
Unit Kerja : **Subbid Sumber Daya Manusia**
Atas Nama : **Faridah Ariani, A. Md**
Tahun Anggaran : **2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
2.	Terlaksanaanya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Perangkat Daerah
3.	Terlaksanaanya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp108.533.400,00
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp77.394.950,00
3. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp58.347.500,00

Rantau, 18 September 2023

Kepala Bidang Sosial
Dan Sumber Daya Manusia,

Muhammad Khair Rani, SE
Penata Tk. I
NIP. 19750409 200603 1 001

Pengadministrasi Perencanaan
Dan Program,

Faridah Ariani, A. Md
Pengatur Tk. I
NIP. 19750715 200601 2 004

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : **Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia**
Unit Kerja : **Sub Bidang Sosial**
Tahun Anggaran : **2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
2.	Terlaksanaanya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah
3.	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp91.685.000,00
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp77.538.479,00
3. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp59.033.479,00

Rantau, 18 September 2023

Kepala Bidang Sosial
Dan Sumber Daya Manusia,

Muhammad Khair Rani, SE
Penata Tk. I
NIP. 19750409 200603 1 001

Pengadministrasi Perencanaan
dan Program,

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Penelitian dan Pengembangan
Unit Kerja : Subbid Litbang Sosial Budaya
Atas Nama : Hj. Lili Damayanti
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inventasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inventasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 laporan
2.	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan inventasi di bidng difusi inovasi dan penerapan teknologi	Rp440.543.024,00
2. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp207.881.480,00

Rantau, 18 September 2023

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah,

Mahdian, SP. M. Ling
Pembina
NIP. 19780607 200501 2 015

Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Penelitian,

Hj. Lili Damayanti
Penata Muda Tk. I
NIP. 19720330 199303 2 009

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Organisasi : Bidang Penelitian dan Pengembangan
Unit Kerja : Subbid Litbang Ekonomi
Atas Nama : ISNANIAH
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen
2.	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen
3.	Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Rp259.513.476,00
2. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rp156.000.000,00
3. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rp61.268.550,00

Rantau, 18 September 2023

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah,

Mahdian, SP. M. Ling
Pembina
NIP. 19780607 200501 2 015

Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Penelitian,

ISNANIAH
Pengatur Muda
NIP. 19760810 201212 2 00

Lampiran 9. Pohon Kinerja (Cascading) Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2023

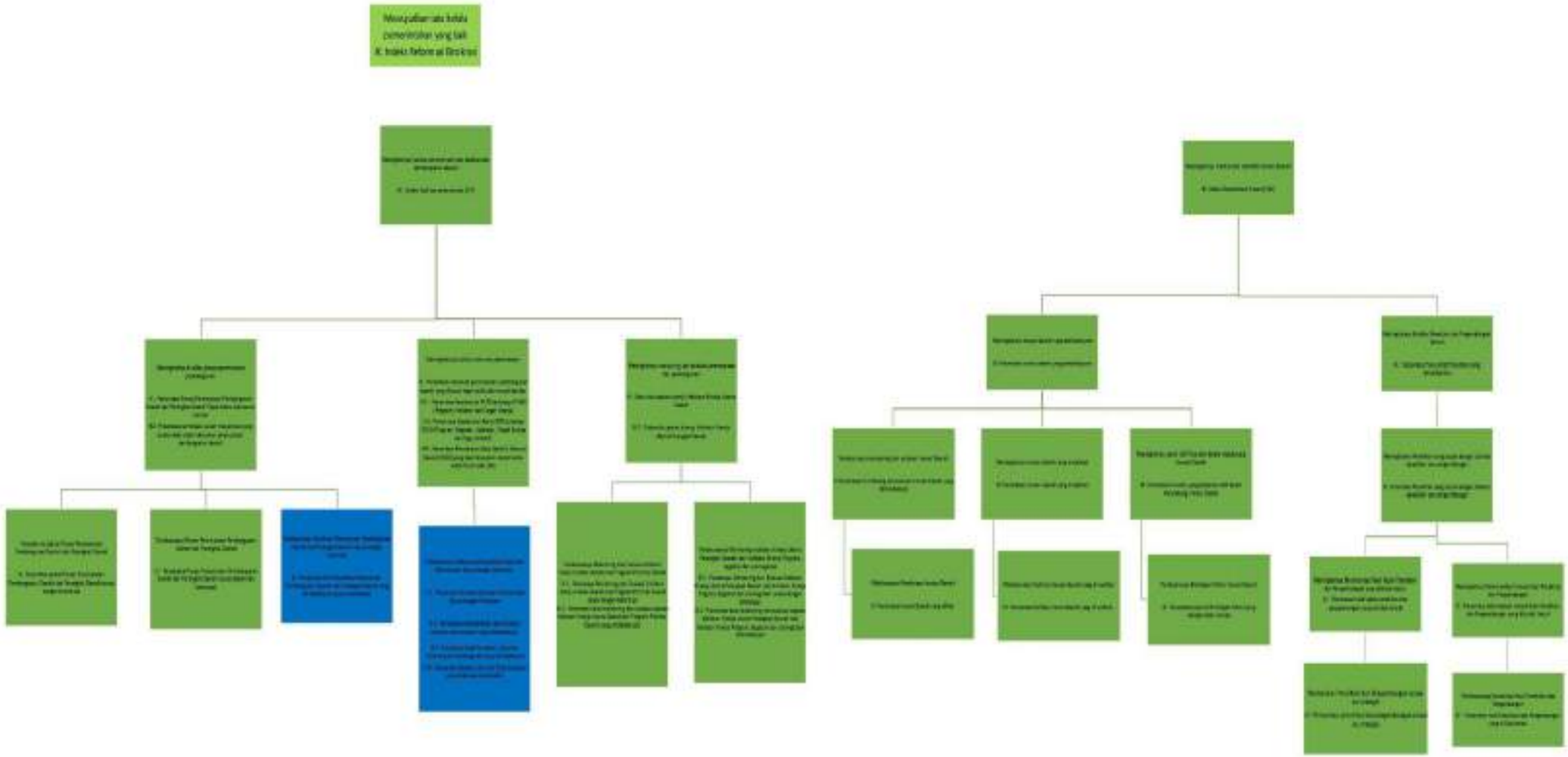

LAMPIRAN 10. MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAN CAPAIAN KINERJA TW I - III TAHUN 2023

MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2023

[illegible]

No	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota / Unit Kerja Tahun 2024-yang Berkenaan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja IKPA 2023 yang Berkenaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Sampai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s.d. Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s.d. tahun 2023 (%)		Unit Penanggung Jawab
							I			II			III														
																			Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan (%)								
																			Predikat Kinerja dan Keuangan								
5		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
																			Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan (%)								
																			Predikat Kinerja dan Keuangan								
																			Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan (%)								
																			Predikat Kinerja dan Keuangan								
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	[illegible]																						
7		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																					
19		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
20		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
21		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
22		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
23		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
																			Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan (%)								
																			Predikat Kinerja dan Keuangan								
5		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
																			Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan (%)								
																			Predikat Kinerja dan Keuangan								
5		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
24		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
																			Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan (%)								
																			Predikat Kinerja dan Keuangan								
																			Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan (%)								
																			Predikat Kinerja dan Keuangan								

No	Sasaran	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Kelompokan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Revisi (RKA) yang Direviasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja (RAK/DPA) yang Ditindaklanjuti			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan Lalu (2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s.d. Triwulan (2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pada Akhir Periode Rencana Kabupaten/Kota s.d. Triwulan (RPJPD)		Lain Permasalahan Jawab
							I			II			III													
		2.2.02 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	[illegible]	18	Paket	[illegible]	3	Paket	[illegible]	3	Paket	[illegible]	3	Paket	[illegible]	3	Paket	[illegible]	75,00	41,00	3	Paket	[illegible]	75,00	41,00	
			[illegible]	10	Paket		3	Paket		3	Paket		3	Paket		3	Paket		75,00		3	Paket				
			[illegible]	18	Paket		3	Paket		3	Paket		3	Paket		3	Paket		75,00		3	Paket				
			[illegible]	10	Paket		3	Paket		3	Paket		3	Paket		3	Paket		75,00		3	Paket				
2		2.2.02.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah	[illegible]	10	Paket	43,72,00	2	Paket	41,12,00	3	Paket	[illegible]	3	Paket	[illegible]	3	Paket	[illegible]	75,00	48,00	3	Paket	[illegible]	75,00	48,00	3 Paket
			[illegible]	10	Paket		24	Paket		3	Paket		3	Paket		3	Paket		75,00		3	Paket				
27		2.2.02.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	[illegible]	1	Dokumen	[illegible]	1	Dokumen	[illegible]	1	Dokumen	[illegible]	-	Dokumen	[illegible]	100	41,00	1	100	[illegible]	100	41,00	
28		2.2.02.2.01.02 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dibekali Fasilitasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3	Perangkat Daerah	[illegible]	3	Perangkat Daerah	[illegible]	3	Perangkat Daerah	[illegible]	3	Perangkat Daerah	[illegible]	3	Perangkat Daerah	[illegible]	100,00	46,27	3	Perangkat Daerah	[illegible]	100,00	46,27	
29		2.2.02.2.01.03 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Produksi Hasil Bidang Pemerintahan	1	laporan	[illegible]	1	laporan	[illegible]	1	laporan	[illegible]	1	laporan	[illegible]	1	laporan	[illegible]	100,00	46,00	1	laporan	[illegible]	100,00	46,00	
30		2.2.02.2.01.05 Koordinasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Wilayah dan Koordinasi Pelaksanaan RKPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Wilayah dan Koordinasi Pelaksanaan RKPD, RPJMD dan RKPD	1	Dokumen	[illegible]	1	Dokumen	[illegible]	1	Dokumen	[illegible]	1	Dokumen	[illegible]	-	Dokumen	[illegible]	100	45,71	1	Dokumen	[illegible]	100	45,71	
31		2.2.02.2.01.06 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Kawasan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dalam Penyusunan Rencana Bidang Pembangunan Kawasan	3	Perangkat Daerah	[illegible]	3	Perangkat Daerah	[illegible]	3	Perangkat Daerah	[illegible]	3	Perangkat Daerah	[illegible]	3	Perangkat Daerah	[illegible]	100,00	37,11	3	Perangkat Daerah	[illegible]	100,00	37,11	
32		2.2.02.2.01.07 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Kawasan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang [illegible]	1	laporan	[illegible]	1	laporan	[illegible]	1	laporan	[illegible]	1	laporan	[illegible]	1	laporan	[illegible]	100,00	47,11	1	laporan	[illegible]	100,00	47,11	
																			Rata-rata Capaian Kinerja Dok Kegiatan (%)		100,00	42,22						
																			Prosentase Kinerja Sub Kegiatan		1	50						
33		2.2.02.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen rekomendasi penyusunan perencanaan Bidang Pemerintahan yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	10	Paket	[illegible]	2,5	Paket	[illegible]	2,5	Paket	[illegible]	2,5	Paket	[illegible]	2,5	Paket	[illegible]	75,00	51,48	2,5	Paket	[illegible]	75,00	51,48	3 Paket
34		2.2.02.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Disusun Berpedoman (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	[illegible]	1	Dokumen	[illegible]	1	Dokumen	[illegible]	1	Dokumen	[illegible]	1	Dokumen	[illegible]	100,00	42,00	1	Dokumen	[illegible]	100,00	42,00	
35		2.2.02.2.02.02 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dalam Penyusunan Rencana Bidang Pemerintahan	10	Perangkat Daerah	[illegible]	10	Perangkat Daerah	[illegible]	10	Perangkat Daerah	[illegible]	10	Perangkat Daerah	[illegible]	10	Perangkat Daerah	[illegible]	100,00	46,00	10	Perangkat Daerah	[illegible]	100,00	46,00	
36		2.2.02.2.02.03 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana Bidang Pemerintahan	10	Perangkat Daerah	[illegible]	10	Perangkat Daerah	[illegible]	10	Perangkat Daerah	[illegible]	10	Perangkat Daerah	[illegible]	10	Perangkat Daerah	[illegible]	100,00	41,00	10	Perangkat Daerah	[illegible]	100,00	41,00	
																			Rata-rata Capaian Kinerja Dok Kegiatan (%)		100,00	46,22						
																			Prosentase Kinerja Sub Kegiatan		10	50						
37		2.2.02.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pendapatan	Dokumen rekomendasi penyusunan perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pendapatan yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	10	Paket	[illegible]	2,5	Paket	[illegible]	2,5	Paket	[illegible]	2,5	Paket	[illegible]	2,5	Paket	[illegible]	75,00	42,44	2,5	Paket	[illegible]	75,00	42,44	Kebutuhan Infrastruktur
38		2.2.02.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Disusun Berpedoman (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	[illegible]	1	Dokumen	[illegible]	1	Dokumen	[illegible]	1	Dokumen	[illegible]	1	Dokumen	[illegible]	100,00	41,71	1	Dokumen	[illegible]	100,00	41,71	
39		2.2.02.2.03.02 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dalam Penyusunan Rencana Bidang Infrastruktur	11	Perangkat Daerah	[illegible]	11	Perangkat Daerah	[illegible]	11	Perangkat Daerah	[illegible]	11	Perangkat Daerah	[illegible]	11	Perangkat Daerah	[illegible]	100,00	42,00	11	Perangkat Daerah	[illegible]	100,00	42,00	
40		2.2.02.2.03.03 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana Bidang Infrastruktur	11	Perangkat Daerah	[illegible]	11	Perangkat Daerah	[illegible]	11	Perangkat Daerah	[illegible]	11	Perangkat Daerah	[illegible]	11	Perangkat Daerah	[illegible]	100,00	41,00	11	Perangkat Daerah	[illegible]	100,00	41,00	
																			Rata-rata Capaian Kinerja Dok Kegiatan (%)		100,00	42,00						
																			Prosentase Kinerja Sub Kegiatan		11	50						
																			Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		100,00	42,22						
																			Prosentase Kinerja Kegiatan		77	50						

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Capaian Kinerja dan Anggaran Awal Tahun Berjalan sebelum Cross Cutting OPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Cross Cutting OPD yang dievaluasi			Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Cross Cutting OPD yang dievaluasi (Akhir Tahun Ke-1) (%)		Capaian Kinerja dan Anggaran Terakhir Periode Jangka Menengah/Renstra s.d. Tahun (2021)			Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Terakhir Periode Jangka Menengah/Renstra s.d. Tahun (2021) (Akumulasi Ke-1 s.d. Akhir Ke-1) (%)		Ket. Perubahan Target
							I			II			III														
I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
II		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
III		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
																			Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran (%)								
																			Predikat Kinerja dan Anggaran								
II		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
III		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
																			Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran (%)								
																			Predikat Kinerja dan Anggaran								
IV		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
V		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
VI		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
																			Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran (%)								
																			Predikat Kinerja dan Anggaran								
																			Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran (%)								
																			Predikat Kinerja dan Anggaran								
					[illegible]		[illegible]			[illegible]			[illegible]				[illegible]						[illegible]			
[illegible]																			[illegible]								
[illegible]																			[illegible]								

[illegible]

LAMPIRAN 11. MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAN CAPAIAN KINERJA TW IV TAHUN 2023

MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2023

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2023 yang dimasukan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (RKPD 2023 yang dimasukan			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pemda - Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s.d. Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s.d. Tahun 2023 (%)		Uraian Permasalahan Kendala
1	2	3	4	7			11			12			13 = (12/7x100)		14 = (11)			15 = (13)		16
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya capaian LAKIP Kabupaten Tapin dan meningkatnya Reform Birokrasi Pemerintah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Meningkatnya kinerja OPD dan dan [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
	Meningkatnya kualitas [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
	Meningkatnya Pengawasan [illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
2		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
3		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
													Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	[illegible]						
													Realisasi Kinerja Sub Kegiatan	[illegible]						
5		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
6		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
													Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	[illegible]						
													Realisasi Kinerja Sub Kegiatan	[illegible]						
10		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
12		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2021 yang Berikutnya)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (RPK 2021 yang Berikutnya)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s.d. Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s.d. Akhir 2021 (%)		Ada Permasalahan Kendala
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD 2023 yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s.d. Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s.d. tahun 2023 (%)		Unit Penanggung Jawab
			[illegible]	[illegible]	Persen		[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	Persen		[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	1	Laporan	[illegible]	1	Laporan			Laporan		[illegible]	[illegible]	[illegible]	Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	1	Dokumen	[illegible]	[illegible]	Dokumen	[illegible]	1	Dokumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	Dokumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
												[illegible]	[illegible]	[illegible]						
												[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	Persen	[illegible]	[illegible]	Persen	[illegible]	[illegible]	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	Persen		[illegible]	[illegible]												
[illegible]		[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
												[illegible]	[illegible]	[illegible]						
												[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	%		[illegible]	[illegible]												
[illegible]		[illegible]	[illegible]	1	Laporan	[illegible]	[illegible]	Laporan	[illegible]	[illegible]	Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	Laporan	[illegible]	[illegible]	Laporan	[illegible]	1	Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
												[illegible]	[illegible]	[illegible]						
												[illegible]	[illegible]	[illegible]						
												[illegible]	[illegible]	[illegible]						
												[illegible]	[illegible]	[illegible]						

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan 2023 yang dibahas			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (RKPD) 2023 yang dicermati			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s.d. Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s.d. tahun 2023 (%)		Uraian Permasalahan Jawab
1	Meningkatnya kualitas sarana prasarana	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
	Meningkatnya [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
	Meningkatnya [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
2		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2023) yang dikinerjakan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (SKPD) 2023 yang diverifikasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s.d. Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s.d. tahun (2023 (%)		Permasalahan Lainnya
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]			
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]			
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]			
27		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
28		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
29		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
30		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
31		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
32		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]													[illegible]	[illegible]							
[illegible]													[illegible]	[illegible]							

No	Sasaran	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan 2021 yang dirubah			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2021 yang dirubah			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s.d. Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s.d. tahun 2021 (%)		Unit Penanggung Jawab
11		1.01.01.2.02 Kegiatan Pemetaan Dibidang Pendidikan dan SDA (Sentuh Bapa Alam)	Persentase Hasil Kunjungan Pemetaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Dibidang Ekonomi yang dilaksanakan	100	Persen	125,00,00,000	100	Persen	100,700,000	100	Persen	100,700,000	00.00	80.71	100	Persen	100,700,000	100.00	80.70	JF Pemetaan Ekonomi
			Persentase Kegiatan Sekretariat Pelaksanaan perangkat daerah dibidang ekonomi Cukup dengan Administrasi	100	Persen		100			100	0		00.00		100	0.00		100.00		
			Persentase Pelaksanaan Hasil Pemetaan, ekonomi pemerintahan perangkat daerah dibidang ekonomi yang dilaksanakan	100	Persen		100			100	0		00.00		100	0.00		100.00		
			Persentase Hasil Kunjungan Pelaksanaan Pembangunan perangkat daerah dibidang ekonomi yang dilaksanakan	100	Persen		100			100	0		00.00		100	0.00		100.00		
			Persentase Dokumentasi Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Pertama Program kegiatan dan sub kegiatan di bidang ekonomi cukup dengan administrasi	100	Persen		100			100	0		00.00		100	0.00		100.00		
			Persentase Kesesuaian dan Analisa capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibidang ekonomi dilaksanakan	100	Persen		100			100	0		00.00		100	0.00		100.00		
12		1.01.01.2.03 Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemetaan Pembangunan Daerah Dibidang Pendidikan (KEVIT) (E-RKL dan SEPO)	Jumlah Dokumen Pemetaan Pembangunan Daerah Dibidang Pendidikan yang (Mendata Pelaksanaan KEVIT, SEPO dan RPPD)	1	Dokumen	125,00,00,000	1	Dokumen	111,870,000	1	Dokumen	111,870,000	00.00	89.11	1	Dokumen	111,870,000	100.00	89.11	
13		1.01.01.2.05 Kegiatan Pengkajian Dampak Pemetaan Pembangunan Daerah Dibidang Pendidikan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Kunjungan dalam Pelaksanaan Manual/Rencana Dibidang Pendidikan	10	Perangkat Daerah	10,700,000	8	Perangkat Daerah	7,100,000	10	Perangkat Daerah	10,000,000	00.00	80.00	10	Perangkat Daerah	10,000,000	100.00	80.00	
14		1.01.01.2.06 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Pembangunan Daerah Dibidang Pendidikan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Pelaksanaan Rencana/Renja Dibidang Pendidikan	10	Perangkat Daerah	40,000,000	10	Perangkat Daerah	37,000,000	10	Perangkat Daerah	37,000,000	00.00	94.00	10	Perangkat Daerah	37,000,000	100.00	94.00	
													Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		00.00	85.48						
													Realisasi Kinerja Sub Kegiatan		12	1						

No	Sasaran	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan 2021 yang Ditetapkan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja (KPA) 2021 yang dicatatkan			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s.d. Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s.d. tahun 2021 (%)		Unit Penanggung Jawab
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]													[illegible]	[illegible]						
[illegible]													[illegible]							
[illegible]													[illegible]							
[illegible]													[illegible]							
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]		
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]		
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]													[illegible]	[illegible]						
[illegible]													[illegible]							

No	Sasaran	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ba (plus 2023) yang ditentukan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja (RPD) 2023 yang ditentukan			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s.d. Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s.d. Tahun 2023 (%)		Isu Penanggung Jawab
14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
30		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Data rek. Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)													[illegible]	[illegible]						
Predikat Kinerja Sub Kegiatan													[illegible]	[illegible]						
31		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]				
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]				
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]				
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]				
33		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
34		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
35		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Data rek. Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)													[illegible]	[illegible]						
Predikat Kinerja Sub Kegiatan													[illegible]	[illegible]						
Data rek. Capaian Kinerja Kegiatan (%)													[illegible]	[illegible]						
Predikat Kinerja Kegiatan													[illegible]	[illegible]						
[illegible]					[illegible]			[illegible]									[illegible]			
DATA DATA UNTUK KHUSUS DAN DELIBERIN PROGRAM DAN ANGGARAN PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...													[illegible]	[illegible]						
PERDAGI DAN DAN DELIBERIN PROGRAM PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...													[illegible]	[illegible]						

Kepala Bappelitbang,

Dr. H. [illegible], S.E., M.E.
NIP. 196[illegible]

LAMPIRAN 12. MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAN EVALUASI TRIWULAN I, II, III DAN IV KINERJA BAPPELITBANG TAHUN 2023

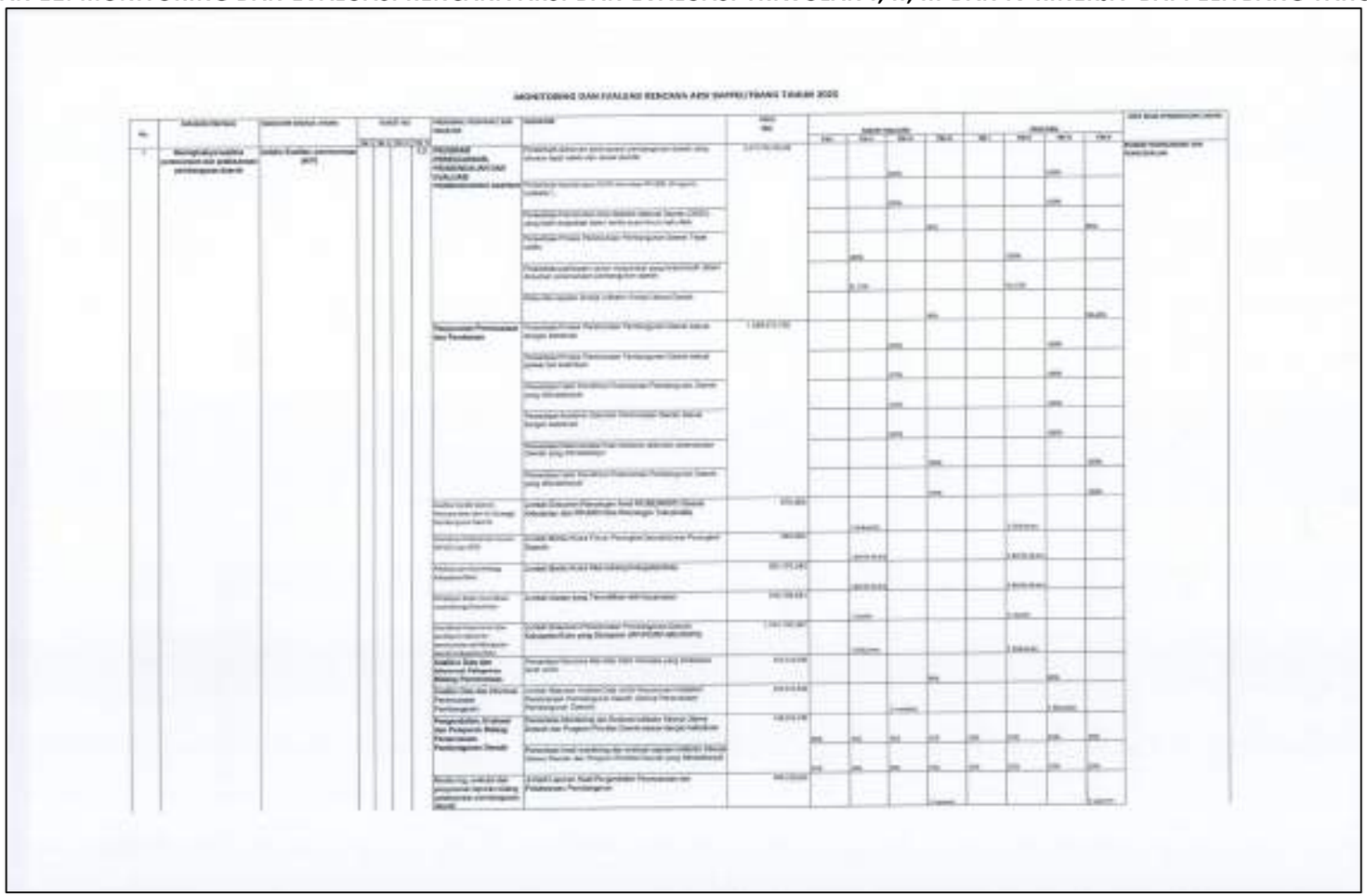

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI BAPPELITBANG TAHUN 2023

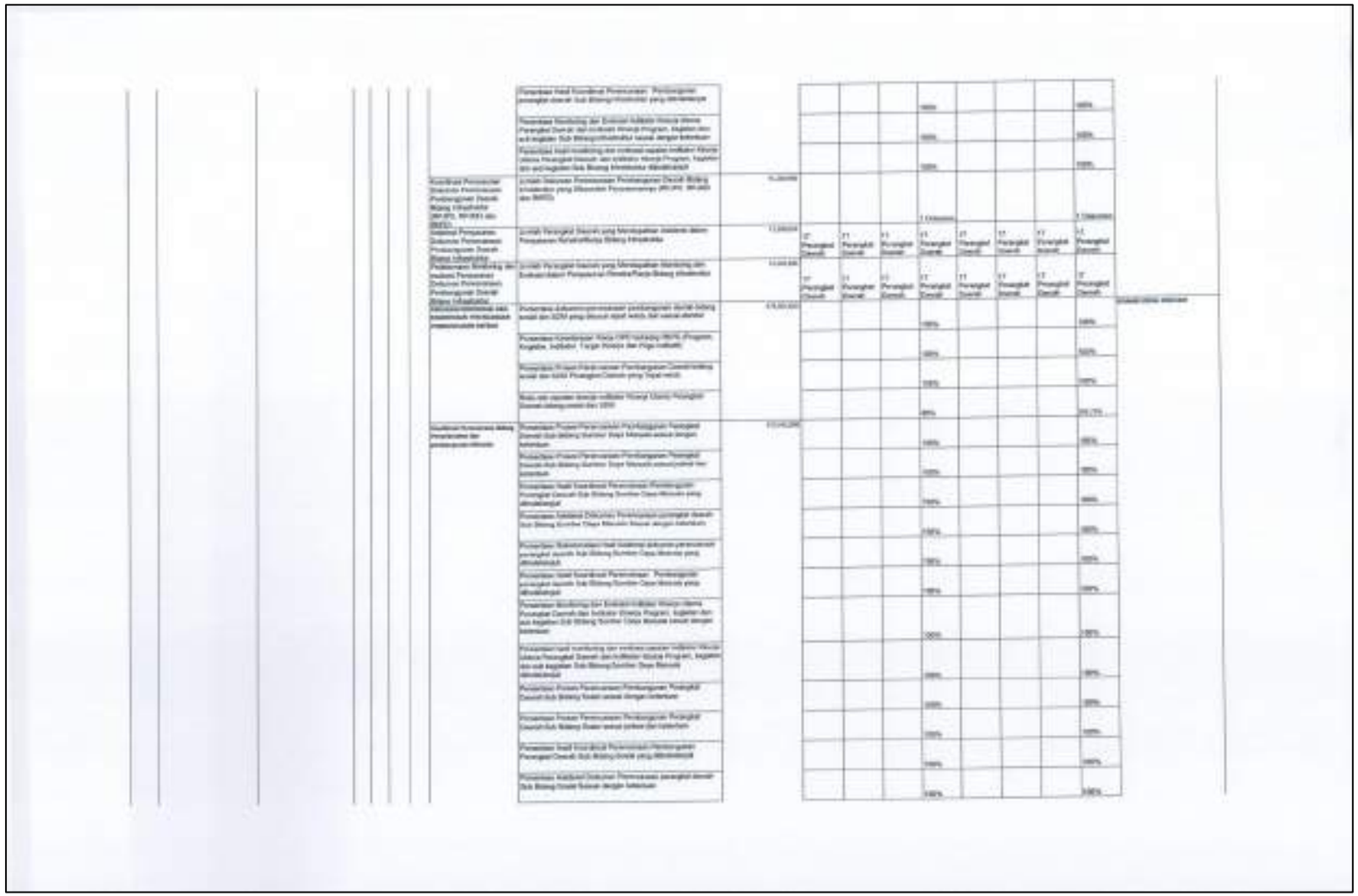

| | | |

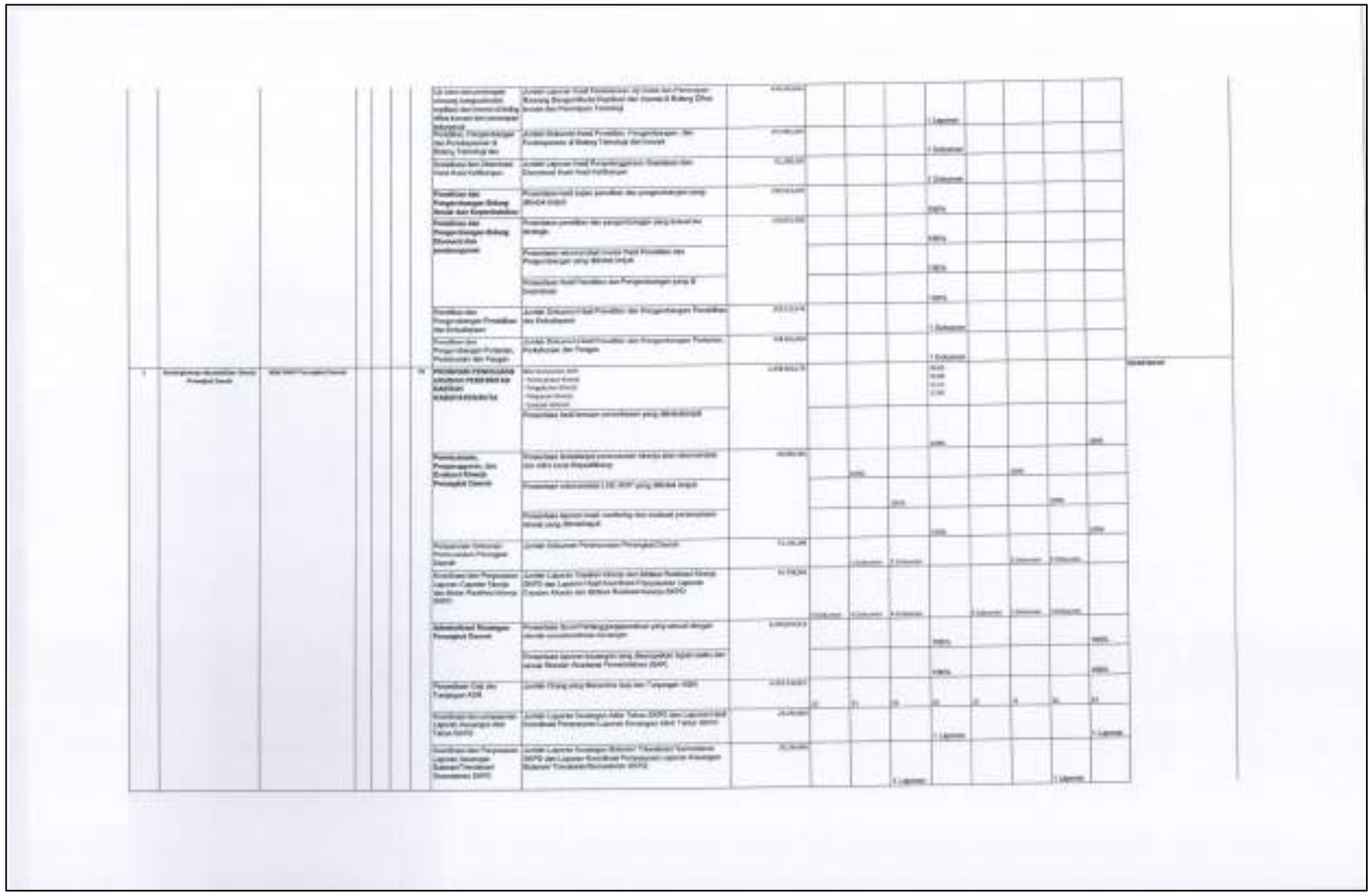

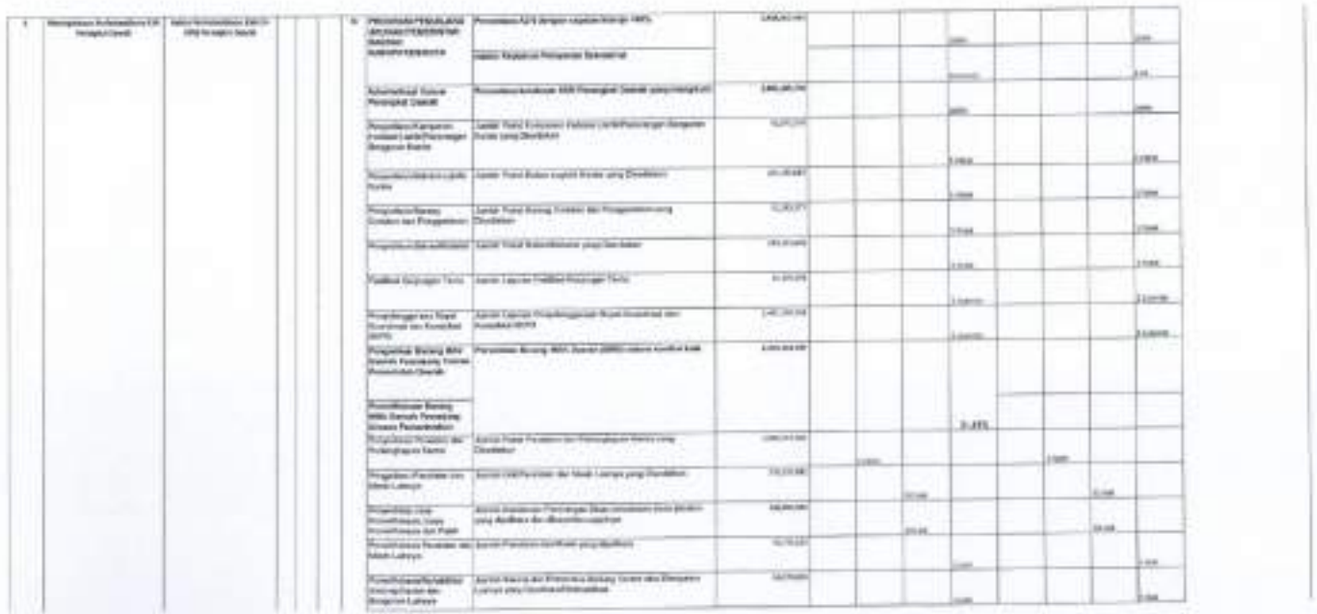

LAMPIRAN 13. DATA DUKUNG PELAKSANAAN MONITORING RENCANA AKSI DAN EVALUASI DAN EVALUASI KINERJA BAPPELITBANG TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31688 Fax. (0517) 32241
RANTAU Kode Pos : 71114

Nomor : 050 / 112 - Setrt/Bappelitbang
Lampiran : -
Perihal : Rapat Intern

Rantau, 30 Maret 2023

Kepada Yth Bapak/Ibu:
1. Sekretaris Bappelitbang
2. Kabid Bappelitbang
3. Kasubbag Bappelitbang
4. Pejabat Fungsional Bappelitbang
5. Staf Bappelitbang

di –
Tempat

Sehubungan dengan berakhirnya triwulan I tahun 2023, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat berhadir dalam acara yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Senin/ 3 April 2023
Waktu : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Aula Bappelitbang Lantai II
Agenda : **Monev Renaksi dan Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2023**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala
Dr. H. Jakpar Adji, ST., MT.
NIP. 19690214 199403 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31688 Fax. (0517) 32241
RANTAU Kode Pos : 71114

Berita Acara Notulensi

Hari, Tanggal : Senin, 3 April
Pukul : 09:00 WITA s/d selesai
Tempat : Aula Bappelitbang Lantai II
Agenda : Monev Renaksi dan Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2023

Sehubungan dengan telah berakhirnya Triwulan I Tahun Anggaran 2023, maka dengan maksud untuk melakukan pemantauan terkait serapan anggaran dan juga proses pelaksanaan kegiatan Bappelitbang, maka dengan ini Kepala Bappelitbang melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Bappelitbang mengundang Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf untuk kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi dan juga kinerja per triwulan I Tahun Anggaran 2023.

Diketahui bahwa pada triwulan ke I ini belum banyak program dan kegiatan yang berjalan karena banyak yang masih berada dalam tahap perencanaan teknis pelaksaan kegiatan. Salah satu kegiatan yang sudah mulai berjalan adalah Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang bertugas dalam melakukan pelaporan wajib seperti dokumen LKPJ, LPPD dan LPPD. Selain itu masih juga berkaitan dengan kegiatan perencanaan dimana Bidang EKOIN dan Bidang Sosbud diharapkan untuk dapat melakukan Koordinasi, Asistensi dan Monitoring dengan baik terhadap mitra bidangnya terkait dengan proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Rankal Renja) OPD yang sedang berproses.

Kepada Badan dan Sekretaris menghimbau kepada seluruh PPTK untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatannya agar dapat diselesaikan tepat waktu. Terutama dengan triwulan II yang biasanya terisi dengan banyak kegiatan besar seperti pelaksanan Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Forum Konsultasi Publik. Diharapkan kegiatan tersebut direncanakan dengan sebaik mungkin mengingat besarnya output pelaksanaan kegiatan tersebut dalam perencanaan pembangunan daerah.

Notulis,

M. Rizkie L.H

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 21508 Fax. (0517) 22241
MANTAU
Kode Pos : 71119

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Senin, 3 April 2023
PUKUL : 09.00 s/d Selesai
TEMPAT : Aula Perencanaan Bappelitbang
AGENDA : Monev Realisasi dan Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	P/L	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]			[illegible]
22	[illegible]			[illegible]
23	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 21808 Fax. (0517) 32241
RANTAU Kode Pos : 71114

Nomor : 050 /ggl Sekrt/Bappelitbang
Lampiran : -
Perihal : Rapat Internal

Rantau, 3 Juli 2023

Kepada Yth Bapak/Ibu:
1. Sekretaris Bappelitbang
2. Kabid Bappelitbang
3. Kasubbag Bappelitbang
4. Pejabat Fungsional Bappelitbang
5. Staf Bappelitbang

di –
Tempat

Sehubungan dengan berakhirnya triwulan II tahun 2023, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat berhadir dalam acara yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 4 Juli 2024
Waktu : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Aula Bappelitbang Lantai II
Agenda : **Monev Renaksi dan Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2023**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala
BAPPELITBANG
Dr. H. Zainal Arifi, ST., MT.
NIP. 19690214 199403 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 21808 Fax. (0517) 32241
RANTAU Kode Pos : 71114

Berita Acara Notulensi

Hari, Tanggal : **Selasa, 4 Juli 2024**
Pukul : **09.00 WITA s/d selesai**
Tempat : **Aula Bappelitbang Lantai II**
Agenda : **Monev Renaksi dan Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2023**

Sehubungan dengan telah berakhirnya Triwulan II Tahun Anggaran 2023, maka dengan maksud untuk melakukan pemantauan terkait serapan anggaran dan juga proses pelaksanaan kegiatan Bappelitbang, maka dengan ini Kepala Bappelitbang melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Bappelitbang mengundang Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf untuk kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi dan juga kinerja per triwulan II Tahun Anggaran 2023.

Pada Triwulan II ini diketahui banyak kegiatan yang sudah mulai berjalan seperti Asistensi dan Monitoring oleh Mitra Bidang kepada SKPD, tidak banyak halangan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini. Namun, satu hal yang sedikit menjadi halangan adalah keterlambatan pengumpulan dokumen perencanaan kinerja oleh Mitra SKPD. Selain itu pada sub-kegiatan Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang mana target realisasi pada triwulan II ini adalah 4 dokumen namun telah menghasilkan 5 dokumen laporan, sehingga diharapkan juga untuk kegiatan lain untuk dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatannya.

Dengan terealisasinya sub kegiatan 1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah, 2) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD dan Lintas SKPD, 3) Pelaksanaan Musrenbang kab/Kota, 4) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dan 5) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota, yang mana output dari sub kegiatan tersebut adalah berita acara, rekapitulasi usulan dan dokumen yang diperlukan untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah. Mengingat sub kegiatan tersebut adalah pendukung pelaksanaan Program perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang memiliki indikator 1 yaitu Persentase dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar dan Indikator 2 yaitu Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD. Kepala Badan dan Sekretaris menghimbau untuk dapat segera menyelesaikan pelaksaan program ini mengingat sudah tersedianya data yang diperlukan dan pentingnya output yang dihasilkan dari pelaksanaan program ini untuk perencanaan pembangunan daerah.

Triwulan II ini adalah Triwulan yang memiliki kegiatan besar yang telah dengan sukses dilaksanakan seperti Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Forum konsultasi publik. Namun dengatkan kembali bahwa masih ada banyak kegiatan besar lain yang tidak kalah penting seperti contohnya pelaksanaan lomba inovasi yang diharapkan juga dapat direncanakan dengan baik.

Notulis,

M. Rizkie LH

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31588 Fax. (0517) 32241
RANTAU Kode Pos : 71114

Daftar Hadir

HARI / TANGGAL : Selasa 4 Juli 2023
PUKUL : 09.00 s/d Selesai
TEMPAT : Aula Perencanaan Bappelitbang
AGENDA : Monev Rencana dan Kinerja Triwulan II Tahun 2023

No	Nama	P/L	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. [illegible]	L	[illegible]	
2	[illegible]	L	[illegible]	
3				
4	[illegible]	P	[illegible]	
5	SITI [illegible]	P	STAF	
6	[illegible]	P	STAF	
7	M. [illegible]	L	[illegible]	
8	[illegible]	L	[illegible]	
9	[illegible]	L	[illegible]	
10	[illegible]	P	PTT	
11	[illegible]	P	PTT	
12	[illegible]	P	PTT	
13	[illegible]	L	PTT	
14	[illegible]	L	PTT	
15	[illegible]	L	[illegible]	
16	[illegible]	P	PTT	
17	[illegible]	L	[illegible]	
18	M. [illegible]	L	Bendahara	
19	[illegible]	L	PTT	
20	[illegible]	L	"	

SUDAH DIPERIKSA
Ortu PPK - SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31908 Fax. (0517) 32341
RANTAU Kode Pos : 71114

Nomor : 050 /Ppl- Sekrt/Bappelitbang
Lampiran : -
Perihal : Rapat Intern

Rantau, 2 Oktober 2023

Kepada Yth Bapak/Ibu :
1. Sekretaris Bappelitbang
2. Kabid Bappelitbang
3. Kasubbag Bappelitbang
4. Pejabat Fungsional Bappelitbang
5. Staf Bappelitbang

di –
Tempat

Sehubungan dengan berakhirnya triwulan III tahun 2023, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat berhadir dalam acara yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal	: Selasa / 3 Oktober 2023
Waktu	: 09.00 WITA s/d selesai
Tempat	: Ruang Data Bappelitbang
Agenda	: **Monev Renaksi Triwulan III Tahun Anggaran 2023**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dr. H. Muhammad Jaeris Prapoga, SE.ME
NIP. 19810522 100803 1 001

SALINAN DIPERIKSA
Oleh PPK - BKPD
NAMA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31908 Fax. (0517) 32341
RANTAU Kode Pos : 71114

Berita Acara Notulensi

Hari, Tanggal	**: Selasa, 3 Oktober 2023**
Pukul	**: 09:00 WITA s/d selesai**
Tempat	**: Ruang Data Bappelitbang**
Agenda	**: Monev Renaksi dan Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2023**

Sehubungan dengan telah berakhirnya Triwulan III Tahun Anggaran 2023, maka dengan maksud untuk melakukan pemantauan terkait serapan anggaran dan juga proses pelaksanaan kegiatan Bappelitbang, maka dengan ini Kepala Bappelitbang melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Bappelitbang mengundang Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf untuk kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi dan juga kinerja per triwulan III Tahun Anggaran 2023.

Agenda pertama dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi adalah pembahasan tentang realisasi Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah yang pada triwulan sebelumnya diharapkan untuk dapat selesai tepat waktu. Dan diketahui bahwa pelaksanaan program ini telah selesai tepat waktu dan menghasilkan output berupa dokumen perencanaan pemerintah daerah.

Dengan telah dilaksanakan beberapa rapat perihal asistensi pohon kinerja dan cascading SKPD, maka Bappelitbang telah melakukan beberapa perubahan dalam Perjanjian Kerja (PK) Bappelitbang Tahun 2023 yang sebelumnya sudah ditandatangi, maka dengan perubahan Perjanjian Kinerja (PK) juga ada perubahan untuk beberapa Indikator Kinerja untuk Pejabat eselon II, Eselon III, Pejabat Fungsional dan Staf. Seluruh pegawai Bappelitbang diharapkan untuk dapat memahami peran, tanggung jawab dan kinerja yang harus dilaksanakan.

Perubahan Indikator Kinerja pada Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan Pejabat Fungsional

KEPALA			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas perencanaan (IKP)	3,2
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Governance Award (IGA)	65
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75
4.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	75
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU
1.	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP: - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal	24,80 25,80 11,55 17,85
2.	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%
4.	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Score 4.0
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU
1.	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Policy Brief Penelitian yang disosialisasikan	100%
2.	Meningkatnya Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan	Persentase Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan	100%
3.	Meningkatnya inovasi daerah yang berkelanjutan	Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan	70%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial dan SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
		Persentase Konsistensi Renja OPD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)	100%
2.	Meningkatnya proses perencanaan pembangunan	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM yang Tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM	80%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
2.	Meningkatnya proses perencanaan pembangunan	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat waktu	100%
3.		Persentase konsistensi RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator dan Target Kinerja)	100%
4.		Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang telah disepakati dalam forum acara forum satu data	80%
5.	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	80%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
		Persentase Konsistensi Renja OPD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)	100%
2	Meningkatnya proses perencanaan pembangunan	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Tepat waktu	100%
3	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	80%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU
1	Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100%
2	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	31,45%
3	Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang memfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik	100%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atau rekomendasi dari rutin kerja Bappelitbang	100%
2.	Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100%
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU
1.	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Nilai Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU
1.	Meningkatnya peran aktif Inovator dalam mendukung Inovasi Daerah	Persentase Inovator yang berperan aktif dalam mendukung Inovasi Daerah	24,34%
2.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Inovasi Daerah	Persentase peserta Bimbingan Teknis yang menghasilkan Inovasi	85%
3.	Melaksanakan fasilitasi Inovasi daerah yang di replikasi	Persentase fasilitasi inovasi daerah yang di replikasi	100%
4.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi inovasi Daerah	Persentase monitoring dan evaluasi inovasi daerah yang ditindaklanjuti	73,61%
5.	Melaksanakan Pembinaan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi Daerah yang dibina	100%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU
1.	Meningkatnya Rekomendasi Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti	100%
2.	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan yang sesuai isu strategis	Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu strategis	60%
3.	Meningkatnya Rekomendasi Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti	50%
4.	Terlaksananya Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Diseminasi	100%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU
1.	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan	100%
2.	Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai jadwal dan ketentuan	100%
3.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%
4.	Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sosial Sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%

		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%
5.	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sosial ditindaklanjuti	100%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU
1.	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan	100%
2.	Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai jadwal dan ketentuan	100%
3.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%
4.	Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia Sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%
5.	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Manusia ditindaklanjuti	100%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU
1.	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	100%
2.	Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai jadwal dan ketentuan	100%
3.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%

4.	Terlaksanaya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi Sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%
5.	Terlaksanaya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Ekonomi ditindaklanjuti	100%
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET RKU**
1.	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan	100%
2.	Terlaksanaya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai jadwal dan ketentuan	100%
3.	Terlaksanaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%
4.	Terlaksanaya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur Sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%
5.	Terlaksanaya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Infrastruktur ditindaklanjuti	100%
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET RKU**
1.	Terlaksanaya Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah sesuai dengan ketentuan	100%

2.	Program Prioritas Daerah	Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah yang ditindaklanjuti	100%
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET**
1.	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan	100%
2.	Terlaksanaya Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai jadwal dan ketentuan	100%
3.	Terlaksanaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	100%
4.	Terlaksanaya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan Daerah Sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan Daerah yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	100%
5.	Terlaksanaya rencana aksi Satu Data Indonesia yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Persentase Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang terlaksana tepat waktu	80%

Perubahan Indikator Kinerja Individu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
2.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 laporan
1.	Terwujudnya Disi dan Tertibnya ASN	Jumlah Orang yang Monitoring Disi dan Tertibnya ASN	22 Orang
1.	Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
2.	Terwujudnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
1.	Terwujudnya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2.	Terwujudnya Paket Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
3.	Terwujudnya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
4.	Terwujudnya Paket Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan	1 Paket
5.	Terwujudnya Laporan Verifikasi Keuangan Tahun	Jumlah Laporan Verifikasi Keuangan Tahun	1 Laporan

4.	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
1.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
2.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
3.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
1.	Tersedianya Paket Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2.	Tersedianya Unit Pemeliharaan dan Mesin	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit
3.	Terpeliharanya dan terrehabilitasinya gedung kantor/ruang/ruang dinas/pos kantor/ruang dinas jabatan	Jumlah Kantor/ruang/ruang Dinas kantor/ruang dinas jabatan yang dipelihara dan direhabilitasi	10 Unit
4.	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	1 Unit
5.	Terlaksanaya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
2.	Terfasilitasinya Aspirasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi Aspirasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah
3.	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
2.	Terfasilitasinya Aspirasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana/Kerja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Memfasilitasi Aspirasi dalam Penyusunan Rencana/Kerja Bidang Pembangunan Manusia	9 Perangkat Daerah
3.	Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana/Kerja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Memfasilitasi Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana/Kerja Bidang Pembangunan Manusia	9 Perangkat Daerah
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
2.	Terfasilitasinya Aspirasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana/Kerja Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Memfasilitasi Aspirasi dalam Penyusunan Rencana/Kerja Bidang Infrastruktur	17 Perangkat Daerah
3.	Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana/Kerja Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Memfasilitasi Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana/Kerja Bidang Infrastruktur	17 Perangkat Daerah
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
2.	Terfasilitasinya Aspirasi Perangkat	Jumlah Perangkat Daerah yang Memfasilitasi Aspirasi dalam	11 Perangkat

	Daerah dalam Penyusunan Rencana/Kerja Bidang Perekonomian	Penyusunan Rencana/Kerja Bidang Perekonomian	Daerah
3.	Terlaksanaya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana/Kerja Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Memfasilitasi Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana/Kerja Bidang Perekonomian	10 Perangkat Daerah
1.	Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan dan RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan dan RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen
2.	Tersedianya Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara
3.	Tersedianya Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara
4.	Tersedianya Usulan yang Terverifikasi oleh Konsultan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Konsultan	1 Usulan
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Diintegrasi (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Diintegrasi (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen
4.	Tersedianya Manskah Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Sesuai Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Manskah Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Sesuai Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Manskah
1.	Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan
2.	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan
1.	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Rapihkan dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Rapihkan dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan
2.	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen
3.	Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan
1.	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen
2.	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen

Mengetahui,

M. Rizkie L.H

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31598 Fax. (0517) 32241

RANTAU Kode Pos : 71514

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Selasa, 3 Oktober 2023
PUKUL : 09.00 s/d Selesai
TEMPAT : Ruang Data Bappelitbang
AGENDA : Monev Realisasi dan Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1.	Mery H Pasa	Bappelitbang	L	
2.				
3.	Zaitsman Rahmi	Bappelitbang	L	
4.	M. Khair Rani	"	L	
5.	Anwar Yamin	"	L	
6.	Mardiati	"	P	
7.	ARIF R.D	"	L	
8.	Eli Seni A.Ma.Pd	"	P	
9.	Ray Mayriati	"	P	
10.	Ahor Hawyat	Bappelitbang	L	
11.	[illegible]	Bappelitbang	L	
12.	M. Wan Zamhari	— " —	L	
13.	Angga Pranata	— " —	L	
14.	[illegible]	— " —	P	
15.	Riyan Aprianto	— " —	L	
16.	Cok Rosian	— " —	L	
17.	[illegible]	— " —	P	
18.	Ryan Sri Cahyana W	— " —	P	
19.	M. Sahri Ramadhan	— " —	L	
20.	[illegible]	— " —	P	
21.	Ruspin Noor	Bappelitbang	L	
22.	Lili D	"	P	

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31608 Fax. (0517) 32341
RANTAU Kode Pos : 71114

Nomor : 000.1.3.4/06- Sekret/Bappelitbang
Lampiran : -
Perihal : Rapat Rutin

Rantau, 4 Januari 2024

Kepada Yth Bapak/Ibu:
1. Sekretaris Bappelitbang
2. Kabid Bappelitbang
3. Kasubbag Bappelitbang
4. Pejabat Fungsional Bappelitbang
5. Staf Bappelitbang

di –
Tempat

Sehubungan dengan berakhirnya triwulan IV tahun 2023, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat berhadir dalam acara yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 9 Januari 2024
Waktu : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Aula Bappelitbang Lantai II
Agenda : **Monev Renaksi Triwulan IV Tahun Anggaran 2023**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Dr. H. Muhyiddinnur Prayoga, SE.ME
NIP. 19680622 100803 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31608 Fax. (0517) 32341
RANTAU Kode Pos : 71114

Daftar Hadir

HARI / TANGGAL : Senin, 8 Januari 2024
PUKUL : 09.00 s/d Selesai
TEMPAT : Aula Perencanaan Bappelitbang
AGENDA : Monev Renaksi dan Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2023

No	Nama	P/L	Jabatan	Tanda Tangan
1	[illegible]	L	[illegible]	
2				
3	ANSHAR T	L	Kabid CT	
4	[illegible]	L	[illegible]	
5	[illegible]	P	[illegible]	
6	ARIF R.D	L	[illegible]	
7	[illegible]	P	[illegible]	
8	[illegible]	L	[illegible]	
9	[illegible]	L	[illegible]	
10	[illegible]	L	[illegible]	
11	[illegible]	L	[illegible]	
12	[illegible]	L	[illegible]	
13	[illegible]	L	[illegible]	
14	[illegible]	P	[illegible]	
15	[illegible]	P	[illegible]	
16	[illegible]	P	[illegible]	
17	[illegible]	L	[illegible]	
18	[illegible]	L	[illegible]	
19	[illegible]	P	[illegible]	
20	[illegible]	L	[illegible]	

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31500 Fax. (0517) 32041
RANTAU Kode Pos : 71114

Berita Acara Notulensi

Hari, Tanggal : Selasa, 8 Januari 2024
Pukul : 09:00 WITA s/d selesai
Tempat : Aula Perencanaan Bappelitbang
Agenda : Monev Renaksi dan Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2023

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2023, maka dengan maksud untuk melakukan pemantauan terkait serapan anggaran dan kinerja Bappelitbang Tahun Anggaran 2023, maka dengan ini Bappelitbang melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan rapat monitoring evaluasi renaksi dan kinerja Bappelitbang Triwulan IV Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan rapat ini dimulai dengan sambutan dari Kepala Badan yang bertemu kasih kepada seluruh PPTK atas kinerjanya tahun 2023. Kepala Badan menyampaikan bahwa dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 maka muncul kewajiban baru yaitu pelaporan pelaksanaan kegiatan. Maka dengan ini Kepala Badan meminta kepada seluruh PPTK untuk dapat menyampaikan data serapan anggaran dan realisasi kinerja untuk semua pelaksanaan kegiatan di tahun 2023.

Diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Utama Bappelitbang berada pada kategori memuaskan dengan nilai 86,66%. Namun Kepala Badan mengajak semua pegawai untuk melakukan evaluasi terkait capaian mana saja yang harus ditingkatkan untuk periode tahun 2024. Dimana Indikator Kinerja Utama Kepala Badan ke-1 yaitu Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) telah dapat memenuhi target realisasinya yaitu skor 7,2. Namun ada 3 indikator lain yang masuk dalam kategori baik namun belum dapat memenuhi target yang sebelumnya ditetapkan. Yaitu Indikator ke 2 Indeks Government Award yang awalnya telah dilakukan penilaian mandiri dan mendapatkan skor 67 yang mana skor tersebut sda diatas target namun ternyata hasil evaluasi dari kemendagri menunjukkan bahwa skor yang didapatkan adalah 52,94 sehingga capaian untuk indikator ke 2 ini adalah 81,45%. Indikator Kinerja Utama ke 3 yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah mendapatkan skor 78,00 sehingga hampir memenuhi target yang ditetapkan yaitu Skor 79 dengan capaian untuk indikator ini adalah 98,98%. Dan untuk Indikator Kinerja ke – 4 yaitu Indeks Profesionalisme ASN mendapatkan skor 47,80 dari target yang ditetapkan yaitu Skor 70. Hal ini menjadi evaluasi bagi Kepala Badan dan seluruh pegawai Bappelitbang untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing agar dapat mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2024.

Dalam kegiatan ini juga dibahas terkait pencapaian / realisasi kinerja pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub kegiatan Bappelitbang bersama dengan seluruh Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional beserta dengan Staf. Data-data yang dibahas dalam kegiatan ini adalah data realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan seluruh pegawai Bappelitbang di tahun anggaran 2024.

Realisasi Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan Pejabat Fungsional Tahun Anggaran 2023

KEPALA					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas perencanaan (IKP)	7,2	7,2	100%
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas inovasi Daerah	Indeks Government Award (IGA)	65	52,94	81,46
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79	76,60	96,96
4.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	70	47,80	68,28
SEKRETARIS					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen LKIP: - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal	24,00 25,00 11,55 17,85	24,00 23,70 11,55 16,75	96,96%
2.	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >80%	100%	100%	100%

4.	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Score 4,0	Score 3,18	89%
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Policy Brief Penelitian yang dimanfaatkan	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan	Persentase Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya inovasi daerah yang berkelanjutan	Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan	70%	61,35%	87,64%
BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN SDM					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial dan SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%
		Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya proses perencanaan pembangunan	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM yang Tepat waktu	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM	80%	281,71 %	117,14 %
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya proses	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat waktu	100%	100%	100%

3.	perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator dan Target Kinerja)	100%	100%	100%
		Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang telah dimanfaat dalam bentuk [illegible]	80%	80%	100%
4.	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	80%	94,88%	118,52 %
BIDANG EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%
		Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)	100%	100%	100%
2	Meningkatnya proses perencanaan pembangunan	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Tepat waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	80%	131,48 %	164,23 %
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	31,40%	83,28%	264,80 %
3	Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik	100%	100%	100%
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET IKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%	100%	100%

	Kinerja Perangkat Daerah				
2.	Meningkatnya kualitas Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
SUB BAGIAN KEUANGAN					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET RKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	100%	100%
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET RKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Meningkatnya peran aktif Inovator dalam mendukung Inovasi Daerah	Persentase Inovator yang berperan aktif dalam mendukung Inovasi Daerah	24,54%	24,54%	100%
2.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Inovasi Daerah	Persentase peserta Bimbingan Teknis yang menghasilkan inovasi	99%	81,50%	85,78%
3.	Melaksanakan fasilitasi inovasi daerah yang di replikasi	Persentase fasilitasi inovasi daerah yang di replikasi	100%	100%	100%
4.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Inovasi Daerah	Persentase monitoring dan evaluasi inovasi daerah yang ditindaklanjuti	73,61%	73,61%	100%
5.	Melaksanakan Pembinaan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi Daerah yang dibina	100%	100%	100%
SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET RKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Meningkatnya Rekomendasi Hasil Kajian Penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
2.	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan yang sesuai ku	Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai ku strategis	60%	100%	166%

	strategis				
3.	Meningkatnya Rekomendasi Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti	50%	100%	100%
4.	Terlaksananya Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Diseminasi	100%	100%	100%
SUB BIDANG SOSIAL					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**	**TARGET RKU**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1.	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
2.	Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai jadwal dan ketentuan	100%	100%	100%
3.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.	Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sosial Sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5.	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sosial ditindaklanjuti	100%	100%	100%
SUB BIDANG SDM					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1.	Tersedianya Jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
2.	Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai jadwal dan ketentuan	100%	100%	100%
3.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.	Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia Sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5.	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Manusia ditindaklanjuti	100%	100%	100%

SUB BIDANG EKONOMI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1.	Tersedianya Jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
2.	Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai jadwal dan ketentuan	100%	100%	100%
3.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.	Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi Sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5.	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Ekonomi ditindaklanjuti	100%	100%	100%

SUB BIDANG INFRASTRUKTUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1.	Tersedianya Jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
2.	Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai jadwal dan ketentuan	100%	100%	100%
3.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Realisasi Kinerja Individu Tahun Anggaran 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sub Bag/Perencanaan dan Pelaporan (Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)					
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 laporan	11 laporan	100%
Sub Bagian Keuangan (Bendahara Pengeluaran)					
1.	Terselenggaranya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	24 Orang	100%
Sub Bagian Keuangan (Pengadministrasi Keuangan)					
1.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100%
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Pengadministrasi Umum)					
1.	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
2.	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
3.	Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
4.	Tersedianya Paket Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
5.	Terselenggara Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100%
6.	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Pengadministrasi Kepegawaian)					
1.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Pengelola Perwatasan Barang Milik Daerah)					
1.	Tersedianya Paket Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
2.	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	52 Unit	52 Unit	100%

		Disediakan			
3.	Terpeliharanya dan terfasilitasinya pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan difasilitasi pajaknya	18 Unit	30 Unit	100%
4.	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	100%
5.	Terfasilitasinya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
Sub Bidang Sosial (Pengadministrasi Perencanaan dan Program)					
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.	Terfasilitasinya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	100%
3.	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Sub Bidang Sumber Daya Manusia (Pengadministrasi Perencanaan dan Program)					
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.	Terfasilitasinya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	100%
3.	Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	100%
Sub Bidang Infrastruktur (Pengadministrasi Perencana dan Program)					
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.	Terfasilitasinya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	17 Perangkat Daerah	17 Perangkat Daerah	100%
3.	Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	17 Perangkat Daerah	17 Perangkat Daerah	100%

Sub Bidang Ekonomi (Pengendalian/Evaluasi Perencanaan dan Program)					
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.	Terlaksanaya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100%
3.	Terlaksanaya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100%
Sub Bidang Perencanaan (Pengelola Bahan Perencanaan)					
1.	Tersediaanya Dokumen Rancangan Awal RKPD/RKPD (Dasar Kebutuhan Jika RPJMD Masih Rancangan Teknokratik)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD/RKPD (Dasar Kebutuhan Jika RPJMD Masih Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.	Tersedianya Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
3.	Tersedianya Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
4.	Tersedianya Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan	1 Usulan	100%
5.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Dikoordinir (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Dikoordinir (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6.	Tersedianya Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	1 Masukan	100%
Sub Bidang Pengendalian (Pengendalian/Evaluasi Perencanaan dan Program)					
1.	Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 laporan	1 laporan	100%
2.	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 laporan	1 laporan	100%
Sub Bidang Litbang Sosial Budaya (Pengendalian/Evaluasi Program dan Tata Operasional Penelitian)					
1.	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 laporan	1 laporan	100%
2.	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapannya di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapannya di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
3.	Tersedianya Laporan Hasil Penyebarluasan Aplikasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyebarluasan Aplikasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Sub Bidang Litbang Ekonomi					

1.	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Notulis,

Muhammad Rizkie Lambang H

4.	Terlaksanaya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur Sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5.	Terlaksanaya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Infrastruktur ditindaklanjuti	100%	100%	100%

SUB BIDANG PENGENDALIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET (KU	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terlaksanaya Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

SUB BIDANG PERENCANAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
2.	Terlaksanaya Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai jadwal dan ketentuan	100%	100%	100%
3.	Terlaksanaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

	Daerah Sesuai dengan ketentuan				
4.	Terlaksanaya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan Daerah Sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5.	Terlaksanaya rencana aksi Satu Data Indonesia yang terlaksana tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Persentase Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang terlaksana tepat waktu	80%	80%	100%

No	Nama	P/L	Jabatan	Tanda Tangan
21	[illegible]	L	[illegible]	
22	[illegible]	L	[illegible]	
23	[illegible]	P	[illegible]	
24	[illegible]	L	[illegible]	
25	[illegible]	P	[illegible]	
26	[illegible]	P	[illegible]	
27	[illegible]	P	[illegible]	
28	[illegible]	L	[illegible]	
29	[illegible]	P	[illegible]	
30	[illegible]	L	[illegible]	
31	[illegible]	L	[illegible]	
32	[illegible]	P	[illegible]	
33	[illegible]	L	[illegible]	
34	[illegible]	L	[illegible]	
35	[illegible]	L	[illegible]	
36	[illegible]	L	[illegible]	
37	[illegible]	P	[illegible]	
38	[illegible]	L	[illegible]	
39	[illegible]	L	[illegible]	
40	[illegible]	P	[illegible]	
41	[illegible]	P	[illegible]	
42	[illegible]	P	[illegible]	
43	[illegible]	L	[illegible]	
44	[illegible]	P	[illegible]	
45	[illegible]			
46	M. Rusdi, S.H	L	[illegible]	
47	[illegible]	P	[illegible]	
48				
49				
50				

LAMPIRAN 14. DOKUMENTASI KEGIATAN ASISTENSI POHON KINERJA BAPPELITBANG TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No.22 Telp.(0517) 31016 Fax. 31435

N A N T A I

Kode Pos 71111

Nomor : 800.1/270 - Setkt/Bappelitbang
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Desk Pohon Kinerja OPD

Rantau, 25 Agustus 2023

Kepada Yth :

1. Para Staf Ahli Bupati
2. Para Asisten Sekretaris Daerah
3. Inspektur
4. Sekretaris DPRD
5. Kasubgal PP Jan Daerah
6. Kabkhar BPBD
7. Para Kepala Cnsultikan
8. Para Camat
9. Dir RSUD Datu Sanggul
10. Para Kepala Bagian

di –

Rantau

Menindaklanjuti hasil koordinasi dan konsultasi Tim SAKIP Kab Tapin yang dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah dengan Biasik Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II, maka kami bermaksud mengundang **Bapak/Ibu Kepala OPD, Sekretaris, seluruh Kepala Bidang dan Kasubag yang menangani Perencanaan dan Pelaporan** secara langsung (offline) dalam kegiatan rapat pembahasan dan rangkaian Desk Pohon Kinerja OPD yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jadwal Terlampir
Waktu : Jadwal Terlampir
Tempat : Jadwal Terlampir
Agenda : Arahan Sekretaris Daerah atas persiapan evaluasi SAKIP & RB dan Desk Pohon OPD 2023-2026

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tembusan:
1. Yth. Bapak Bupati Tapin (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Tapin (sebagai laporan)

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah
Nomor : 090/378 -Setkt/Bappelitbang
Tanggal : 25 Agustus 2023

Acara Pembukaan

No	Hari/Tanggal	Waktu	Tempat
1.	Selasa, 29 Agustus 2023	08.30 - Selesai	Pendopo Gusti Bastari

Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia
(Aula Perencanaan, Kantor Bappelitbang Tapin)

No	Hari/Tanggal	Waktu	SKPD
1.	Selasa, 29 Agustus 2023	09.00 - 12.00 13.00 - 16.00	1. Dinas Sosial Kabupaten Tapin 2. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin
2.	Rabu, 30 Agustus 2023	09.00 - 12.00 13.00 - 16.00	1. Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin 2. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tapin
3.	Kamis, 31 Agustus 2023	09.00 - 11.00 11.00 - 12.30 13.00 - 16.00	1. Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin 2. RSUD DS 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
4.	Jumat, 1 September 2023	09.00 - 12.00	1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin
5.	Senin, 4 September 2023	09.00 - 11.00 11.00 - 12.00 14.00 - 16.00	1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin 2. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Kabupaten Tapin 3. Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Tapin
6.	Selasa, 5 September 2023	08.00 - 12.00 13.00 - 16.00	1. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tapin
7.	Rabu, 6 September 2023	08.00 - 12.00 13.00 - 16.00	1. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin 2. Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tapin
8.	Kamis, 7 September 2023	08.00 - 12.00	1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
9.	Jumat, 8 September 2023	08.00 - 12.00	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin

Lampiran II Surat Sekretaris Daerah
Nomor : 090/378 -Setkt/Bappelitbang
Tanggal : 25 Agustus 2023

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
(Aula Perencanaan, Kantor Bappelitbang Tapin)

No	Hari/Tanggal	Waktu	SKPD
1.	Selasa, 29 Agustus 2023	08.00 - 12.00 13.00 - 15.00	1. Inspektorat 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Rabu, 30 Agustus 2023	08.00 - 12.00 13.00 - 16.00	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Perhubungan
3.	Kamis, 31 Agustus 2023	08.00 - 12.00 13.00 - 16.00	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Jumat, 1 September 2023	08.00 - 12.00 13.00 - 16.00	1. Dinas Perdagangan 2. Bappelitbang
5.	Senin, 4 September 2023	09.00 - 12.00 13.00 - 16.00	1. Dinas Perikanan 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.	Selasa, 5 September 2023	09.00 - 12.00 13.00 - 15.00	1. Dinas Perindustrian 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah
7.	Rabu, 6 September 2023	08.00 - 12.00 13.00 - 16.00	1. Badan Pendapatan Daerah 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8.	Kamis, 7 September 2023	08.00 - 12.00	1. Kecamatan Simalungun Tapin
9.	Jumat, 8 September 2023	08.00 - 12.00	1. Dinas Ketahanan Pangan

Catatan :

1. Desk Wajib dihadiri oleh Pejabat Pengampu Kinerja : Sekretaris, Seluruh Kabid dan perencanaan pelaporan;
2. Membawa Draf Pohin yang telah disempurkan sebagai data awal pembahasan pohin OPD;
3. Berhadir Tepat Waktu

Tim Asistensi Desk Pohin OPD 2023-2026:

1. Inspektorat
2. Bappelitbang
3. Sekda Bagian Organisasi

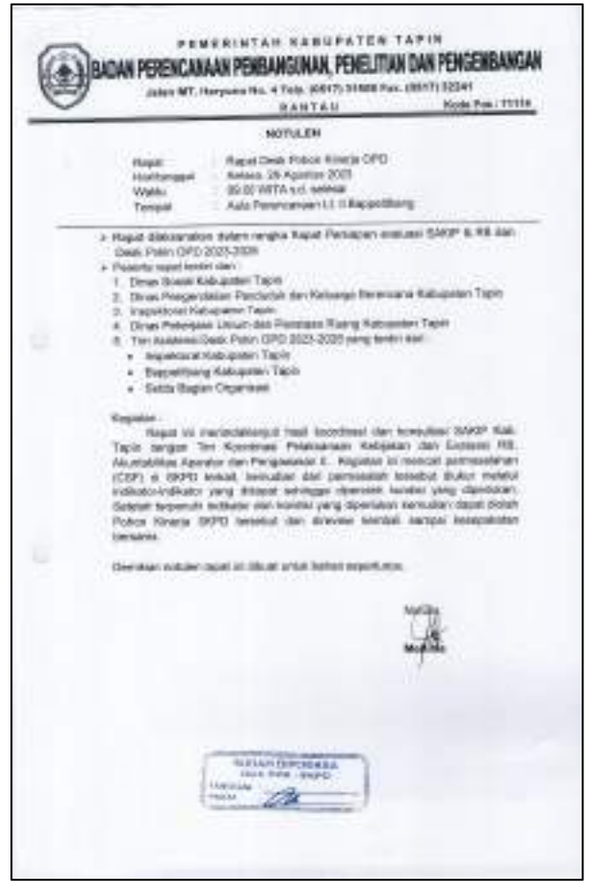

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 51608 Fax. (0517) 52241

RANTAU Kode Pos : 71119

MOTULEN

Rapat : Rapat Desk Pokok Kinerja OPD
Hari/tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023
Waktu : 09.00 WITA s.d. selesai
Tempat : Aula Perencanaan Lt. II Bappeltibang

- Rapat dilaksanakan dalam rangka Rapat Persiapan evaluasi SAKIP & RB dan Desk Pokin OPD 2023-2026
- Peserta rapat terdiri dari :
  1. Dinas Sosial Kabupaten Tapin
  2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin
  3. Inspektorat Kabupaten Tapin
  4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
  5. Tim Asistensi Desk Pokin OPD 2023-2026 yang terdiri dari :
     - Inspektorat Kabupaten Tapin
     - Bappeltibang Kabupaten Tapin
     - Setda Bagian Organisasi

Kegiatan :

Rapat ini merupakan lanjut hasil koordinasi dan konsultasi SAKIP Kab. Tapin dengan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan K. Kegiatan ini membahas permasalahan (CSF) di SKPD terkait, termuatan dari permasalahan tersebut diukur melalui indikator-indikator yang ditetapkan sehingga dipersiapkan kondisi yang diperlukan. Setelah terpenuhi indikator dan kondisi yang diperlukan kemudian dapat disusun Pokok Kinerja SKPD tersebut dan dirancang kembali sampai kesepakatan bersama.

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk bahan sepertinya.

Notulis

Mujahidin

DAFTAR HADIR

Rapat Persiapan Evaluasi SAKIP & RB dan Desk Pokin Kinerja OPD 2023-2026

Selasa, 29 Agustus 2023

No	Nama	L/P	Instansi/Jabatan	Tanda Tangan
1	M. [illegible]	L	Bappeltibang	
2	[illegible]	P	Dinas Sosial	
3	[illegible]	L	[illegible]	
4	[illegible]	P	Bapp	
5	[illegible]	P	Bappeltibang	
6	Bayana [illegible]	P	Bappeltibang	
7	[illegible]	P	Bappeltibang	
8	Rina [illegible]	P	DINAS SOSIAL	
9	Ferry M	P	DINSOS	
10	Erwin P.	L	Dinsos	
11	[illegible]	P	Dinsos / Sos	
12	Eny Lusiko E	P	Inspektorat	
13	A. [illegible]	L	"	
14	[illegible]	L	Inspektorat	
15	[illegible]	P	Inspektorat	
16	[illegible]	P	Inspektorat	
17	[illegible]	P	Inspektorat	
18	[illegible]	L	Inspektorat	
19	[illegible]	L	[illegible]	
20	[illegible]	P	DINSOS	
21	H. [illegible]	L	Bappeltibang	
22	[illegible]	P	Bappeltibang / Bkp	
23	[illegible]	P	Bappeltibang	
24	[illegible]	L	DPU P.R.	

DAFTAR HADIR

Rapat Persiapan Evaluasi SAKIP & RB dan Desk Pohon Kinerja OPD 2023-2026

Selasa, 29 Agustus 2023

No	Nama	L/P	Instansi/Jabatan	Tanda Tangan
1	[illegible]	L	DPPPA / [illegible]	
2	[illegible]	P	[illegible]	
3	[illegible]	P	[illegible]	
4	[illegible]	P	[illegible]	
5	[illegible]	L	[illegible]	
6	[illegible]	P	[illegible]	
7	[illegible]	L	—	
8	[illegible]	P	—	
9	[illegible]	L	—	
10	[illegible]	L	—	
11	[illegible]	L	—	
12	[illegible]	L	—	
13	[illegible]	L	—	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

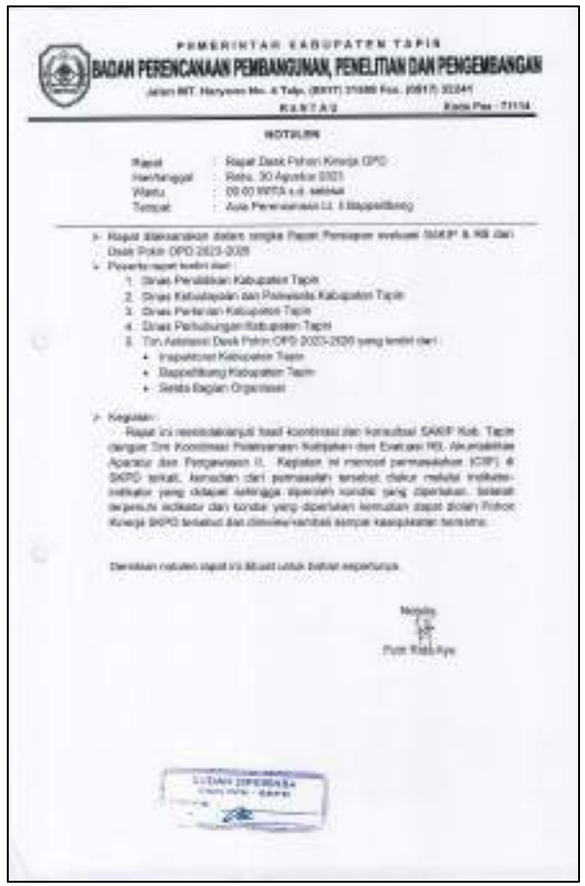

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 21088 Fax. (0517) 22341

RANTAU Kode Pos : 71114

NOTULEN

Rapat : Rapat Desk Pohon Kinerja OPD
Hari/tanggal : Selasa, 30 Agustus 2023
Waktu : 09.00 WITA s.d. selesai
Tempat : Aula Perencanaan Lt. 3 Bappelitbang

- Rapat dilaksanakan dalam rangka Rapat Persiapan evaluasi SAKIP & RB dan Desk Pohon OPD 2023-2026
- Peserta rapat terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
  2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin
  3. Dinas Pertanian Kabupaten Tapin
  4. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin
  5. Tim Asistensi Desk Pohon OPD 2023-2026 yang terdiri dari :
     - Inspektorat Kabupaten Tapin
     - Bappelitbang Kabupaten Tapin
     - Setda Bagian Organisasi
- Kegiatan :

  Rapat ini merupakan lanjut hasil koordinasi dan konsultasi SAKIP Kab. Tapin dengan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II. Kegiatan ini merupa permasalahan (CSF) & SKPD terkait, kendala dari permasalah tersebut diukur melalui indikator-indikator yang dibagai sehingga diperoleh kondisi yang diperlakan. Setelah berpeluh indikator dan kondisi yang diperlakan kemudian dapat dicatat Pohon Kinerja SKPD tersebut dan dimonev/kendali sampai kabupaten tersama.

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk bahan seperlunya.

Notulis

Putri Rizki Aya

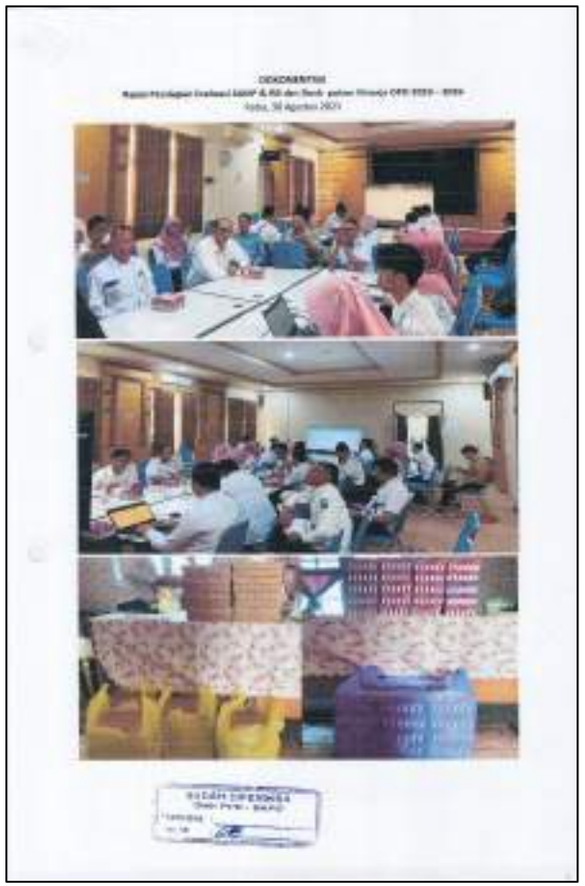

DOKUMENTASI

Rapat Persiapan Evaluasi SAKIP & RB dan Desk pohon Kinerja OPD 2023 – 2026

Selasa, 30 Agustus 2023

DAFTAR HADIR

Rapat Persiapan Evaluasi SAKIP & RB dan Desk Pohon Kinerja OPD 2023-2026

Rabu, 30 Agustus 2023

No	Nama	L/P	Instansi/Jabatan	Tanda Tangan
1	Akmal Faisal	L	Bappelitbang	
2	[illegible]	P	—	
3	[illegible]	P	—	
4	M. Bangga	P	—	
5	[illegible]	P	Stay Tapin	
6	[illegible]	P	[illegible]	
7	Mawan	P	[illegible]	
8	Rafif Muzaffar	L	Staff [illegible]	
9	Ryan Prasetyo	L	"	
10	Ari Sukari	L	"	
11	[illegible]	P	"	
12	[illegible]	P	[illegible]	
13	Bria [illegible]	P	"	
14	[illegible]	P	"	
15	[illegible]	P	"	
16	[illegible]	P	[illegible]	
17	Sri [illegible]	P	"	
18	[illegible]	P	[illegible]	
19	M. Fikri [illegible]	L	—	
20	[illegible]	L	"	
21	[illegible]	L	"	
22				
23				
24				
25				

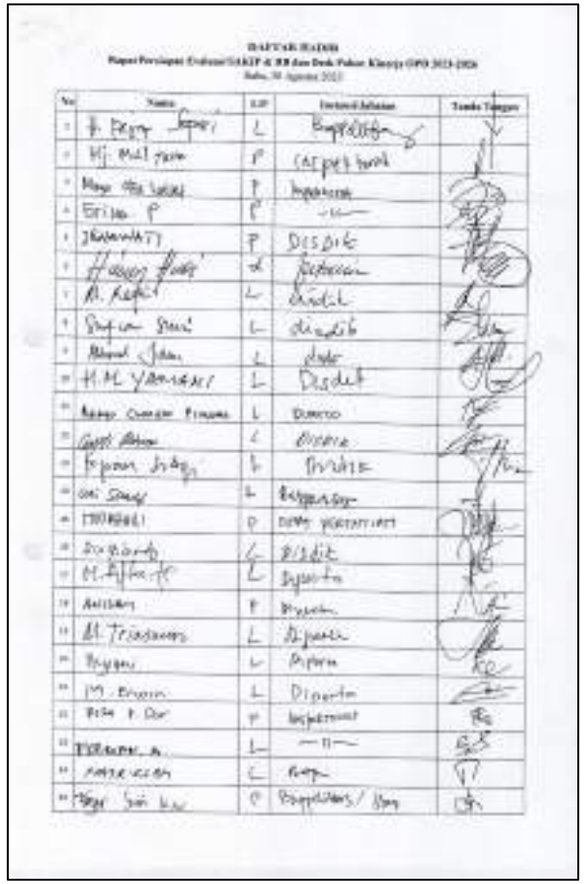

DAFTAR HADIR

Rapat Persiapan Evaluasi SAKIP & RB dan Desk Pohon Kinerja OPD 2023-2026

Rabu, 30 Agustus 2023

No	Nama	L/P	Instansi/Jabatan	Tanda Tangan
1	H. [illegible]	L	Bappelitbang	
2	Hj. Mul[illegible]	P	[illegible]	
3	[illegible]	P	[illegible]	
4	[illegible] P	P	—	
5	JAMANATI	P	DISDIK	
6	[illegible]	L	[illegible]	
7	M. [illegible]	L	disdik	
8	[illegible]	L	disdik	
9	[illegible]	L	disdik	
10	H. M. YAMANI	L	Disdik	
11	[illegible]	L	DUKCIS	
12	[illegible]	L	Disdik	
13	[illegible]	L	DISDIK	
14	[illegible]	L	[illegible]	
15	[illegible]	P	DINAS [illegible]	
16	[illegible]	L	Disdik	
17	M. [illegible]	L	Disdik	
18	[illegible]	P	[illegible]	
19	M. [illegible]	L	Disdik	
20	[illegible]	L	Disdik	
21	M. [illegible]	L	Disdik	
22	[illegible] P. Dar	P	[illegible]	
23	[illegible]	L	—	
24	[illegible]	L	[illegible]	
25	[illegible] Siti [illegible]	P	Bappelitbang/ [illegible]	

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31808 Fax. (0517) 22241

RANTAU Kode Pos : 71514

NOTULEN

Rapat : Rapat Desk Pohon Kinerja OPD
Hari/tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
Waktu : 09.00 WITA s.d. selesai
Tempat : Aula Perencanaan Lt. II Bappelitbang

- Rapat dilaksanakan dalam rangka Rapat Persiapan evaluasi SAKIP & RB dan Desk Pohon OPD 2023-2026
- Peserta rapat terdiri dari :
  1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
  2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
  3. Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin
  4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
  5. Tim Asistensi Desk Pohon OPD 2023-2026 yang terdiri dari :
     - Inspektorat Kabupaten Tapin
     - Bappelitbang Kabupaten Tapin
     - Setda Bagian Organisasi
- Kegiatan :

  Rapat ini merupakan lanjut koordinasi dan konsultasi SAKIP Kab. Tapin dengan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II. Kegiatan ini mencari permasalahan (CSF) di SKPD tertait, kendala dan permasalah tersebut diukur melalui indikator-indikator yang disajikan sehingga diperoleh kondisi yang diharapkan. Setelah terpasuni indikator dan kondisi yang diperlukan kemudian dapat disah Pohon Kinerja SKPD tersebut dan direview kembali sampai kesepakatan bersama.

  Demikian notulen rapat ini dibuat untuk bahan sepenuhnya.

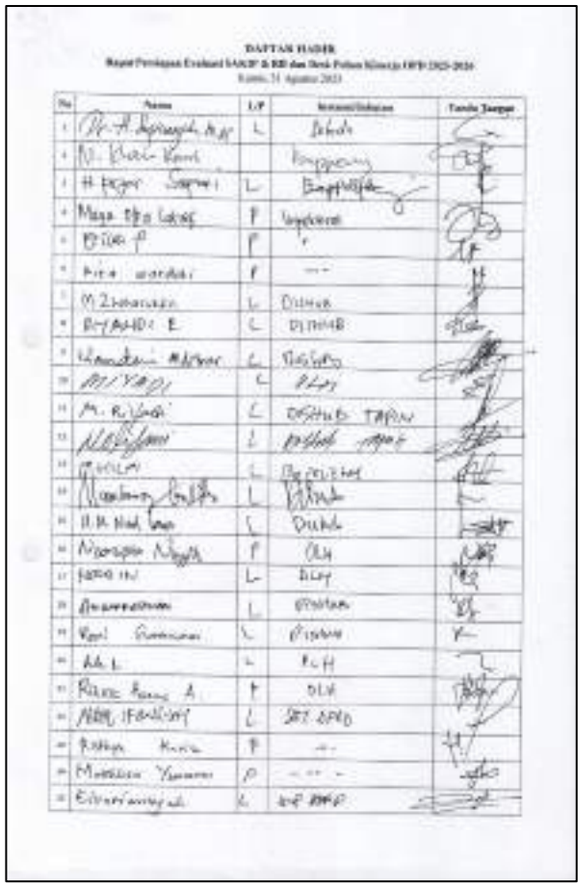

DAFTAR HADIR

No	Nama	L/P	Instansi/Jabatan	Tanda Tangan
1	[illegible]	L	[illegible]	
2	[illegible]		[illegible]	
3	[illegible]	L	[illegible]	
4	[illegible]	P	[illegible]	
5	[illegible]	P	[illegible]	
6	[illegible]	P	[illegible]	
7	[illegible]	L	[illegible]	
8	[illegible]	L	[illegible]	
9	[illegible]	L	[illegible]	
10	[illegible]	L	[illegible]	
11	[illegible]	L	[illegible]	
12	[illegible]	L	[illegible]	
13	[illegible]	L	[illegible]	
14	[illegible]	L	[illegible]	
15	[illegible]	L	[illegible]	
16	[illegible]	L	[illegible]	
17	[illegible]	P	[illegible]	
18	[illegible]	L	[illegible]	
19	[illegible]	L	[illegible]	
20	[illegible]	L	[illegible]	
21	[illegible]	L	[illegible]	
22	[illegible]	L	[illegible]	
23	[illegible]	P	[illegible]	
24	[illegible]	P	[illegible]	
25	[illegible]	P	[illegible]	
26	[illegible]	P	[illegible]	
27	[illegible]	L	[illegible]	

DOKUMENTASI

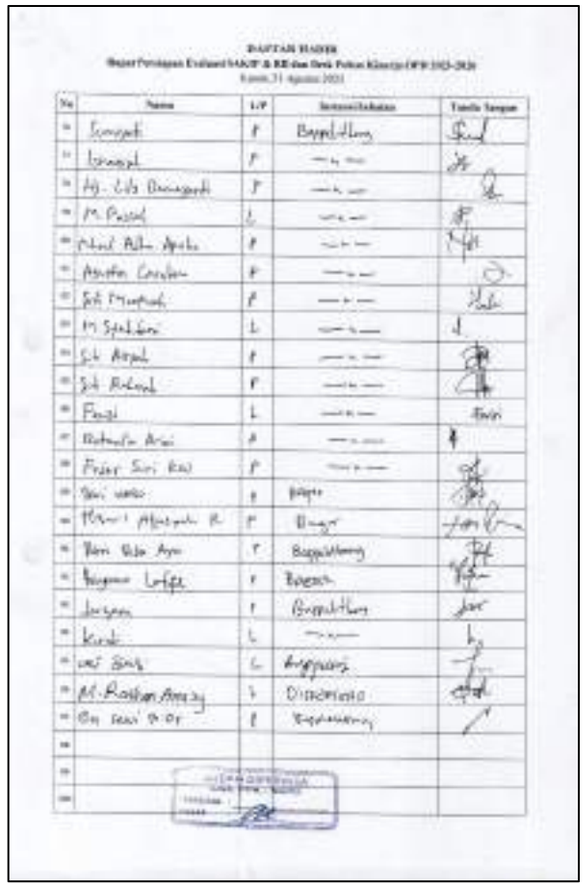

DAFTAR HADIR

No	Nama	L/P	Instansi/Jabatan	Tanda Tangan
1	[illegible]	P	[illegible]	
2	[illegible]	P	[illegible]	
3	[illegible]	P	[illegible]	
4	[illegible]	L	[illegible]	
5	[illegible]	P	[illegible]	
6	[illegible]	P	[illegible]	
7	[illegible]	L	[illegible]	
8	[illegible]	P	[illegible]	
9	[illegible]	P	[illegible]	
10	[illegible]	L	[illegible]	
11	[illegible]	P	[illegible]	
12	[illegible]	P	[illegible]	
13	[illegible]	P	[illegible]	
14	[illegible]	P	[illegible]	
15	[illegible]	P	[illegible]	
16	[illegible]	L	[illegible]	
17	[illegible]	L	[illegible]	
18	[illegible]	L	[illegible]	
19				
20				
21				

DOKUMENTASI

Rapat Persiapan Evaluasi SAKIP & RB dan Desk Pohon Kinerja OPD 2023-2026

Selasa, 5 September 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 51008 Fax. (0517) 22041

RANTAU Kode Pos : 71119

NOTULEN

Rapat : Rapat Desk Pohon Kinerja OPD

Hari/tanggal : Selasa, 05 September 2023

Waktu : 08.00 WITA s.d. selesai

Tempat : Aula Perencanaan Lt. II Bappelitbang

- Rapat dilaksanakan dalam rangka Rapat Persiapan evaluasi SAKIP & RB dan Desk Pohon OPD 2023-2026
- Peserta rapat terdiri dari :
  1. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin
  2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tapin
  3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
  4. Badan Kesatuan Bangsa Daerah Kabupaten Tapin
  5. Tim Asisten Desk Pohon OPD 2023-2026 yang terdiri dari :
     - Inspektorat Kabupaten Tapin
     - Bappelitbang Kabupaten Tapin
     - Setda Bagian Organisasi

Kegiatan :

Rapat ini membahas hasil koordinasi dan konsultasi SAKIP Kab. Tapin dengan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II. Kegiatan ini meneliti permasalahan (CSF) di SKPD terkait, kesulitan dari permasalah tersebut dapat nilai indikator-indikator yang didapat sehingga diperoleh kondisi yang diperbaiki, bahkan terperoleh indikator dan kondisi yang dipertukan kemudian dapat dicek Pohon Kinerja SKPD tersebut dan direview kembali sampai kesepakatan bersama.

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk bahan seperlunya.

Mengetahui
KEPALA BAPPELITBANG

Notulis,

Rahmy Yulita Sari

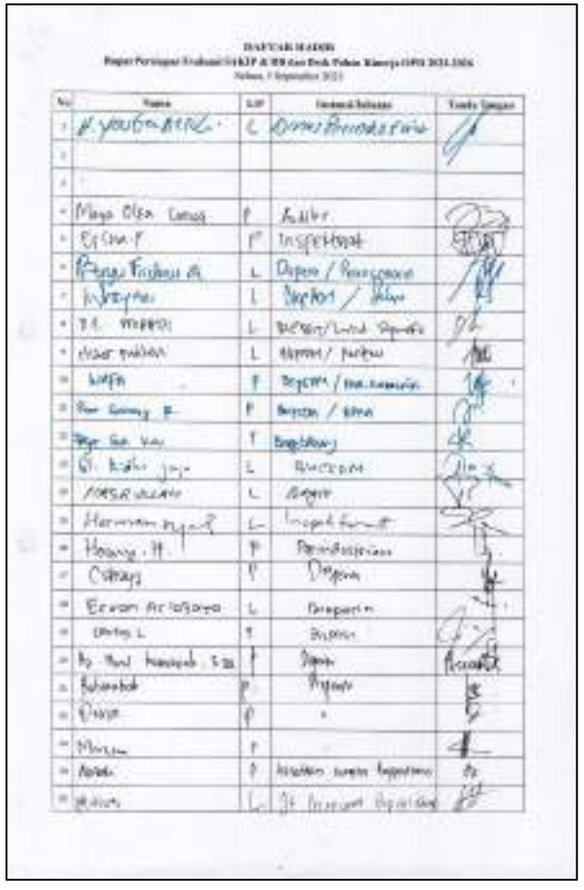

DAFTAR HADIR

Rapat Persiapan Evaluasi SAKIP & RB dan Desk Pohon Kinerja OPD 2023-2026

Selasa, 5 September 2023

No	Nama	L/P	Instansi/Jabatan	Tanda Tangan
1	[illegible]	L	[illegible]	
2				
3				
4	[illegible]	P	[illegible]	
5	[illegible]	P	Inspektorat	
6	[illegible]	L	[illegible]	
7	[illegible]	L	Inspektorat / [illegible]	
8	[illegible]	L	[illegible]	
9	[illegible]	L	[illegible] / [illegible]	
10	[illegible]	P	[illegible]	
11	[illegible]	P	[illegible] / [illegible]	
12	[illegible]	P	Bappelitbang	
13	[illegible]	L	[illegible]	
14	[illegible]	L	[illegible]	
15	[illegible]	L	Inspektorat	
16	[illegible]	P	[illegible]	
17	[illegible]	P	[illegible]	
18	[illegible]	L	[illegible]	
19	[illegible]	P	[illegible]	
20	[illegible]	P	[illegible]	
21	[illegible]	P	[illegible]	
22	[illegible]	P	[illegible]	
23	[illegible]	P		
24	[illegible]	P	[illegible]	
25	[illegible]	L	[illegible]	

DOKUMENTASI

DAFTAR HADIR

DOKUMENTASI

DAFTAR HADIR

No	Nama	L/P	Instansi/Jabatan	Tanda Tangan
1	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
2				
3				
4	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]		[illegible]	[illegible]
6	[illegible]		[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]

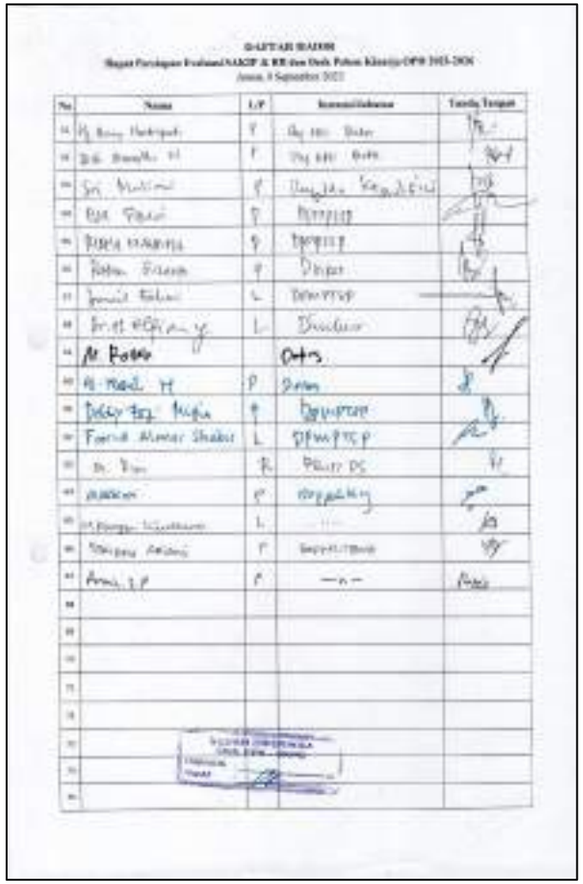

DAFTAR HADIR

No	Nama	L/P	Instansi/Jabatan	Tanda Tangan
24	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
34	[illegible]		[illegible]	[illegible]
35	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
36	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
37	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]
38	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]
39	[illegible]	P	— " —	[illegible]
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 21008 Fax. (0517) 23341
RANTAU
Kode Pos : 71114

Nomor : 000.7.2 / 387 - Setrit/Bappelitbang/2023
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Perihal : Pendaftaran Jadwal Desa Pakan OPD

Rantau, 07 September 2023

Kepada Yth :
(terlampir)
di –
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Desa Pakan Kinerja OPD yang [illegible] maka kami bersiapkan mohon Bapak/Ibu/ para Kepala OPD untuk berkenan **Hari Waktu dan Tempat Pelaksanaan Desa Pakan Kinerja** tersebut sebagaimana Terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

TEMBUSAN :
1. Yth. Bupati Bupati Tapin (sebagai laporan);
2. Yth. Bupati Wakil Bupati Tapin (sebagai laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin (sebagai laporan)

SUDAH DIPERIKSA
Oleh PPK - Bappelitbang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

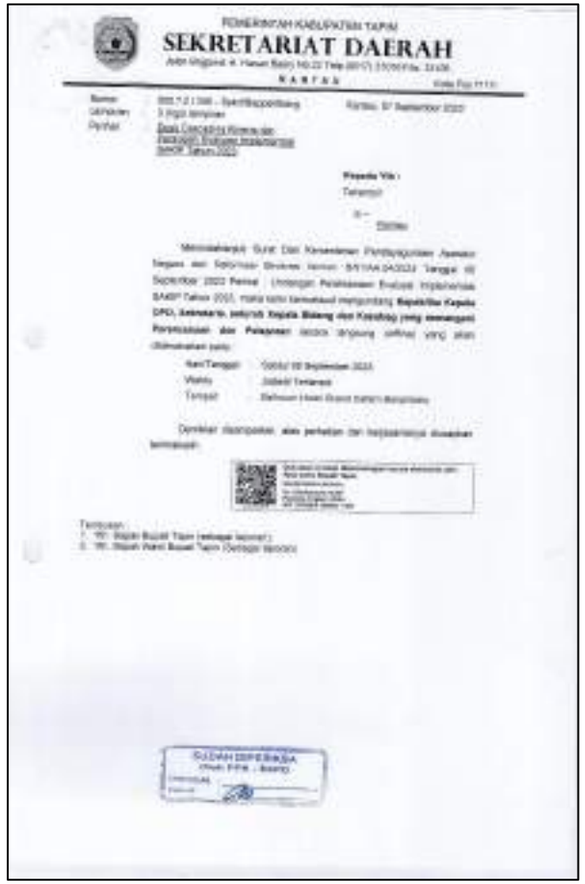

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal A. Yani Rantau No.22 Telp.(0517) 21009 Fax. 21108
RANTAU
Kode Pos 71119

Nomor : 000.7.2 / 388 - Setrit/Bappelitbang
Lampiran : 3 (tiga) lampiran
Perihal : Desa Pakan Kinerja dan Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023

Rantau, 07 September 2023

Kepada Yth :
Terlampir
di –
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1144/D4/2023 Tanggal 05 September 2023 Perihal : Undangan Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023, maka kami bermaksud mengundang **Bapak/Ibu Kepala OPD, Sekretaris, Inspektur, Kepala Bidang dan Koordinator yang menangani Perencanaan dan Pelaporan** untuk dengan [illegible] yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 09 September 2023
Waktu : Jadwal Terlampir
Tempat : Balaiman Aula Bupati Tapin Rantau

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tembusan :
1. Yth. Bupati Bupati Tapin (sebagai laporan);
2. Yth. Bupati Wakil Bupati Tapin (sebagai laporan)

SUDAH DIPERIKSA
Oleh PPK - Bappelitbang

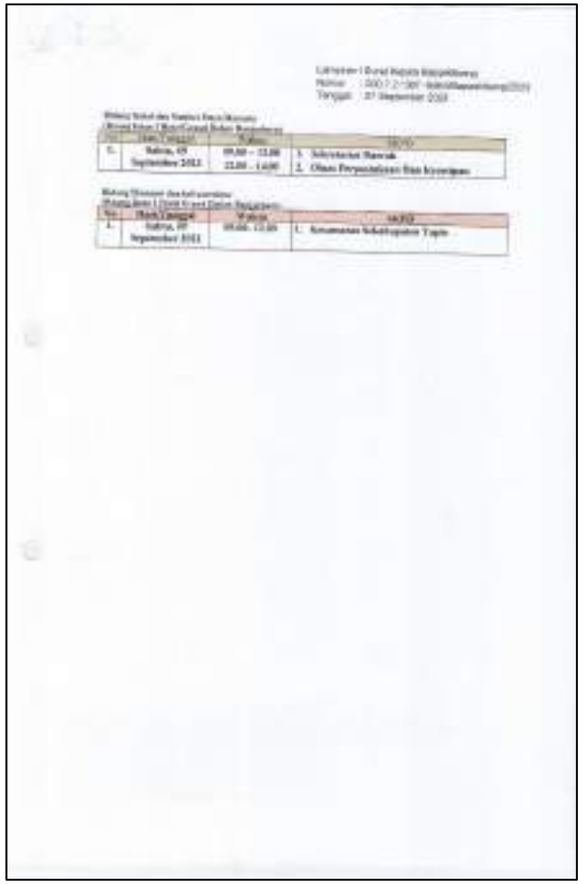

Lampiran I Surat Kepala Bappelitbang
Nomor : 000.7.2 / 387 - Setrit/Bappelitbang/2023
Tanggal : 07 September 2023

Waktu Sesuai dan Tempat Pelaksanaan
(Kinerja Dan / Kerja Sama Dalam Rangkaian)

No.	Hari/Tanggal	Waktu	OPD
1.	Rabu, 13 September 2023	09.00 – 12.00	1. Sekretariat Daerah
		13.00 – 14.00	2. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Waktu Dimana dan Kelurahan
(Kinerja Dan / Kerja Sama Dalam Rangkaian)

No.	Hari/Tanggal	Waktu	OPD
1.	Rabu, 20 September 2023	09.00 – 12.00	1. Kecamatan Kabupaten Tapin

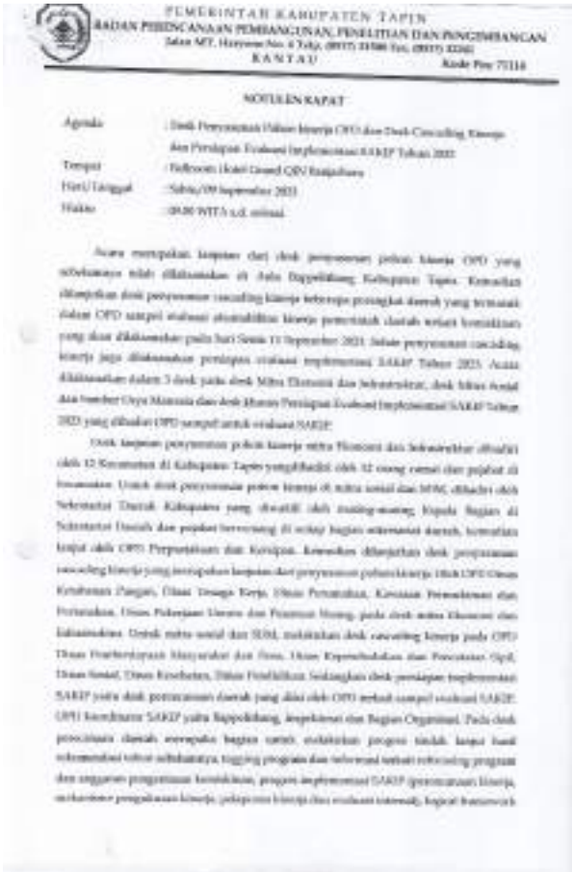

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 23500 Fax. (0517) 22261
KANTAU
Kode Pos 71114

NOTULEN RAPAT

Agenda : Desk Penyusunan Pohon Kinerja OPD dan Desk Consulting Kinerja dan Persiapan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023

Tempat : Fullroom Hotel Grand QBQ Banjarbaru

Hari/Tanggal : Selasa/09 September 2023

Waktu : 09.00 WITA s.d. selesai

Acara merupakan lanjutan dari desk penyusunan pohon kinerja OPD yang sebelumnya telah dilaksanakan di Aula Bappelitbang Kabupaten Tapin. Kemudian dilanjutkan desk penyusunan consulting kinerja beberapa perangkat daerah yang termasuk dalam OPD sampel evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebagai konsultasi yang akan dilaksanakan pada hari Senin 11 September 2023. Selain penyusunan consulting kinerja juga dilaksanakan persiapan evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2023. Acara dilaksanakan dalam 3 desk yaitu desk Mitra Ekonomi dan Sekretariat, desk Mitra Sosial dan Sumber Daya Manusia dan desk Bidang Persiapan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023 yang dihadiri OPD sampel untuk evaluasi SAKIP.

Desk lanjutan penyusunan pohon kinerja mitra Ekonomi dan Sekretariat dihadiri oleh 12 Kecamatan di Kabupaten Tapin yang dihadiri oleh 12 orang camat dan pejabat di kecamatan. Untuk desk penyusunan pohon kinerja di mitra sosial dan SDM dihadiri oleh Sekretariat Daerah Kabupaten yang diwakili oleh masing-masing Kepala Bagian di Sekretariat Daerah dan pejabat berwenang di setiap bagian sekretariat daerah, kemudian hadir oleh OPD Perpustakaan dan Kearsipan. Kemudian dilanjutkan desk penyusunan consulting kinerja yang merupakan lanjutan dari penyusunan pohon kinerja oleh OPD Dinas Kesehatan Jiwapan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada desk mitra Ekonomi dan Sekretariat. Untuk mitra sosial dan SDM, melakukan desk consulting kinerja pada OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Sedangkan desk persiapan implementasi SAKIP yaitu desk pemerintah daerah yang dini oleh OPD sebagai sampel evaluasi SAKIP. OPD koordinator SAKIP yaitu Bappelitbang, Inspektorat dan Bagian Organisasi. Pada desk pemerintah daerah merupakan bagian sampel, melaksanakan progres tindak lanjut hasil rekomendasi tahun sebelumnya, tagging program dan beberapa sebagai referensi program dan anggaran pengukuran kesehatan, progres implementasi SAKIP (pencatatan kinerja, mekanisme pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal), logical framework sebuah program kesehatan.

Notulen,

M. Fauzi

LAMPIRAN 15. CROSS CUTTING BAPPELITBANG

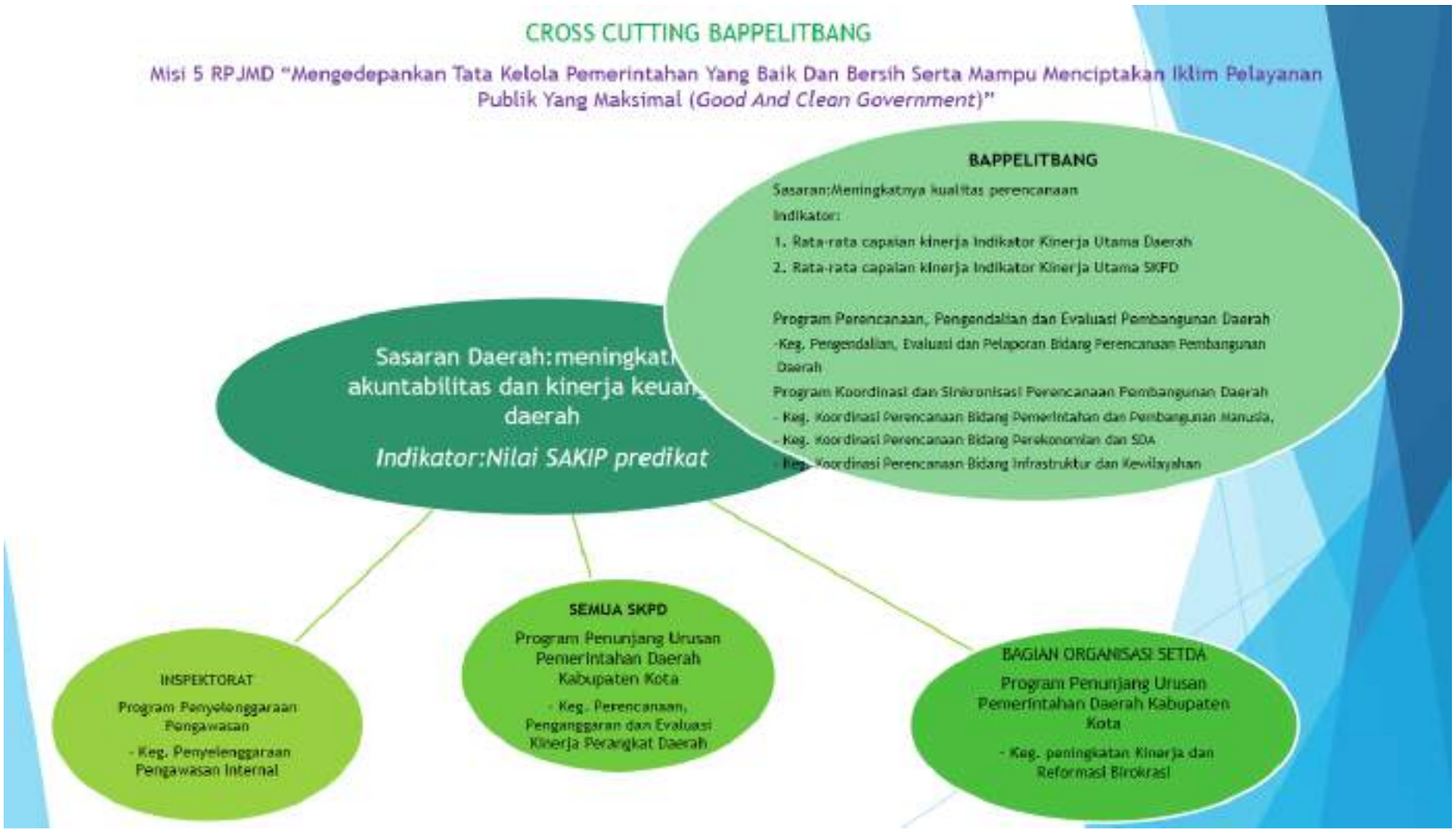

CROSS CUTTING BAPPELITBANG

Misi 5 RPJMD "Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (*Good And Clean Government*)"

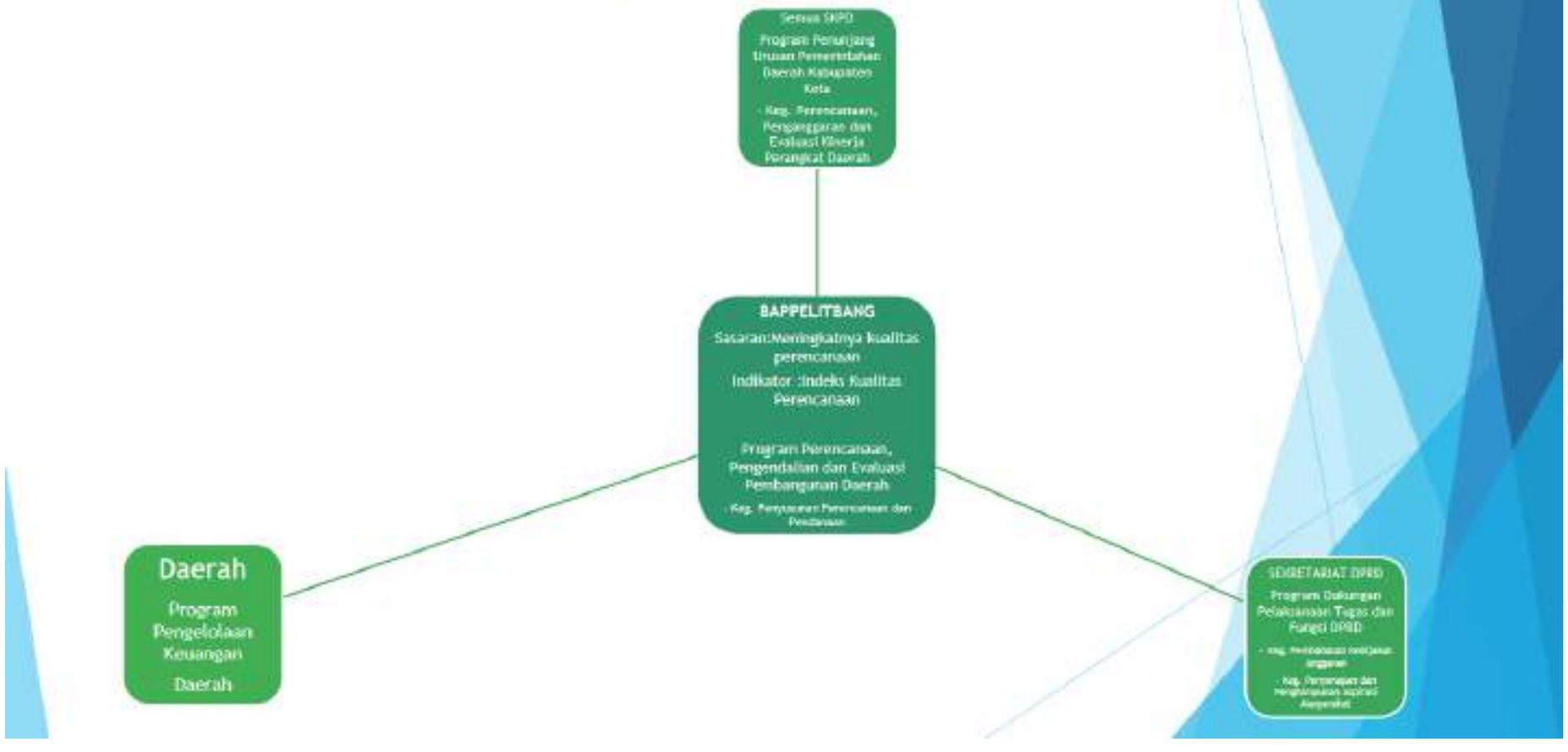

CROSS CUTTING BAPPELITBANG

Misi 5 RPJMD "Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (Good And Clean Government)"

Sasaran "Meningkatnya hasil kelitbangan"

Indikator:

Persentase hasil kelitbangan yang disitasi

Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan

Program Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti

Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

Kajian kecukupan ruang terbuka hijau berbasis serapan emisi karbon dioksida di kabupaten tapin

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

"Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)"

CROSS CUTTING BAPPELITBANG

Misi 5 RPJMD "Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (Good And Clean Government)"

Sasaran "Meningkatnya hasil kelitbangan"

Indikator:

Persentase hasil kelitbangan yang disitasi

Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan

Program Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

"Kajian strategi pengembangan komoditas cabai rawit hiyung"

Dinas Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Dinas Perdagangan

"Program penggunaan dan Pemassaran Produk Dalam Negeri"

Dinas Perindustrian

"Program Pengembangan UMKM"

CROSS CUTTING BAPPELITBANG

Misi 5 RPJMD "Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (Good And Clean Government)"

Sasaran "Meningkatnya hasil kelitbangan"

Indikator:

Persentase hasil kelitbangan yang disitasi

Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan

Program Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti

Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

"kajian pengembangan biomassa pertanian sebagai bio energi dan sustainable agriculture di kabupaten tapin"

BPBD
"Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana"

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
"Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH"

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
"Program Peningkatan Kerjasama Desa"

DINAS PERTANIAN
"Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian"

CROSS CUTTING BAPPELITBANG

Misi 5 RPJMD "Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (Good And Clean Government)"

Sasaran "Meningkatnya hasil kelitbangan"

Indikator:

Persentase hasil kelitbangan yang disitasi

Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan

Program Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti

Penelitian dan Pengembangan Aspek-aspek Sosial

"Kajian Faktor Pemicu Pernikahan Dini dan Kebijakan Penanggulangannya di Kabupaten Tapin Tahun 2021"

Dinas Pendidikan

"Program Pengelolaan Pendidikan"

DINAS Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

"Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak"

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

"Program Pengendalian Penduduk"

DINAS Kesehatan

"Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat"

CROSS CUTTING BAPPELITBANG

Misi 5 RPJMD "Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (Good And Clean Government)"

Sasaran "Meningkatnya hasil kelitbangan"

Indikator:

Persentase hasil kelitbangan yang disitasi

Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan

Program Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti

Pengembangan Inovasi dan Teknologi

"inovasi sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui website E-STAR atau electronic sustainable tapin research"

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Tenaga Kerja
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- UPTD Puskesmas Bakarangan
- UPTD Puskesmas Bakarangan
- DINAS Kesehatan